

fh  
wig  
s er

**STUDI BENTUK KERJA SAMA PENGELOLAAN  
PEMBANGUNAN KAWASAN PERKOTAAN DI PERBATASAN  
KOTA DAN KABUPATEN SEMARANG**

**TESIS**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Kota**

Oleh :

**DANANG HENDRATA WIJAYA  
NIM : L4D000067**



**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2003**

**UPT-PUSTAK-UNDIP**

**STUDI BENTUK KERJA SAMA PENGELOLAAN PEMBANGUNAN KAWASAN  
PERKOTAAN DI PERBATASAN KOTA DAN KABUPATEN SEMARANG**

Tesis diajukan kepada  
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Kota  
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Oleh :

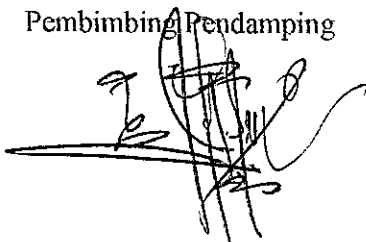
**DANANG HENDRATA WIJAYA**  
L4D000067

Diajukan Pada Sidang Ujian Tesis  
Tanggal 2 Januari 2003

Dinyatakan Lulus  
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

Semarang, Januari 2003

Pembimbing Pendamping



Samsul Ma'rif, SP,MT

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, DEA

Megetahui  
Ketua Program Studi  
Magister Teknik Pembangunan Kota  
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro



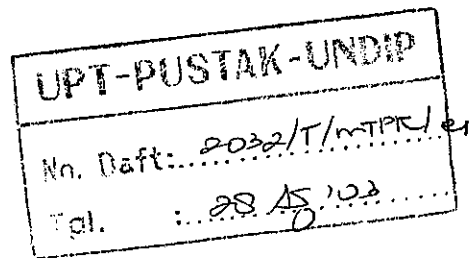
Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, DEA

**PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Semarang, Januari 2003

**DANANG HENDRATA WIJAYA**  
NIM L4D000067



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini yang berjudul “**Studi Bentuk Kerja Sama Pengelolaan Pembangunan Kawasan Perkotaan Di Perbatasan Kota Dan Kabupaten Semarang**” sebagai salah satu rangkaian untuk menyelesaikan studi di Program Magister Teknik Pembangunan Kota Universitas Diponegoro Semarang.

Pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, atas segala bantuan, bimbingan dan arahnya dalam rangka penyelesaian Tesis kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr.Ir. Sugiono Soetomo, DEA selaku Ketua Program Magister Teknik Pembangunan Kota Universitas Diponegoro sekaligus sebagai Mentor dalam penulisan tesis yang dengan penuh ketulusan dan kearifan dalam membimbing penyusunan tesis.
2. Samsul Ma'rif, SP, MT selaku co-Mentor yang dengan penuh ketulusan dan kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penyusunan tesis.
3. PM. Broto Sunaryo, SE. MSP dan Ir. Djoko Suwandono, MSP selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan-masukan yang berguna bagi kesempurnaan penyusunan tesis.
4. Seluruh Dosen yang mengampu mata kuliah pada Program Magister Teknik Pembangunan Kota Universitas Diponegoro .
5. Budi Santoso, ST dan Sumardi, ST yang telah membantu dan memberikan tukar pikirannya untuk penyelesaian tesis ini.
6. Teman-teman angkatan III Magister Teknik Pembangunan Kota Universitas Diponegoro.
7. Istri dan Keluarga Besar di Yogyakarta yang telah memberikan dukungannya selama kuliah di Semarang.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian penyusunan tesis.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna, penulis terbuka atas saran dan kritik demi perbaikan tulisan ini. Akhirnya, semoga tulisan ini bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Semarang, Januari 2003

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan, Sasaran Dan Manfaat Studi.....	7
1.4 Ruang Lingkup Penelitian.....	8
1.4.1 Ruang Lingkup Materi.....	8
1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah Penelitian.....	9
1.5 Kerangka Pemikiran.....	10
1.6 Pendekatan Studi.....	12
1.7 Metoda Penelitian.....	13
1.7.1 Kebutuhan Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	13
1.7.2 Pengolahan Data.....	14
1.7.3 Analisis Data.....	14
1.8 Sistematika Pembahasan.....	20
<b>BAB II KAJIAN KERUANGAN WILAYAH PERBATASAN</b>	
2.1 Pengertian Wilayah Perbatasan.....	23
2.2 Teori Pertumbuhan Dan Perkembangan Kawasan Perkotaan Di Perbatasan..	27
2.3 Teori Perkembangan Wilayah.....	30

2.4 Kerjasama Antar Daerah.....	33
2.5 Bentuk Kerja Sama Antardaerah Otonom.....	36
2.5.1 Contoh berbagai bentuk Kerja Sama Antar Daerah .....	37
2.5.2 Bentuk Kerja Sama Pengelolaan Pembangunan Kawasan Perkotaan .....	41
2.6 Prosedur Kerjasama.....	49
2.7 Rangkuman.....	54

<b>BAB III KAJIAN WILAYAH PENELITIAN</b> .....	56
3.1. Kecamatan Tembalang.....	57
3.1.1 Aspek Fisik Dasar.....	57
3.1.2 Kependudukan.....	58
3.1.3 Penggunaan Lahan.....	59
3.1.4 Fasilitas .....	60
3.2 Kecamatan Banyumanik.....	61
3.2.1 Aspek Fisik Dasar.....	61
3.2.2 Kependudukan.....	62
3.2.3 Penggunaan Lahan.....	63
3.2.4 Fasilitas .....	64
3.3 Kecamatan Gunung Pati.....	64
3.3.1 Aspek Fisik Dasar.....	64
3.3.2 Kependudukan.....	67
3.3.3 Penggunaan Lahan.....	68
3.3.4 Fasilitas .....	69
3.4 Kecamatan Ungaran.....	69
3.4.1 Aspek Fisik Dasar.....	69
3.4.2 Kependudukan.....	71
3.4.3 Penggunaan Lahan.....	73
3.4.4 Fasilitas .....	73
3.5 Kebijakan Tata Ruang Kota Semarang dan Kabupaten Semarang .....	74
3.5.1 Kebijakan Tata Ruang kota Semarang .....	74
3.5.2 Kebijakan Tata Ruang Kabupaten semarang .....	78
3.6 Kecenderungan Perubahan Tata Guna Lahan .....	79

**BAB IV ANALISIS DAN BENTUK KERJA SAMA PENGELOLAAN  
PEMBANGUNAN KAWASAN PERKOTAAN DI PERBATASAN KOTA  
DAN KABUPATEN SEMARANAG**

4.1 Analisis Kerja Sama Pengelolaan Pembangunan.....	87
4.1.1 Alternatif Bentuk Kerja Sama Pengelolaan Pembangunan .....	87
4.1.2 Penyusunan Hierarki Beban dan Manfaat Alternatif Kerja Sama.....	89
4.1.2.1 Hierarki Beban Alternatif Kerja Sama.....	95
4.1.2.2 Hierarki Manfaat Alternatif Kerja Sama.....	97
4.1.3 Hasil Analisis Bentuk Kerja Sama .....	100
4.1.3.1 Analisis Beban dan Manfaat dari Setiap Alternatif .....	103
4.1.3.2 Analisis Beban dan Manfaat dari Setiap Bidang Kerja Sama....	105
4.1.3.3 Analisis Beban dan Manfaat dari Setiap Faktor .....	107
4.2 Bentuk Pengelola Pembangunan Kawasan Perkotaan.....	109
4.2.1 Bentuk Pengelolaan Pembangunan Kawasan Perkotaan di Perbatasan	109
4.2.1.1 Bentuk Badan Pengelola Pembangunan Kawasan Perkotaan .....	110
4.2.1.2 Tugas dan Fungsi.....	110
4.2.1.2 Susunan Organisasi.....	111
4.2.2 Mekanisme Pengelolaan Pembangunan Kawasan Perkotaan di Perbatasan.....	113
4.2.2.1 Perencanaan Potensi Kawasan Perkotaan di Perbatasan.....	113
4.2.2.2 Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perkotaan di Perbatasan....	114
4.2.2.3 Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Perkotaan di Perbatasan	114
4.2.3 Hubungan Dengan Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota dan Mekanisme Kerja.....	115
4.2.4 Pembiayaan.....	116
4.2.5 Jangka Waktu .....	120
4.3 Wilayah Oprasional Badan Kerja Sama Pengelolaan Pembangunan.....	121
<b>BAB V PENUTUP</b>	
51 Kesimpulan.....	123
52 Rekomendasi Studi.....	127
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>128</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>130</b>

## DAFTAR TABEL

TABEL I.1	: Matrik Silang Keunggulan dan Keterbatasan Kawasan Perbatasan Kota dan Kabupaten Semarang.....	14
TABEL I.2	: Matrik Silang Kerja Sama Antara Kota dan Kabupaten Semarang...	15
TABEL I.3	: Perbandingan Manfaat dan Beban Kerja Sama .....	18
TABEL II.1	: Aset Pelengkap yang Harus Dimiliki Oleh Mitra Aliansi.....	42
TABEL II.2	: Perumusan Bentuk Kerja Sama Pengelolaan Pembangunan .....	49
TABEL III.1	: Perkembangan Penduduk di Kec. Tembalang Tahun 1994-1998 ...	59
TABEL III.2	: Penggunaan Lahan Kec. Tembalang Tahun 1994 dan 1998 .....	60
TABEL III.3	: Perkembangan Penduduk di Kec. Banyumanik Tahun 1994-1998..	63
TABEL III.4	: Penggunaan Lahan Kec. Tembalang Tahun 1994 dan 1998 .....	63
TABEL III.5	: Perkembangan Penduduk di Kec. Gunungpati Tahun 1994-1998...	68
TABEL III.6	: Penggunaan Lahan Kec. Gunungpati Tahun 1994 dan 1998 .....	69
TABEL III.7	: Jumlah Penduduk Kec. Ungaran Tahun 1995-1998.....	72
TABEL III.8	: Penggunaan Lahan Kec. Ungaran Tahun 1994 dan 1998 .....	73
TABEL III.9	: Perubahan Penggunaan Lahan di Wilayah Perbatasan .....	82
TABEL III.10	: Pola Penggunaan Lahan di Wilayah Perbatasan .....	83
TABEL IV.1	: Matrik Silang Kekurangan dan Kelebihan Kawasan Perbatasan....	90
TABEL IV.2	: Kerjasama antara Kota Semarang dengan Kabupaten Semarang ....	92
TABEL IV.3	: Kerjasama antara Kota Semarang dengan Kabupaten Semarang ....	93
TABEL IV.4	: Beban dan Manfaat Kerja Sama .....	94
TABEL IV.5	: Bobot Beban Kerja Sama Pengelolaan Pembangunan .....	103
TABEL IV.6	: Bobot Manfaat Kerja sama Pengelolaan Pembangunan .....	104
TABEL IV.7	: Perbandingan alternatif bobot beban dan Manfaat Kerja Sama .....	104
TABEL IV.8	: Bobot Penilaian Beban dan Manfaat pada Bidang Pembangunan...	105
TABEL IV.9	: Bobot Penilaian Beban dan Manfaat pada Bidang Pemerintahan....	106
TABEL IV.10	: Bobot Penilaian Beban dan Manfaat pada Bidang Kemasyarakatan	107
TABEL IV.11	: Bobot Penilaian Pada Tingkat Faktor .....	108
TABEL IV.12	: Rasio Beban dan Manfaat Alternatif Terpilih .....	109
TABEL IV.13	: Hubungan dan Mekanisme Kerja .....	117

## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1	: Peta Orientasi Wilayah Studi .....	21
GAMBAR 1.2	: Peta Wilayah Studi .....	22
GAMBAR 1.3	: Kerangka Berfikir Studi .....	11
GAMBAR 2.1	: Formasi Aliansi .....	43
GAMBAR 3.1	: Peta Rawan Bencana .....	84
GAMBAR 3.2	: Peta Sepadan Sungai.....	85
GAMBAR 3.3	: Peta Sepadan Mata Air .....	86
GAMBAR 4.1	: Beban Kerja Sama Pengelolaan Pembangunan .....	101
GAMBAR 4.2	: Manfaat Kerja Sama Pengelolaan Pembangunan .....	102
GAMBAR 4.3	: Struktur Organisasi Badan Kerja Sama Pengelolaan Pembangunan Kawasan Perkotaan di Perbatasan.....	112
GAMBAR 4.4	: Skema Koordinasi Badan Kerja Sama Pengelolaan Pembangunan Kawasan Perkotaan di Perbatasan .....	118
GAMBAR 4.5	: Peta Wilayah Oprasional Badan Kerja Sama .....	122

## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A	: Kuesioner Penelitian .....	130
LAMPIRAN B	: Hasil Analisis <i>Expert Choose</i> .....	146

## ABSTRAK

*Kawasan Kabupaten Semarang dan Kota Semarang merupakan dua daerah yang berbatasan langsung, sebagai dua daerah yang berbatasan langsung secara fungsional daerah tersebut merupakan satu kesatuan wilayah, namun secara administratif merupakan dua daerah yang berbeda. Perbedaan secara administratif inilah menjadikan daerah tersebut potensial terjadi konflik antardaerah, bila masing-masing daerah dalam mengelola dan mengembangkan potensi daerahnya tidak secara terpadu.*

*Kawasan Kabupaten Semarang dan Kota Semarang dalam hal potensi yang dimiliki (SDA, SDM dan Sumber Daya Buatan), masing-masing daerah mempunyai keunggulan dan keterbatasan terhadap satu dengan lainnya. Kemudian untuk mengoptimalkan keunggulan dan mengatasi keterbatasan potensi yang dimiliki, dalam suatu kegiatan pembangunan kawasan perkotaan di perbatasan, kedua daerah ini dapat melakukan kerja sama antardaerah atas dasar saling melengkapi.*

*Dalam studi ini, bermaksud mencoba menyusun bagaimana bentuk dari kerja sama antardaerah itu, dan bidang-bidang apa saja yang dapat dikerja samakan berdasarkan pada keunggulan dan keterbatasan potensi masing-masing daerah dalam usaha memecahkan masalah dan atau mewujudkan kepentingan bersama yang saling menguntungkan, serta bagaimana bentuk kelembagaannya untuk mewadahi kerja sama tersebut agar dapat berjalan sesuai rencana.*

*Untuk mendapatkan bentuk kerja sama, mendasarkan pada kajian teori tentang formasi aliansi (sifat, bentuk dan keanggotaan), sedangkan bidang yang dapat dikerja samakan didapat setelah diadakan identifikasi terhadap keunggulan dan keterbatasan potensi masing-masing daerah. Kemudian dianalisis dengan metode analisis matriks silang sederhana, didapatlah bidang-bidang yang dikerjasamakan. Kajian eksploratif dan teori digunakan untuk menentukan bentuk kelembagaan kerjasama antardaerah.*

*Temuan dalam studi ini, setelah melalui proses analisis yang dilakukan, didapat bidang yang dikerja samakan adalah bidang Pembangunan (Komponen Sumber Daya Alam, Komponen perumahan dan permukiman, dan Komponen Infrastruktur); bentuk kerja sama bersifat usaha patungan terfokus; serta lembaga kerja samanya berbentuk Badan Kerja Sama Pengelola Pembangunan Kawasan Perkotaan di Perbatasan.*

## ABSTRACT

*Kabupaten Semarang and Semarang city distric are two region that have direct border, thats why as a two region that have direct border in a fungsional way it has one region in common, but in administratif ways the two district are two different region. This different in the administratif ways makes the region potensially to interregion conflict , if each region in running and develop their potency are work in separate ways.*

*Kabupaten Semarang and Semarang city district have distinguish superiority and limitation in term of potency that they have (natural resource, human resource and artificial resource). Then, to optimize the superiority and to dealing with their limitation of the potency that they had, in term of the development of city district in the border, this two region can work together based on complete each other.*

*This study, try to construct the form of relationship between the region, and what fields that can work together based on each region superiority and limitation in try to solve the problem and/or try to achieve mutual interest of the two region, also how the shape of institution the place that relationship lies in order work as plan.*

*To get the form of relationship, it has to based on aliance formation theory (nature, shape and membership), as the field that going to work together can achieve after the identification to each region superiority and limitation potency. After analyse using the simple cross matrix method, the field that are going to work together can be achieved. Exploration recite and theory was used to determine the shape of relationship institution between the two region.*

*Finding in this study, after going trough several analysing process, result a field that are going to work together which is Development field (Natural Resources Component, Housing Component, and Infrastructure Component); the form of relationship are focused joint venture nature, and the shape of their relationship institution are District City in The Border Development Cooperation Committee*

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka pemberdayaan daerah, pada Tahun 1999 Pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan berupa Undang-Undang Nomer 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang secara singkat menunjukkan bahwa akan dilaksanakannya desentralisasi kekuasaan yang lebih besar ke pemerintah daerah. Undang-undang ini memberikan porsi kewenangan yang besar bagi otonomi daerah sampai ke tingkat kabupaten/kota. Distribusi kewenangan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota seperti yang tertuang pada pasal 10 Undang-undang tersebut. Dengan melihat kewenangan demikian besar yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota dalam pembangunan di daerah maka menuntut pengelolaan pembangunan yang lebih baik. Pengelolaan pembangunan di daerah tidak terlepas dari menggali potensi-potensi daerah yang dapat dimanfaatkan untuk modal pembangunan daerah, khususnya dalam meningkatkan penerimaan daerah.

Di sisi yang lain, kebijaksanaan ini juga akan mendorong iklim kompetitif antar daerah khususnya antar daerah kabupaten/kota. Masing-masing daerah berusaha untuk dapat melaksanakan pembangunan daerah, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengaruh negatif yang harus dicermati dari kondisi tersebut adalah kemungkinan terjadinya konflik-konflik antar daerah, khususnya antara daerah yang berbatasan langsung dalam usaha mengoptimalkan potensi daerah.

Konflik adalah perbedaan pendapat antara dua atau lebih individu, anggota organisasi atau kelompok, karena harus membagi sumber daya langka atau aktivitas kerja dan karena mereka mempunyai status, tujuan, penilaian atau pandangan yang berbeda. Salah satu kesulitan semantis yang berkenaan dengan konflik, adalah perbedaan konflik dengan persaingan kompetisi. Kompetisi terjadi apabila tujuan kedua belah pihak yang saling berhadapan tidak sesuai, akan tetapi pihak-pihak yang bersangkutan tidak dapat mencampuri usaha pihak lain, namun jika ada kemungkinan untuk mencampuri pihak lain maka akan terjadi konflik (Agus R dan Heri, 2000).

Potensi konflik yang melekat pada perencanaan pembangunan daerah otonom adalah kemungkinan terjadi eksklusivisme dan egoisme daerah yang berlebihan. Selain itu jika daerah mempunyai sikap sentimen kedaerahan yang berlebihan, akan muncul ketegangan antar daerah yang bertetangga.

Konflik-konflik ini lebih banyak akan muncul di wilayah perbatasan (wilayah perbatasan disini adalah tempat pertemuan antara dua daerah otonom atau lebih) antar daerah. Misalnya dalam hal pemanfaatan sumber daya atau penyediaan sarana dan prasarana yang bersifat lintas batas daerah administratif. Bila saja terjadi saling berebut sumber yang menguntungkan daerah atau sebaliknya, saling melempar tanggung jawab yang membebani daerah. Sebagai contoh, sumber air minum suatu daerah otonom bisa saja berasal dari daerah otonom tetangga. Contoh lain bisa juga bencana banjir atau polusi sungai di suatu tempat disebabkan oleh kecerobohan anggota masyarakat daerah tetangga. Di wilayah ini sering terdapat fasilitas-fasilitas umum maupun sumber daya alam yang merupakan potensi daerah untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Di wilayah perbatasan antar daerah ini juga merupakan daerah yang rawan tetapi strategis, karena apabila tidak diperhatikan pembangunannya maka akan menimbulkan kesenjangan sosial-ekonomi dan sosial-budaya antar daerah dan hal ini kurang menguntungkan bagi pembangunan daerah pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya (S. Pamuji, 1985).

Salah satu wilayah perbatasan yang memenuhi persyaratan di atas adalah wilayah perbatasan Kabupaten Semarang dan Kota Semarang. Pada wilayah perbatasan Kota Semarang dengan Kabupaten Semarang ini indikasi potensi konflik yang dapat muncul adalah pada pemanfaatan ruang. Indikasi ini berkaitan dengan adanya ketidak terpaduan Rencana Tata Ruang Wilayah antara Kota Semarang dengan Kabupaten Semarang. Pada konteks ini bagian wilayah Kota Semarang yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Semarang adalah Kecamatan Tembalang, Banyumanik dan Gunung Pati yang secara umum mengarahkan ketiga wilayah tersebut menjadi daerah konservasi dengan tujuan pemeliharaan ekosistem dan pengendalian banjir bagi Kota Semarang. Pada Sisi lainnya wilayah Kabupaten Semarang yang berbatasan langsung dengan Kota Semarang adalah Kecamatan Ungaran, yang dalam RTRW Kabupaten Semarang diarahkan sebagai pusat pelayanan, pusat pemukiman dan pusat industri.

Kebijakan tata ruang Kabupaten Semarang untuk wilayah Kecamatan Ungaran mendorong daerah tersebut berfungsi sebagai daerah budidaya. Padahal Kecamatan Ungaran masih dalam satu kesatuan tata hidrologi dengan Kota Semarang sehingga perubahan tata hidrologi di Kecamatan Ungaran akan berpengaruh terhadap Kota Semarang.

Dari kondisi tersebut maka wilayah perbatasan Kota Semarang dengan Kabupaten Semarang mempunyai potensi konflik pemanfaatan ruang yang cukup tinggi.

Potensi konflik tersebut muncul karena ketidak serasian perencanaan, dari satu sisi kecenderungan perkembangan fisik Kota Ungaran yang tinggi dan disisi lain wilayah perbatasan Kota Semarang berfungsi sebagai kawasan konservasi atau daerah resapan air.

Sebagai ilustrasi lain dapat kita kemukakan bahwa pembangunan sektor industri yang sifatnya terpusat pada suatu kawasan tertentu (biasanya di wilayah-wilayah pinggiran dari suatu kota), jelas akan mendorong kemajuan dari wilayah yang bersangkutan. Pengaruh positif yang bisa diharapkan oleh daerah sekitarnya adalah tumbuhnya lapangan kerja bagi warga masyarakat, serta semakin terbukanya kawasan tersebut untuk berkomunikasi ke luar batas-batas teritorialnya. Seiring dengan itu daerah sekitarnya yang berbatasan akan terkena imbas. Implikasinya pada kawasan perbatasan tersebut secara homogen akan menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada. Apabila pada salah satu kawasan sebelahnya adalah pertanian, maka akibat dari dorongan wilayah perbatasan tetangganya yang dominan permukiman, lambat laun akan terjadi perubahan dari pertanian menjadi permukiman. Masalah lain adalah menyangkut pengalihan kegiatan masyarakat. Jika daerah perbatasan itu adalah wilayah pertanian yang cukup subur dan jika hanya sebagian kecil masyarakat sekitar yang tertampung sebagai tenaga kerja di sektor industri itu, maka masalahnya menjadi rumit, karena berarti daerah tetangga tersebut disamping harus mengorbankan areal pertaniannya (karena polusi dan sebagainya) maka juga terancam pengangguran tak kentara di sektor pertanian.

Contoh lain yang secara nyata dapat menunjukkan akibat negatif dari kegiatan pembangunan di suatu daerah terhadap daerah sekitarnya adalah dalam hal pembuatan tanggul disuatu daerah aliran sungai. Jika satu sungai besar yang mengalir melintasi dua atau lebih daerah sebelum sampai kemuaranya, maka suatu kebijakan pembangunan yang sifatnya terpisah akan mengancam kepentingan daerah-daerah lainnya. Misalnya, daerah

yang paling dekat ke muara membuat tanggul untuk menanggulangi banjir, maka jika tanggul-tanggul itu hanya dibuat sepanjang perbatasannya, sementara daerah-daerah di belakangnya tidak berbuat serupa, sudah dapat diduga bahwa daerah-daerah belakang itu akan mengalami bencana banjir yang lebih besar.

Penyelenggaraan pengelolaan berbagai sektor pembangunan, terutama yang mempunyai ruang lingkup kepentingan yang luas serta mencakup suatu rangkaian kawasan yang luas pula, nampaknya telah melintasi batas-batas wilayah administratif dari berbagai lingkungan pemerintahan. Dalam pada itu, pembangunan daerah yang pada dasarnya diorientasikan pada pembangunan suatu wilayah tertentu, dalam perkembangan terakhir ini semakin dihadapkan pada berbagai permasalahan yang tidak saja sulit untuk diatasi sendiri, tetapi juga mengharuskan dilakukannya kerjasama dengan daerah-daerah sekitarnya. Kesemuanya ini hanya mungkin diatasi melalui suatu kerjasama antardaerah, dimana kepentingan-kepentingan mereka dapat diwujudkan tanpa pengorbanan pihak lain. Suatu kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan. Dengan demikian kesinambungan pembangunan dapat terpelihara, dan kesejahteraan rakyat dapat terus ditingkatkan secara bertahap ( S. Pamuji, 1985).

Setelah objek yang akan dikerjasamakan itu jelas, maka daerah-daerah otonom yang bekerjasama dapat memilih suatu bentuk kerjasama yang tepat dengan asumsi bahwa daerah otonom sebagai suatu perusahaan yang mengelola sumber daya alam di wilayah perbatasan. Penyebab dasar terbentuknya kerjasama adalah adanya kesesuaian strategik. Kesesuaian strategik mempunyai arti bahwa kemampuan utama dari kedua mitra saling melengkapi. Sedangkan untuk mempertahankan kerjasama, harus dilakukan adaptasi budaya, yang akan membentuk aliansi yang terbaik.

## 1.2 Perumusan Masalah

Implikasi diterapkannya UU No. 22 Tahun 1999 terhadap wilayah perbatasan adalah semakin tajamnya konflik pengelolaan potensi sumber daya di wilayah perbatasan sebagai akibat egoisme daerah otonom dalam mengeksploitasi sumber daya tersebut.

Konflik dapat menyebabkan beberapa implikasi terhadap pemerintah daerah yang terlibat baik positif maupun negatif. Positif jika konflik mampu mendorong pemerintah daerah untuk lebih berprestasi dan berkreasi. Negatif jika konflik menyebabkan kekacauan dan penurunan kualitas pelayanan.

Permasalahan secara umum yang terjadi berkaitan dengan konflik pemanfaatan ruang di wilayah perbatasan Kota Semarang dan Kabupaten Semarang bersifat fenomenologi. Indikasi yang dapat dijelaskan berkaitan dengan perumusan masalah ini adalah:

1. Pertentangan prinsip dasar paradigma otonomi daerah dengan paradigma penataan ruang.
2. Keterkaitan yang erat secara fisik keruangan antara Kota Semarang dengan Kabupaten Semarang.

Kajian mengenai konflik pemanfaatan ruang di wilayah perbatasan Kota Semarang dengan Kabupaten Semarang merupakan latar belakang yang mendorong komplementer kedua wilayah yang berfungsi sebagai awal studi untuk mencari bentuk-bentuk kerjasama yang akan dikaji lebih dalam lagi untuk mengatasi konflik pemanfaatan ruang khususnya yang berkaitan dengan kewenangan daerah di masa otonomi daerah. Secara substansi, ruang lingkup masalah konflik pemanfaatan ruang menyangkut aspek-aspek kegiatan manusia dalam mengatur dan menggunakan ruang yaitu aspek aktivitas,

fasilitas, dan utilitas. Sedangkan secara spasial/wilayah, ruang lingkup masalah konflik pemanfaatan ruang menyangkut aspek karakteristik fisik keruangan wilayah perbatasan yaitu kesesuaian lahan dan arah perkembangan fisik struktur ruang.

Dari lingkup ini maka akan timbul pertanyaan penelitian (*research question*) “Bagaimana bentuk kerjasama pengelolaan pembangunan kawasan perkotaan di perbatasan antara Kota dan Kabupaten Semarang?”

### **1.3 Tujuan, Sasaran dan Manfaat Studi**

Tujuan studi ini adalah mencari bentuk kerjasama pengelolaan pembangunan kawasan perkotaan di perbatasan antara Kota dan Kabupaten Semarang.

Sasaran studi yang ingin dicapai untuk mewujudkan tujuan studi yang disebutkan di atas adalah:

- Identifikasi bidang-bidang yang akan dikerjakan samakan
- Identifikasi alternatif bentuk kerja sama yang sesuai dengan bidang-bidang yang dikerjakan samakan.
- Identifikasi struktur pengelolaan pembangunan kawasan perbatasan antara Kota dan Kabupaten Semarang.
- Identifikasi kawasan yang dijadikan wilayah kerja sama pengelolaan pembangunan.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai masukan bagi pemerintah Kota Semarang dan Kabupaten Semarang untuk menjalin kerja sama di wilayah perbatasan, akibat pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing kabupaten/kota.

## **1.4 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini terdiri atas ruang lingkup materi dan ruang lingkup wilayah. Ruang lingkup materi bertujuan membatasi substansi pembahasan yang berkaitan dengan kerja sama antar daerah. Sedangkan ruang lingkup wilayah berusaha membatasi lingkup wilayah kajian agar didapatkan hasil sesuai tujuan penelitian.

### **1.4.1 Ruang Lingkup Materi**

Ruang lingkup materi penelitian ini dibatasi pada aspek-aspek pemanfaatan ruang wilayah yaitu:

1. Aspek aktivitas yang meliputi aspek fisik dan aspek sosial ekonomi.
  - Aspek sosial ekonomi yaitu aktivitas yang komplementer antar wilayah yang akan menjelaskan mengenai aktivitas penduduk, ekonomi dan transportasi.
  - Aspek fisik terdiri dari fasilitas dan utilitas, aspek fasilitas ini meliputi fasilitas peribadatan, kesehatan, pendidikan, pemerintahan, ekonomi, hiburan, perumahan dan ruang terbuka. Aspek utilitas, aspek ini menjelaskan tentang prasarana jalan, air limbah, air bersih, dan persampahan yang ada di wilayah perbatasan Kota Semarang dengan Kabupaten Semarang.
2. Aspek pemanfaatan ruang yang dimaksud pada studi ini adalah pemanfaatan antar fungsi komponen-komponen ruang kawasan perkotaan antara Kota Semarang dengan Kabupaten Semarang.
3. Susunan kelembagaan/organisasi dan personalia ditetapkan setelah terlebih dulu disepakati wadah yang mengelola kerja sama itu. Dengan demikian suatu struktur

organisasi yang disepakati (demikian pula personalianya) harus benar-benar menjamin kerja sama dapat berlangsung sesuai dengan rencana.

#### 1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah

Lingkup wilayah penelitian dibatasi secara makro oleh wilayah administrasi kedua daerah yang berbatasan tersebut. Sehingga ruang lingkup wilayah makro adalah Kota Semarang dan Kabupaten Semarang secara keseluruhan. Sedangkan ruang lingkup wilayah mikro adalah wilayah perbatasan Kota Semarang dengan Kabupaten Semarang yaitu suatu wilayah yang meliputi lebih dari satu daerah yang berbatasan dan terdiri dari satuan wilayah administrasi dari dua wilayah tersebut yang cukup mendukung untuk perancangan dan pelaksanaan rencana-rencana pembangunan guna memecahkan persoalan ekonomi dan fisik keruangan. Wilayah perbatasan Kota Semarang dengan Kabupaten Semarang tersebut meliputi wilayah Kecamatan Banyumanik, Kecamatan Tembalang, dan Kecamatan Gunung Pati untuk wilayah Kota Semarang, serta wilayah Kabupaten Semarang yaitu Kecamatan Ungaran. Untuk lebih jelasnya, wilayah perbatasan Kota Semarang dengan Kabupaten Semarang dapat dilihat dalam peta **Orientasi Wilayah Studi dan Wilayah Studi** pada **Gambar 1.1 dan Gambar 1.2**

Alasan mengapa wilayah perbatasan Kota Semarang dengan Kabupaten Semarang serta unit administrasi kecamatan diambil sebagai wilayah penelitian adalah:

- Adanya homogenitas perkotaan antara Kota Semarang dengan Kabupaten Semarang.
- Wilayah ini berfungsi sebagai penyangga Kota Semarang. Kemungkinan gangguan terhadap lingkungan yang terjadi baik di wilayah perbatasan maupun di Kota Semarang akan mempengaruhi fungsinya sebagai wilayah penyangga.
- Kemungkinan perkembangan yang cepat di wilayah ini karena masih banyak lahan-lahan yang kosong yang dapat digunakan untuk perluasan fisik Kota Semarang.

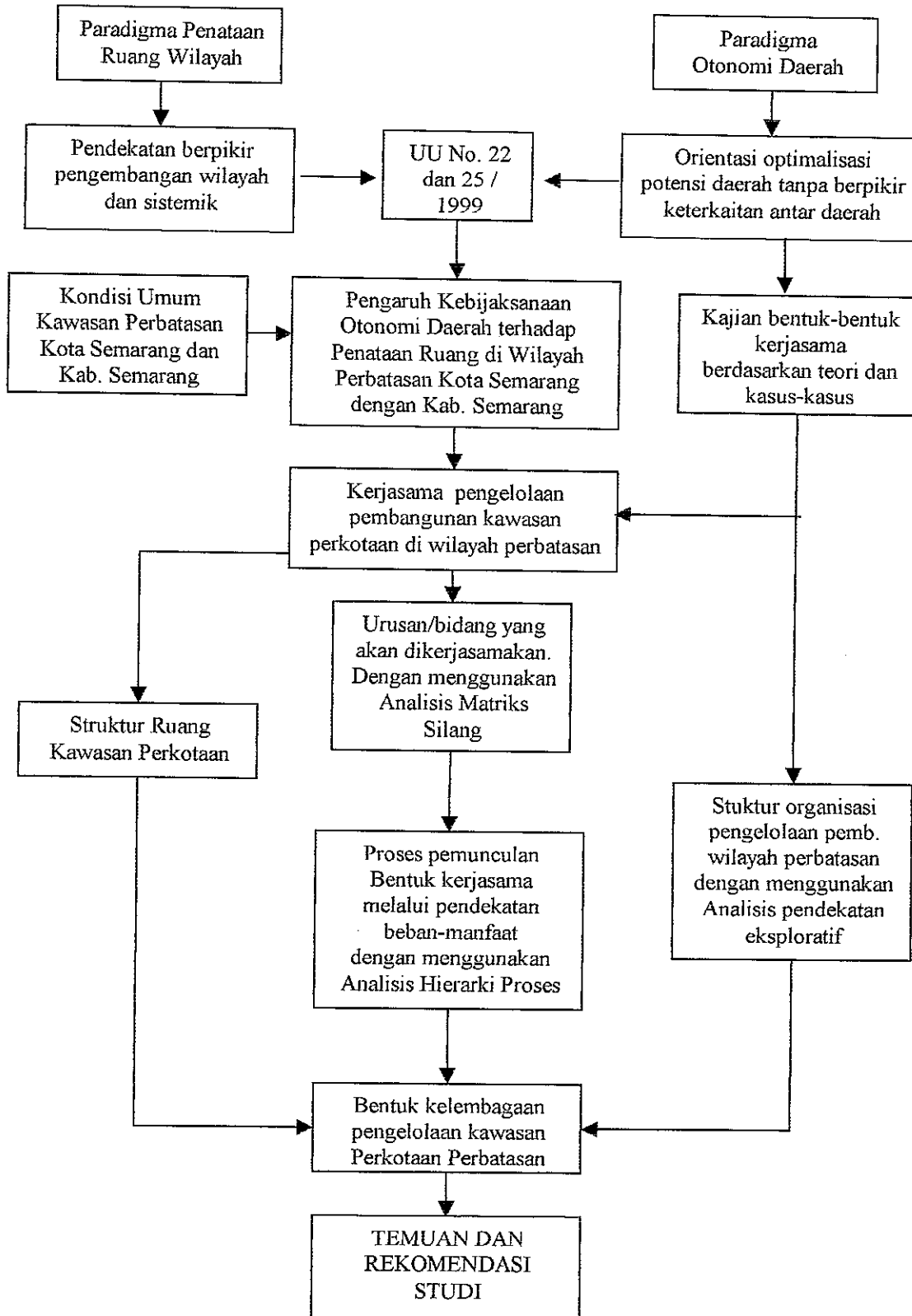
Perkembangan fisik Kota Semarang saat ini sudah mengarah ke bagian selatan kota yaitu di wilayah studi, hal ini akan menyebabkan konflik kepentingan pemanfaatan ruang di wilayah perbatasan.

- Untuk melakukan kerjasama antar daerah otonom yang nantinya akan dibentuk suatu model pengelolaan bersama membutuhkan kejelasan lingkup wilayah. Dari hal tersebut didapatkan satuan wilayah administratif terkecil yang memungkinkan untuk dikelola menjadi suatu model badan kerja sama.

### **1.5 Kerangka Berpikir Studi**

Bentuk kerja sama pengelolaan pembangunan kawasan perkotaan di perbatasan antara Kota Semarang dan Kabupaten Semarang dilatar belakangi oleh pentingnya wilayah perbatasan untuk dikaji dan dikembangkan. Faktor yang mendasari adalah adanya kebijaksanaan otonomi daerah yang ditekankan di daerah kabupaten/kota yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Otonomi daerah ditingkat kabupaten/kota menyebabkan iklim kompetitif antar daerah dalam mengelola wilayahnya termasuk wilayah perbatasan untuk pembangunan daerah. Hal ini yang mendorong upaya untuk mengkaji tentang wilayah perbatasan antar kabupaten/kota. Kajian wilayah perbatasan antar kabupaten/kota tidak lepas dari perkembangan wilayah perbatasan khususnya wilayah perbatasan Kota Semarang dengan Kabupaten Semarang sebagai wilayah penelitian. Kecenderungan perkembangan di wilayah perbatasan disebabkan oleh perkembangan alami maupun direncanakan dari kebijaksanaan tata ruang.

**GAMBAR I.3  
KERANGKA BERPIKIR STUDI**



## 1.6 Tahapan Pelaksanaan Studi

Pendekatan studi yang dilakukan secara berurut dari penentuan permasalahan, penganalisaan hingga tahap kesimpulan/rekomendasi dari studi adalah sebagai berikut:

1. Menyusun kerangka pemikiran studi sebagai pokok pemikiran dari tujuan dan sasaran yang tertuang setelah merumuskan fenomena yang terjadi dilapangan.
2. Melakukan kajian teoritis tentang pertumbuhan dan perkembangan kota, kemudian dilanjutkan dengan melakukan kajian perundang-undangan (UU No. 22 tahun 1999) mengenai bentuk kerja sama pengelolaan pembangunan kota.
3. Melakukan kajian analisis matrik silang sederhana untuk mengetahui urusan/bidang yang akan dikerja samakan. Analisis ini untuk mengeluarkan urusan/bidang dan faktor yang prioritas dan saling berkomplementer antara kedua daerah tersebut.
4. Melakukan analisis PHA (Proses Hirarki Analitik) sebagai proses pemunculan bentuk kerja sama melalui pendekatan beban-manfaat.
5. Melakukan kajian analisis deskriptif kualitatif untuk mengetahui struktur organisasi pengelolaan pembangunan perkotaan kawasan perbatasan.
6. Melakukan kajian keruangan wilayah oprasional kerja sama.
7. Menarik kesimpulan tentang bentuk pengelolaan pembangunan perkotaan kawasan perbatasan antara Kota Semarang dengan Kabupaten Semarang dan memberikan rekomendasi sesuai tujuan penelitian.

Jadi penelitian ini tergolong pada penelitian deskriptif eksploratif, yakni penelitian ini bermaksud menggambarkan bagaimana kondisi nyata dari kawasan perkotaan diperbatasan tersebut. Penelitian ini juga bermaksud menemukan bentuk yang sebelumnya tidak pernah ada di kawasan tersebut, sehingga lebih bersifat menggali bentuk yang bisa diterapkan.

## 1.7 Metode Studi

### 1.7.1 Kebutuhan Data dan Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data dilakukan dengan memanfaatkan data sekunder yang sudah ada dari beberapa instansi. Dalam pengumpulan data, yang menjadi perhatian utama adalah bahwa data yang didapat harus mendukung studi, data tersebut masih valid, relevan, lengkap, representatif dan kesalahan baku kecil. Hal tersebut dilakukan agar proses studi dapat berjalan lancar dan hasil yang diperoleh juga baik.

Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui pengumpulan dokumen di instansi-instansi yang terkait dengan topik yang diangkat dalam studi. Adapun instansi-instansi yang diharapkan menjadi sumber data antara lain:

1. Kantor BPS Kota Semarang dan Kabupaten Semarang

Data yang dibutuhkan pada kantor ini adalah data jumlah penduduk tiap-tiap kecamatan di kawasan perbatasan, sarana prasarana perekonomian, fasilitas dan utilitas.

2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota/ Kabupaten Semarang.

Data yang dibutuhkan adalah kebijakan-kebijakan strategis yang ada dikawasan perbatasan dan produk-produk Rencana Tata Ruang.

3. Kantor Pertanahan Kota Semarang dan Kabupaten Semarang

Data yang dibutuhkan adalah data fisik dasar kawasan perbatasan, penggunaan lahan dan peta-peta yang mendukung gambaran kawasan perkotaan diperbatasan kedua daerah tersebut.

### 1.7.2 Analisis Data

Tahap selanjutnya adalah tahapan analisis yang merupakan proses pengkajian terhadap hasil pengolahan data. Adapun garis besar analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut:

#### 1. Analisis Matrik Silang

Melakukan kajian analisis matrik silang sederhana untuk mengetahui urusan/bidang yang akan dikerjasamakan. Analisis ini untuk mengeluarkan urusan/bidang yang prioritas dan saling berkomplementer antara kedua daerah tersebut.

Sebagai contoh, bidang yang ingin dikerjasamakan adalah pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan. Bidang ini diambil karena disetiap pemerintahan kota/kabupaten bidang ini menempati kedudukan yang penting dalam pengaturan pemerintah kota/kabupaten. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di bawah ini:

**TABEL I.1**  
**MATRIK SILANG KEUNGGULAN DAN KETERBATASAN KAWASAN**  
**PERBATASAN KOTA SEMARANG DENGAN KABUPATEN SEMARANG**

SUMBER	KOTA SEMARANG		KABUPATEN SEMARANG		SUMBER
BAPPEDA	+			-	BAPPEDA
	-			+	

**TABEL I.2**  
**MATRIK SILANG**  
**KERJASAMA ANTARA KOTA SEMARANG DENGAN KABUPATEN**  
**SEMARANG**

Kota SMG		Pembangunan						Pemerintahan						Masyarakat					
		A		B		C		D		E		F		G		H		I	
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-
Pembangunan	A	+																	
		-																	
	B	+																	
		-																	
	C	+																	
		-																	
Pemerintahan	D	+																	
		-																	
	E	+																	
		-																	
	F	+																	
		-																	
Masyarakat	G	+																	
		-																	
	H	+																	
		-																	
	I	+																	
		-																	

Untuk menentukan urusan/bidang dari A sampai I tersebut dikaji dari pernyataan yang diberikan instansi Bappeda kedua daerah melalui survei pendahuluan.

Dengan menggunakan matrik silang sederhana, bidang/urusan yang diprioritaskan untuk dikerjakan samakan akan dapat terlihat dengan tanda + (positif). Tanda tersebut artinya urusan tersebut memiliki keunggulan yang perlu dikerjakan samakan karena di satu pihak memiliki bidang yang telah maju atau berkembang dibandingkan pihak satunya dan hal ini dapat dipakai sebagai pemacu pihak lain untuk menata diri. Tanda – (negatif) artinya urusan tersebut memiliki kekurangan yang perlu diatasi dengan menjalin kerja sama.

Dalam analisis ini akan dimunculkan beban dan manfaat kerja sama yang dapat diambil apabila kedua daerah saling melakukan kerja sama.

## 2. Analisis AHP

Analisis AHP mendapatkan input data dari analisis yang sudah dilakukan sebagai proses pemunculan bentuk kerjasama melalui pendekatan beban-manfaat.

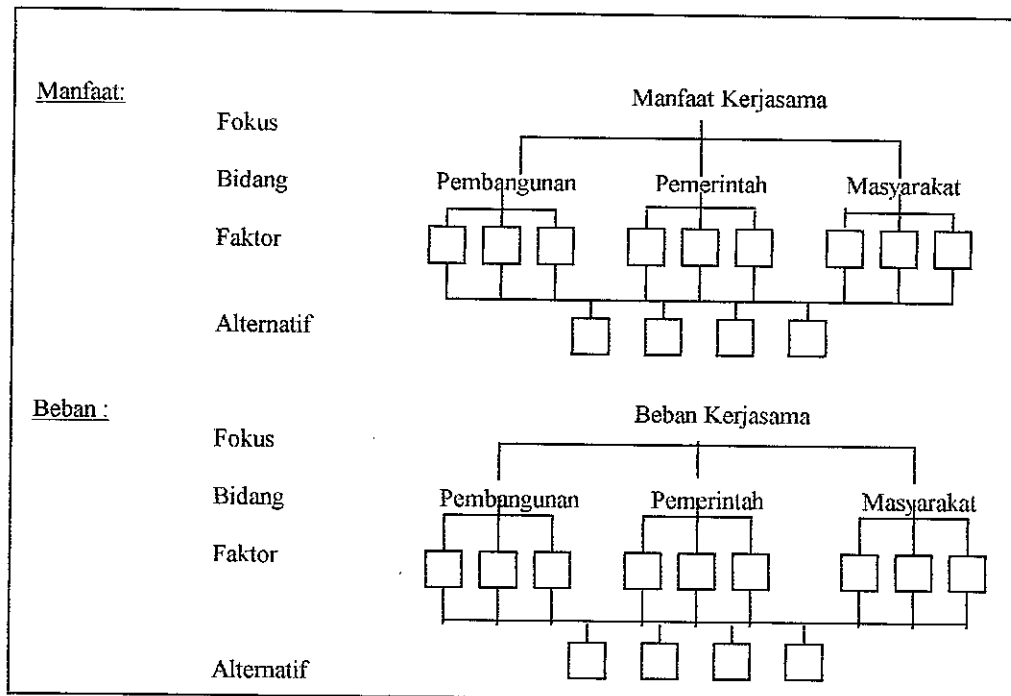
Penggunaan metode PHA yang berbasis komputer (expert choice) dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui persepsi nara sumber terhadap alternatif bentuk kelembagaan pengelolaan kawasan perbatasan yang diturunkan dari perspektif UU No. 22 Tahun 1999. Perspektif nara sumber dalam hal ini di eksplorasi dari pemahaman mereka tentang faktor-faktor perkembangan kawasan perbatasan, khususnya yang berupa faktor pendorong (manfaat) dan faktor penghambat (beban). Kedua faktor ini secara paralel menentukan suatu bobot penilaian, yaitu faktor pendorong menjurus pada bobot manfaat dan faktor penghambat menjurus pada bobot beban. Untuk bisa memberikan penilaian yang bersifat kuantitatif (pembobotan) dari faktor manfaat dan faktor beban. Variabel-variabel manfaat dan beban yang digunakan disusun ke dalam masing-masing hirarki yaitu hierarki manfaat dan hierarki beban.

Pemilihan alternatif bentuk kerja sama antara Kota Semarang dengan Kabupaten Semarang ditetapkan berdasarkan perbandingan antara bobot manfaat dan bobot beban dari setiap alternatif. Perhitungan bobot manfaat dan bobot beban tersebut menggunakan analisis hirarki proses. Penggunaan metode ini didasarkan pada pertimbangan antara lain: kriteria untuk menilai bobot manfaat dan bobot beban dari setiap alternatif cukup banyak baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif; metoda ini mempunyai kemampuan untuk mengkuantitatifkan data kualitatif dan mampu menangkap persepsi dari mereka yang dianggap mengerti tentang persoalan yang sedang dihadapi.

Kerangka analisis manfaat dan beban dari metoda dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. menyusun hirarki manfaat dan beban dari bentuk kerja sama antara Kota Semarang dengan Kabupaten Semarang, terdiri atas: fokus, bidang, faktor, dan alternatif. Penyusunan setiap elemen penilaian dari hirarki tersebut didasarkan kajian teoritik mengenai faktor-faktor manfaat dan beban dari setiap alternatif.
- b. Penilaian persepsi responden terhadap bobot manfaat dan beban dari setiap alternatif menggunakan model pembobotan analisis hirarki proses yang berbasis komputer. Responden ditetapkan berjumlah 10 orang dipilih dari mereka yang mengetahui kondisi objektif Kota Semarang dan Kabupaten Semarang berdasarkan pendidikan, jabatan dan pengalamannya.  
Responden tersebut terdiri atas unsur pemerintah daerah, swasta dan tokoh masyarakat, sebagai berikut:
  1. Unsur pemerintah daerah: Bappeda Kota Semarang dan Kabupaten Semarang, Camat Kepala Wilayah Kecamatan Banyumanik, Gunung Pati, Tembalang, dan Ungaran.
  2. Unsur Tokoh masyarakat: Ketua DPRD Kota Semarang dan Kabupaten Semarang sebanyak dua orang
  3. Unsur Swasta: Gapensi Kota Semarang dan Kabupaten Semarang sebanyak dua orang.
- c. Penentuan alternatif terbaik didasarkan pada perbandingan terbesar antara bobot manfaat dan bobot beban dari masing-masing alternatif.

**TABEL I.3**  
**PERBANDINGAN MANFAAT BEBAN KERJASAMA**



Keterangan :

- ❖ Kotak kosong pada faktor tersebut mendapatkan input dari matrik silang.
- ❖ Sedangkan Kotak pada alternatif tersebut diisi setelah melihat kajian teori.

Untuk memperoleh jawaban atas alternatif yang membandingkan beban-manfaat, maka dipilih nara sumber yang sama dengan proses analisis matrik silang. Pertimbangannya adalah agar terdapat kesinambungan pemahaman antara hasil yang diinginkan di analisis matrik silang yakni berupa faktor-faktor manfaat dan faktor-faktor beban kerjasama. Faktor-faktor ini dengan nara sumber yang sama akan dinilai dengan AHP sehingga dapat keluar hasil berupa pilihan alternatif terbaik untuk bentuk kerja sama pengelolaan pembangunan kawasan perkotaan di perbatasan antara Kota Semarang dengan Kabupaten Semarang.

### 3. Analisis Eksploratif

Melakukan kajian Analisis eksploratif untuk mengetahui struktur organisasi pengelolaan pembangunan kawasan perkotaan diperbatasan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Pada Peraturan Pemerintah tersebut, dinyatakan bahwa:

1. Organisasi perangkat daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan-pertimbangan:
  - a. Kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh daerah
  - b. Karakteristik, potensi dan keuangan daerah
  - c. Kemampuan keuangan daerah
  - d. Ketersediaan sumber daya aparatur daerah
  - e. Pengembangan pola kerjasama antardaerah dan/atau dengan pihak ketiga.
2. Organisasi perangkat daerah dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini
3. Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 menetapkan pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah.

Dari Peraturan Pemerintah ini sebagai dasar untuk menentukan struktur organisasi pengelolaan pembangunan kawasan perkotaan di perbatasan.

#### 1.7 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini terdiri dari enam bab yang masing-masing mempunyai tujuan pembahasan. Pada bab pertama adalah untuk menjelaskan latar belakang tema penelitian, perumusan masalah dan pentingnya penelitian ini. Selain itu pada bab ini juga diuraikan tujuan yang akan dicapai, sasaran, ruang lingkup penelitian

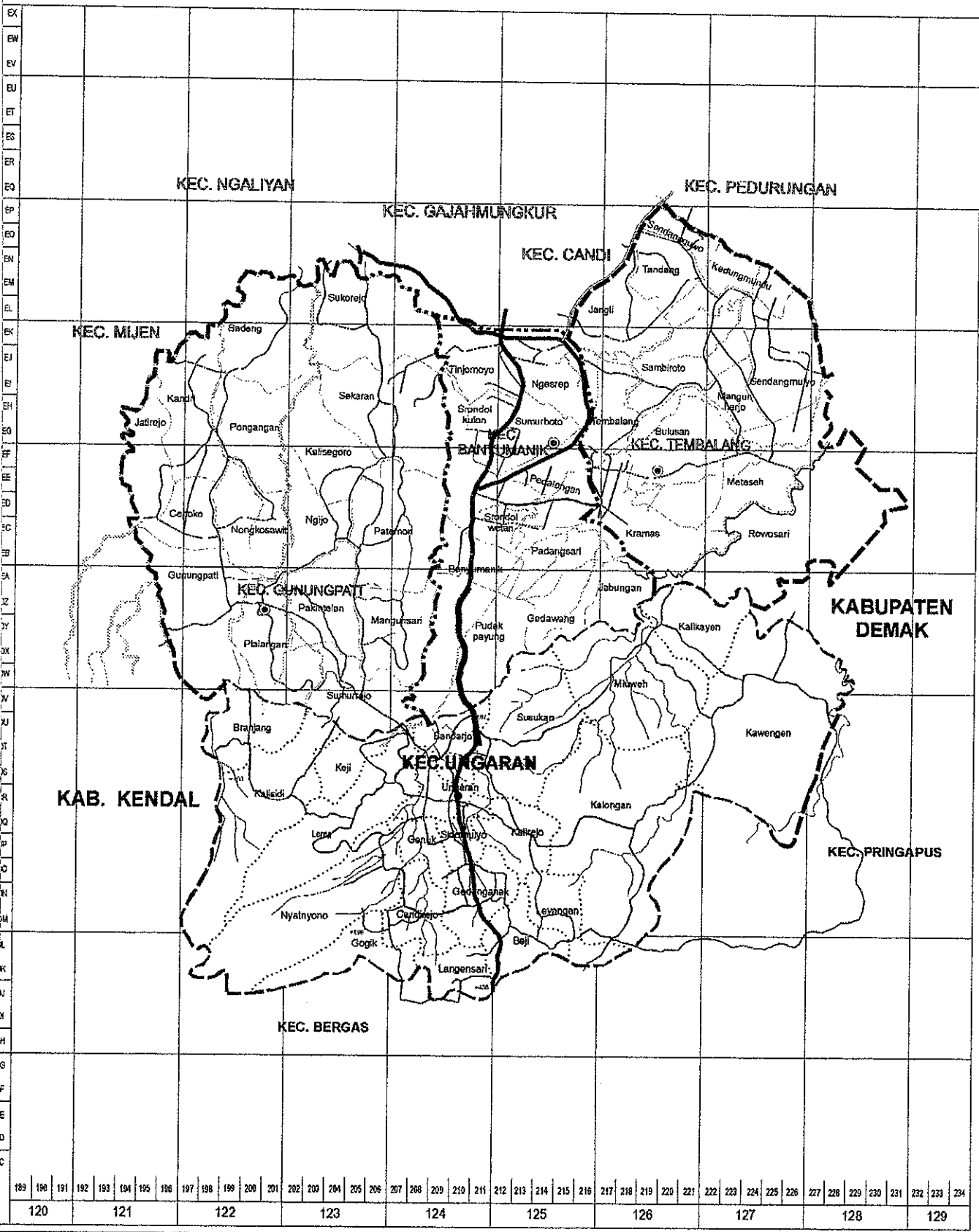
untuk membatasi pembahasan materi dan wilayah studi, kerangka pemikiran dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua mempunyai tujuan untuk menjelaskan hal-hal yang terkait dalam wilayah perbatasan baik berupa pengertian maupun teori yang kaitan. Teori yang akan diuraikan pada bab ini meliputi teori sistem kota, teori struktur ruang, teori perkembangan wilayah dan bentuk-bentuk kerjasama antar daerah otonom.

Pada bab tiga mempunyai tujuan untuk menjelaskan gambaran umum wilayah penelitian yakni Perbatasan Kota Semarang dengan Kabupaten Semarang. Tinjauan umum kawasan perbatasan meliputi aspek fisik dasar, kependudukan, penggunaan lahan dan fasos fasum.

Pembahasan pada bab empat bertujuan untuk menganalisis data-data yang telah diolah menggunakan berbagai alat analisis dan bertujuan untuk mengetahui bentuk oprasional dari struktur pengelolaan kawasan perbatasan.

Pembahasan pada bab penutup bertujuan untuk mengulas bab-bab sebelumnya yang dijadikan sebagai kesimpulan dari pembahasan thesis ini.



MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO

NTIK KERJASAMA PENGELOLAAN PEMBANGUNAN  
KAWASAN PERKOTAAN DI PERBATASAN  
SEMARANG DENGAN KABUPATEN SEMARANG

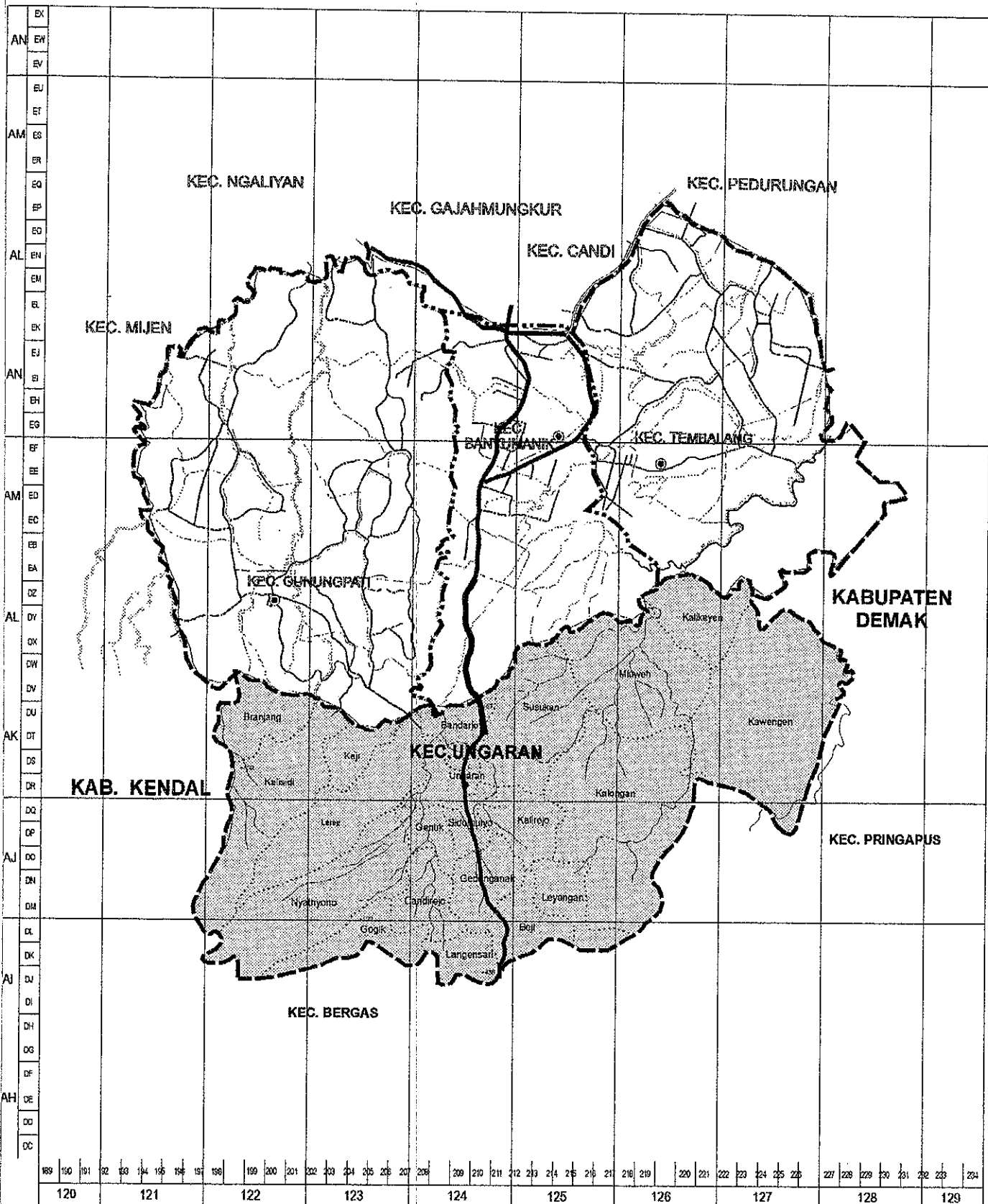
**PETA  
WILAYAH STUDI**


- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Jalan
- Batas Desa
- Rel Kereta Api
- Sungai
- Kota Semarang
- Kabupaten Semarang

**SUMBER**

Peta Topografi Angkasa Darat, US Th. 1994  
Direktori Tata Kota Raa Tara Daerah, Dirjen Cipta Karya DPU

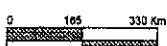

<b>SKALA</b> 1 : 165.000	<b>GAMBAR</b> 1.2

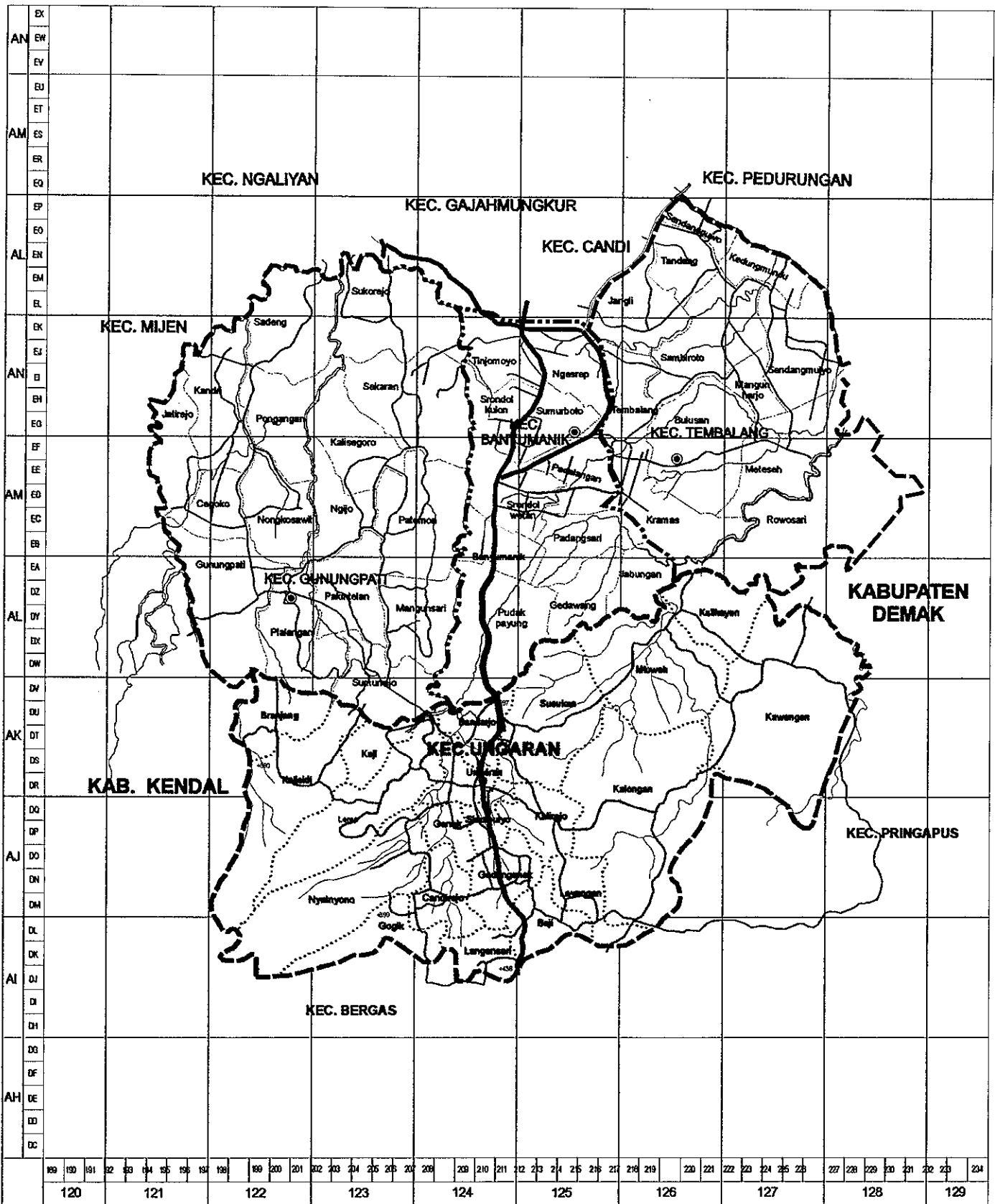



**MAGISTER TEKNIK PEMBAKUAN KOTA**  
**FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO**  
 STUDI BERTUK KEBIJAKAN PENGELOLAAN PEMBANGUNAN  
 KAWASAN PERKOTAAN DI PERUBAHAN  
 ANTARA KOTA SEMARANG DENGAN KABUPATEN SEMARANG

**PETA WILAYAH STUDI**

- |                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Batas Kabupaten | Rel Kereta Api     |
| Batas Kecamatan | Sungai             |
| Jalan           | Kota Semarang      |
| Batas Desa      | Kabupaten Semarang |

SUMBER	
Peta Topografi Angkutan Darat, US TR. 1394 Direktoral Tata Kota dan Tata Daerah, Dinas Cipta Karya DPU	
<b>SKALA</b> 1 : 165.000	<b>GAMBAR</b> 1.2
 0 165 330 Km	



MAKSIKTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO

SENIOR KEMAHIRAN PENGELOMBAK PEMBANGUNAN  
KAWASAN PERKOTAAN DAN PERBARISAN  
ANDRIYATMA SEMANGING DENGAN KABUPATEN SEMANGING

PETA  
WILAYAH STUDI

- |  |                 |  |                    |
|--|-----------------|--|--------------------|
|  | Batas Kabupaten |  | Rel Kereta Api     |
|  | Batas Kecamatan |  | Sungai             |
|  | Jalan           |  | Kota Semarang      |
|  | Batas Desa      |  | Kabupaten Semarang |

SUMBER

Peta Topografi Angkutan Darat, US 171, 1984  
Diskorrek Tata Kota dan Data Daerah, Dirjen Cipta Karya/DPU

SKALA

1 : 165.000

GAMBAR

1.2



## **BAB II**

### **KAJIAN KERUANGAN WILAYAH PERBATASAN**

#### **2.1 Pengertian Wilayah Perbatasan**

Untuk memperjelas yang di maksud dengan wilayah perbatasan pada studi ini maka terlebih dahulu akan diuraikan mengenai pengertian wilayah perbatasan. Pemaparan mengenai pengertian wilayah perbatasan ini penting agar mempermudah pemahaman tentang studi ini.

Pengertian wilayah pada hakekatnya mempunyai kaitan dengan pengertian teritorial. Walaupun belum dibakukan, ada beberapa pengertian terminologi mengenai wilayah, daerah dan kawasan yaitu:

- a. Wilayah: yaitu suatu bagian dari permukaan bumi yang teritorialnya ditentukan atas dasar pengertian, batasan dan perwatakan geografis seperti wilayah aliran sungai, wilayah hutan, wilayah pantai, wilayah negara yang secara geografis ditentukan oleh suatu batasan geografis tertentu.
- b. Daerah: yaitu suatu wilayah yang diartikan sebagai teritorial yang pengertian, batasan serta perwatakannya didasarkan pada wewenang administratif pemerintahan yang ditentukan dengan peraturan perundangan tertentu, seperti kabupaten atau kota.
- c. Kawasan: yaitu suatu wilayah yang teritorialnya didasarkan pada pengertian dan batasan fungsional yang mempunyai perwatakan sendiri seperti kawasan industri, kawasan pusat kota atau pusat perdagangan, kawasan perkantoran, kawasan rekreasi dan kawasan lindung.

Ada beberapa sumber yang dapat menjelaskan pengertian wilayah perbatasan. Menurut Pasal 8 ayat 3 UU Penataan Ruang No. 24 tahun 1992, bahwa penataan ruang untuk kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II, penyusunannya dikoordinasikan oleh Gubernur Kepala daerah Tingkat I untuk kemudian dipadukan ke dalam Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten / Kotamadya daerah Tingkat II yang bersangkutan. Penjelasan dari pasal ini adalah bahwa kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah administrasi Daerah Tingkat II dapat berupa kawasan lindung dan kawasan budidaya seperti wilayah aliran sungai, kawasan resapan air, wilayah perbatasan, kawasan hutan lindung, taman nasional serta kawasan perdesaan, kawasan hutan perkotaan dan kawasan tertentu. Kecuali kawasan tertentu, maka dalam hal kawasan tersebut di atas mencakup dua atau lebih wilayah administrasi Daerah Tingkat II, koordinasi penyusunan Rencana Tata Ruang diselenggarakan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. Yang dimaksud wilayah perbatasan pada kawasan tertentu adalah perbatasan yang ada meliputi daratan, lautan dan udara dengan negara tetangga (UU Penataan Ruang no. 24 tahun 1992).

Menurut Sugijanto Soegijoko (1997), wilayah perbatasan adalah kawasan khusus karena perbatasan dengan wilayah negara tetangga, sehingga penanganan pembangunannya memerlukan kekhususan pula.

Pada Undang-undang No. 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, pada bab 10 pasal 90 point c disebutkan "Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari dua atau lebih Daerah yang berbatasan sebagai satu kesatuan sosial, ekonomi dan fisik perkotaan".

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian wilayah perbatasan adalah kawasan khusus yang berbatasan dengan wilayah tetangga yang meliputi lebih dari satu wilayah administrasi baik kabupaten atau kota maupun propinsi.

Wilayah perbatasan merupakan wilayah khusus yang memerlukan anggaran yang khusus pula. Wilayah perbatasan sebagai bagian integrasi nasional pada umumnya merupakan wilayah yang peka terhadap kemungkinan gangguan ataupun kemungkinan kerjasama. Namun dalam pembahasan nantinya karakteristik wilayah perbatasan yang dimaksud adalah wilayah perbatasan yang memiliki potensi konflik dilihat dari potensi sumber daya yang ada maupun permasalahan lain yang dapat ditimbulkan dan membuka peluang untuk kerjasama.

Kajian tentang wilayah perbatasan akan diawali dengan pengertian mengenai wilayah. Ada dua pandangan yang objektif. Pandangan subjektif mengatakan bahwa daerah sebagai sarana untuk mencapai tujuan hanya suatu idea, suatu model, untuk membantu mempelajari dunia. Sedangkan pandangan objektif memandang daerah sebagai suatu tujuan tersendiri, suatu kebulatan riil, suatu organisme yang dapat diidentifikasi dan dipetakan. (Glasson, 1974 : 17-18).

Dewasa ini pandangan subjektif pada umumnya mempunyai penganut yang luas. Menurut *Hartshorne*, daerah dipandang sebagai alat deskripsi, didefinisikan menurut kriteria tertentu, untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian terdapat banyak daerah sebanyak kriteria yang digunakan untuk mendefinisikannya.

Dari pandangan ini maka konsep daerah dapat dibedakan menjadi dua yaitu Daerah Formal dan Daerah Fungsional (Glasson, 1974 : 19). Daerah Formal adalah geografik yang seragam atau homogen menurut kriteria tertentu. Pada mulanya kriteria yang digunakan adalah bersifat fisik (topografi, iklim, atau vegetasi) tetapi kemudian mulai di gunakan kriteria yang bersifat ekonomi (tipe industri atau tipe pertanian), kriteria sosial dan politik. Daerah alamiah adalah daerah formal fisik. Perhatian kepada bentuk ini untuk sebagian timbul karena kenyataan bahwa faktor-faktor fisik adalah lebih stabil dari pada

faktor-faktor ekonomis yang dinamis sehingga lebih mudah dipelajari. Daerah Fungsional adalah daerah geografi yang memperlihatkan suatu koherensi fungsional tertentu, suatu interdependensi dari bagian-bagian apabila didefinisikan berdasarkan kriteria tertentu. Kadang daerah ini dinamakan daerah nodal atau polarised region dan terdiri dari satuan-satuan yang heterogen seperti kota dan desa yang secara fungsional berkaitan. Hubungan-hubungan fungsional biasanya terlihat menggunakan kriteria sosio-ekonomi. Ebenezer Howard adalah salah seorang dari perintis awal konsep tentang daerah nodal. Ia berpendapat bahwa pemecahan atas persoalan daerah perkotaan besar seperti London terletak dalam pengembangan kelompok kota-kota baru yang dikaitkan dengan kota sentral dalam suatu hubungan fungsional. Patrick Geddes juga menekankan interdependensi dan saling hubungan faktor-faktor disuatu daerah dengan menggunakan diagramnya yang terkenal "*place-work-folk*" diagram. Christaller dan Losch menggunakan suatu pendekatan induktif dengan dipusatkan pada hubungan-hubungan hirarki antara pusat-pusat di dalam daerah fungsional.

Kombinasi dari dua daerah ini memberikan suatu kerangka yang bermanfaat bagi klasifikasi regional tipe ketiga yaitu Daerah Perencanaan. Boudeville mendefinisikan dengan perencanaan atau programming region sebagai daerah yang memperlihatkan koherensi atau kesatuan keputusan-keputusan ekonomi. Keeble memandang daerah perencanaan sebagai suatu daerah yang cukup besar untuk memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan persebaran penduduk dan kesempatan kerja yang penting di dalam lingkungan perbatasannya, namun cukup kecil untuk memungkinkan terjadinya persoalan-persoalan perencanaannya dapat dipandang sebagai suatu kebulatan. Klassen percaya bahwa daerah perencanaan antara lain haruslah cukup besar untuk mengambil keputusan-keputusan investasi berskala ekonomi, harus mampu mensuplai industrinya sendiri dengan

tenaga kerja yang diperlukan, harus mempunyai suatu struktur ekonomi yang homogen, mempunyai sekurang-kurangnya satu titik pertumbuhan dan menggunakan suatu cara pendekatan dengan mempunyai kesadaran bersama terhadap persoalan-persoalannya. Dari uraian ini menunjukkan bahwa daerah perencanaan adalah daerah geografik yang cocok untuk perancangan dan pelaksanaan rencana-rencana pembangunan guna memecahkan persoalan-persoalan seperti kemerosotan ekonomi, pengangguran, persoalan migrasi dan arus ekonomi.

## **2.2 Teori Pertumbuhan dan Perkembangan kawasan perkotaan di perbatasan**

Ternyata dalam usaha merumuskan pengertian kota para ahli mempunyai macam-macam pendapat dan alasan tertentu. Mayer melihat kota sebagai tempat bermukim penduduknya, baginya yang penting dengan sendirinya bukan rumah tinggal, jalan raya, rumah ibadat, kantor, taman, kanal dan sebagainya, melainkan penghuni yang menciptakan segalanya itu. Mumford melihat kota sebagai suatu tempat pertemuan yang berkiblat keluar. Sebelum kota menjadi tempat tinggal tetap, orang-orangnya berulang-alik dari pedesaan untuk berjumpa secara teratur. Di situ kota seperti magnet yang semakin kuat tarikannya baik bagi perekonomian maupun keagamaan. Max Weber memandang suatu tempat itu kota, jika penghuninya sebagian besar telah mampu memenuhi kebutuhannya lewat pasar setempat. Adapun barang-barangnya dibuat setempat pula ditambah yang dari pedesaan, sehubungan dengan itu ciri khas kota adalah pasarnya. Christaller dengan "*Central place theory*"-nya menunjukkan fungsi kota sebagai penyelenggaraan dan penyediaan jasa-jasa bagi sekitarnya. Jadi kota pertama-tama bukan tempat permukiman, melainkan pusat pelayanan (N.Daldjoeni, 1996; 37)

Pengertian kota menurut Dirjen Cipta Karya Departemen PU adalah tempat permukiman yang berpenduduk relatif besar dengan luas areal terbatas dan pada umumnya

bersifat non-agraris, kepadatan penduduk relatif tinggi; tempat sekelompok orang-orang dalam jumlah tertentu dan bertempat tinggal bersama dalam suatu wilayah geografis tertentu, cenderung berpola hubungan rasional, ekonomis dan individualis (DPU, 1997:52).

Pada hakekatnya para ahli mengemukakan bahwa pada umumnya jenis kejadian, perkembangan dan pertumbuhan kota-kota di Indonesia dimulai dari suatu desa yang telah ada kemudian karena pengaruh dari luar atau karena fungsinya yang berkembang akibat pengaruh, kemudian tumbuh dan berkembang sebagai suatu pusat konsentrasi penduduk terbesar yang kemudian dikatakan suatu kota. Ada tiga faktor yang menyebabkan berkembangnya suatu kota yaitu : karena fungsinya sebagai pusat pemerintahan, sebagai pusat perdagangan dan sebagai pusat lalu lintas dan angkutan.

Faktor-faktor perkembangan dan pertumbuhan yang bekerja pada suatu kota dapat mengembangkan dan menumbuhkan kota pada arah tertentu. Ada tiga faktor utama yang sangat menentukan pola perkembangan dan pertumbuhan kota yaitu: faktor manusia, faktor kegiatan manusia dan faktor pola pergerakan antara pusat kegiatan manusia yang satu dengan pusat kegiatan manusia yang lainnya. Ketiga faktor ini akan termanifestasikan dalam perubahan dan tuntutan kebutuhan ruang.

Tuntutan kebutuhan ruang ini akan tercermin kepada perkembangan dan perubahan tata guna tanah kota yang mana kemudian faktor persyaratan fisik akan sangat menentukan perkembangan dan pertumbuhan kota itu selanjutnya. Secara terperinci dapat diterangkan bahwa faktor manusia akan menyangkut segi-segi perkembangan penduduk kota baik karena kelahiran maupun karena migrasi ke kota (perkembangan tenaga kerja, kemampuan teknologi dan perbaikan status sosial). Faktor kegiatan manusia menyangkut segi-segi kegiatan kerja, kegiatan fungsional, kegiatan perekonomian kota dan kegiatan hubungan regional yang lebih luas, sedangkan faktor pergerakan adalah sebagai akibat dari

perkembangan yang disebabkan oleh kedua faktor perkembangan penduduk yang disertai dengan perkembangan fungsi kegiatannya akan menuntut pola perhubungan antara pusat kegiatan tersebut. Dinamika perkembangan dan pertumbuhan kota dapat menyebabkan kecenderungan kota berkembang kearah yang positif maupun kearah negatif.

Jadi urutan tahapan jenis perkembangan dan pertumbuhan kota di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Jenis perkembangan dan pertumbuhan yang dimulai dari suatu desa yang berubah menjadi kota.
2. Jenis perkembangan kota yang dimulai dari suatu kota kecil yang fungsi dan peranannya mengalami peningkatan.
3. Perkembangan dan pertumbuhan kota secara intensif dengan tanpa mengalami perubahan wilayah kota.
4. Perkembangan dan pertumbuhan kota secara ekstensif yaitu perkembangan yang menyebabkan perubahan wilayah kota.
5. Perkembangan yang mengikuti cara yang dikemukakan pada poin 3 dan 4 secara bersamaan.
6. Jenis kota yang terjadi, berkembang dan tumbuh dari suatu kota yang baru.

Membesarnya fungsi dan peranan kota menimbulkan perkembangan didalam hubungan antar kota yang satu dengan kota lainnya serta hubungan antar suatu kota yang satu dengan daerah sekitar. Sifat saling ketergantungan antar kota yang satu dengan kota lainnya atau antara satu kota dengan daerah sekitarnya semakin berkembang. Kemajuan teknologi pergerakan pun semakin meluas. Dengan demikian faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan dan pertumbuhan kota masa kini tidak hanya terbatas kepada dinamika kota itu sendiri tetapi juga oleh perubahan serta dinamika jangkauan wilayah

yang lebih luas. Jadi faktor eksternal semakin penting peranannya dalam proses perkembangan dan pertumbuhan suatu kota.

### 2.3 Teori Perkembangan Wilayah

Dinamika suatu daerah dipengaruhi oleh aktivitas-aktivitas yang terjadi di dalamnya. Menurut sudut pandang ini. Di suatu daerah akan terdapat beragam aktivitas, yang masing-masing aktivitas ini tidak akan berdiri sendiri untuk mendukung eksistensinya. Dalam kaitannya dengan kondisi ini masing-masing aktivitas memerlukan suatu linkage dengan aktivitas lainnya dalam keterhubungan yang diharapkan akan saling mendukung. Dari hubungan antar aktivitas ini akan diketahui bagaimana suatu daerah berkembang dan mencapai sifat-sifat yang berbeda, bagaimana suatu daerah berhubungan dengan daerah lainnya dan sifat dari pola tata ruang berbagai aktivitas termasuk masalah-masalah yang mengikutinya dan akan berkembang di daerah.

Berkenaan dengan hal ini, hubungan antar berbagai aktivitas dibedakan menjadi (Hoover, 1997: 12-22) :

#### 1. Hubungan Vertikal

Hubungan yang bersifat vertikal merupakan penarikan aktivitas secara mutual attraction (timbal balik). Apabila output satu aktivitas di suatu daerah merupakan input untuk aktivitas lainnya, maka biaya pengangkutan (transfercost) akan berkurang dengan saling berdekatnya dua buah aktivitas, dan kehadiran aktivitas-aktivitas ini di suatu daerah akan menambah daya tarik daerah tersebut sebagai lokasi bagi aktivitas lainnya. Hubungan vertikal terdiri dari hubungan yang mengarah ke muka (forward) dan hubungan yang mengarah ke belakang (backward).

Backward linkage adalah rangkaian aktivitas yang mengarah ke belakang, oleh karena aktivitas tersebut langsung melibatkan satu akibat kepada satu aktivitas lainnya

jauh ke belakang, yaitu dalam suatu urutan operasi yang merubah input utama seperti sumber-sumber alam dan buruh menjadi barang-barang konsumsi akhir. Sedangkan forward linkage berarti suatu dorongan perubah yang dengan kuat dipindahkan kepada aktivitas lainnya jauh ke muka dalam suatu urutan operasi. Aktivitas yang dipengaruhi oleh suatu rangkaian aktivitas yang mengarah ke muka harus input oriented. Sekelompok rangkaian aktivitas yang mengarah ke muka meliputi aktivitas-aktivitas yang menggunakan produk sampingan dari aktivitas lainnya pada daerah yang sama.

## 2. Hubungan Horisontal

Berbeda dengan penarikan secara timbal balik yang terdapat pada hubungan vertikal, maka efek lokasi dari hubungan horisontal merupakan penolakan aktivitas timbal balik. Hal ini dapat terjadi pada aktivitas-aktivitas yang berada pada lokasi dengan sumber daya yang langka. Kehadiran aktivitas baru yang mempergunakan sumber-sumber yang diperlukan oleh aktivitas lainnya.

## 3. Hubungan Komplementer

Hubungan komplementer akan menghasilkan efek lokasi yang merupakan penarikan aktivitas secara timbal balik (mutual attraction) jika penambahan satu aktivitas di dalam sebuah daerah merangsang pertumbuhan dari aktivitas yang komplementer atau saling melengkapi. Hubungan komplementer dibedakan menjadi :

- a. Hubungan komplementer melalui pemasaran barang-barang komplementer atau barang-barang setaraf (*comparison product*)
- b. Hubungan komplementer melalui penggunaan inpu-output yang diproduksi secara kebersamaan (*Jointly produced inputs*)

Dilihat dari faktor pemicu perkembangannya ada dua macam perkembangan wilayah yaitu :

### 1. Perkembangan dari Dalam

Menurut Teori Sektor yang dikemukakan oleh Clark dan Fisher disebutkan bahwa kenaikan pendapatan per kapita berbagai wilayah pada berbagai waktu pada umumnya dibarengi oleh realokasi sumber daya, dengan proporsi, dengan penurunan proporsi angkatan kerja dalam kegiatan-kegiatan primer (pertanian), dan kenaikan proporsi dalam kegiatan-kegiatan sekunder (manufakturing) dan kemudian disusul dengan kenaikan proporsi dalam kegiatan-kegiatan tersier (saja). (Glasson, diterjemahkan oleh Sitohang : 87).

### 2. Perkembangan dari Luar

Di dalam Teori Basis Ekspor (*export base theory*) dikemukakan bahwa pertumbuhan suatu wilayah ditentukan oleh eksploitasi pemanfaatan-pemanfaatan alamiah dan pertumbuhan basis ekspor wilayah yang bersangkutan yang selanjutnya dipengaruhi oleh tingkat permintaan ekstern dari wilayah-wilayah dan negeri-negeri lain. pendapatan yang diperoleh dari penjualan ekspor akan mengakibatkan berkembangnya kegiatan-kegiatan penduduk setempat, perpindahan modal dan tenaga kerja, keuntungan-keuntungan eksternal dan perkembangan wilayah lebih lanjut. Teori ini memandang tingkat permintaan luar terhadap produk dari industri-industri ekspor sesuatu wilayah sebagai penentu bagi perkembangan regional.

Metode lain yang memasukan faktor-faktor dari luar ke dalam perkembangan wilayah adalah model-model alokasi sumber daya inter regional yang dikemukakan oleh Ohlin. Dalam model ini diasumsikan bahwa faktor-faktor produksi, terutama tenaga kerja dan modal, akan mengalir keluar dari wilayah yang imbalannya rendah ke wilayah yang imbalannya tinggi. Jadi, jika suatu wilayah lebih rendah dari pada di semua wilayah lainnya, maka ada kemungkinan terjadinya arus keluar ke wilayah-

wilayah lain atau ' arus masuk modal yang hendak memanfaatkan rendahnya biaya tenaga kerja' tersebut, atau bisa juga merupakan kombinasi dari dua kemungkinan tersebut (Glasson diterjrmahkan oleh Sitohang, 1977 : 91). Faktor lainnya yang tidak kalah menentukan dalam perkembangan suatu wilayah adalah faktor kebijaksanaan. Kebijakan ini meliputi kebijaksanaan ini meliputi kebijaksanaan ekonomi, kebijaksanaan sosial dan budaya serta kebijaksanaan pengembangan wilayah lainnya.

#### **2.4 Kerja Sama Antar Daerah**

Faktor pendorong tumbuhnya kerja sama antar daerah otonom adalah perbedaan dan kesamaan dalam kepentingan dan pandangan antar daerah otonom. Hubungan antar daerah otonom ini dilihat sebagai hubungan kerja sama, yang telah mencerminkan hubungan saling ketergantungan dan persahabatan. Dalam hubungan saling ketergantungan masing-masing daerah otonom berada pada posisi yang sejajar. Sedangkan dalam hubungan ketergantungan, daerah otonom tertentu dalam posisi menentukan dan daerah otonom lain dalam posisi ditentukan (Eddy Mulyadi, 1993).

Perbedaan antar daerah otonom dapat dilihat pada perbedaan dalam kondisi-kondisi alam fisik maupun sosial budaya. Karakteristik suatu daerah otonom terutama ditentukan oleh interaksi antar sumber daya manusia dan sumber daya alam yang terwujud dalam berbagai aktivitas dalam ruang seperti aktivitas pertanian, industri, pertambangan dan usaha pariwisata.

Kesamaan kepentingan dan pandangan dapat dilihat dari kesesuaian antar daerah otonom yang menyangkut berbagai kebutuhan dan kehidupan masyarakat. Dengan demikian, kerja sama antar daerah otonom berkembang pada daerah-daerah otonom yang memiliki kepentingan dan pandangan yang sama dalam bidang-bidang pemanfaatan

sumber daya alam tertentu, kependudukan dan sumber daya manusia, penanggulangan masalah lingkungan dan pengembangan budaya.

Dengan adanya otonomi daerah, kerja sama dan penyelesaian perselisihan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 pada Bab IX, yaitu bahwa beberapa daerah dapat mengadakan kerja sama antar daerah yang diatur dengan keputusan bersama. Selain itu daerah juga dapat menjalin kerja sama yang saling menguntungkan dengan lembaga atau badan di luar negeri.

Di Indonesia hubungan kerja sama antar daerah otonom terutama tampak dalam bidang-bidang perhubungan, perdagangan dan sosial budaya. Banyak dari hubungan kerja sama itu merupakan suatu yang alamiah dan fungsional, yang berimpit dengan kehidupan masyarakat, bahkan sejalan dengan pertumbuhan masyarakat daerah otonom dan dengan kegiatan pembangunan. Dari segi kepentingan pembangunan, kerja sama antar daerah otonom diharapkan dapat turut menunjang hasil-hasil pembangunan. Disamping itu terdapat pula kerja sama antar daerah otonom yang bersifat temporer dan formal, dimana kesepakatan-kesepakatan kerja sama setiap saat dapat dilakukan atau diperbaharui. Secara fungsional kerja sama berlangsung antar daerah otonom yang berbeda-beda, yang berdekatan dan berbatasan. Dari ciri-ciri hasil produksi, adanya produksi yang berbeda-beda antar daerah otonom menyebabkan ramainya perdagangan. Perbedaan produksi antar daerah otonom itu dapat dilihat baik pada lingkup luas maupun lingkup yang lebih kecil.

Kemudian dalam bidang sosial budaya kerjasama antar daerah dapat berlangsung karena adanya kepentingan-kepentingan dan pandangan yang sama, dan keinginan untuk saling membantu sesuai dengan kelebihan dan pengalaman-pengalaman masing-masing. Kerja sama tersebut dapat berlangsung dalam bidang sosial budaya yang penting, seperti pendidikan, kependudukan, kesehatan, dan kesenian.

Dalam hubungannya dengan wilayah perbatasan, karakteristik pengaruh wilayah perbatasan terhadap kehidupan masyarakat adalah:

- ❖ Wilayah perbatasan dapat memberikan kejelasan mengenai keanggotaan masyarakat, baik dalam lingkup wilayah pemerintahan maupun dalam lingkup wilayah pengamatan tertentu. Atau wilayah perbatasan menempatkan suatu masyarakat dalam posisi tertentu secara geografi maupun sosial.
- ❖ Wilayah perbatasan dapat memisahkan dua atau lebih masyarakat yang berada dalam wilayah-wilayah tertentu.
- ❖ Wilayah perbatasan dapat membagi suatu masyarakat yang sama ke dalam dua atau lebih masyarakat wilayah.
- ❖ Pada gilirannya wilayah perbatasan dapat membuat suatu masyarakat berada pada kondisi yang berbeda dalam cara hidup, tingkat kesejahteraan, orientasi budaya, politik dan corak kehidupan umumnya dari masyarakat di wilayah lain.

Dalam kerja sama antar daerah otonom dapat ditemukan pula berbagai masalah atau kendala yang dapat menghambat hubungan kerja sama tersebut. Beberapa dari masalah itu merupakan masalah yang sederhana dan bersifat teknis semata, namun beberapa lainnya dapat merupakan masalah yang rumit dan menyangkut prinsip dan hukum. Demikian misalnya, masalah atau kendala yang bersifat teknis antara lain seperti yang ditunjukkan oleh kendala perhubungan, sedangkan yang rumit antara lain seperti yang ditunjukkan oleh perselisihan antara daerah otonom menyangkut batas-batas atau lingkup wilayah administrasi. Dengan melihat kompleksitasnya secara lebih rinci, masalah-masalah dalam hubungan kerja sama antar daerah otonom dapat digolongkan sebagai berikut:

- ❖ Masalah yang menyangkut posisi geografis

Dalam hal ini kerjasama antar daerah otonom dapat terhambat oleh suatu kendala atau keadaan dimana daerah-daerah otonom itu secara fisik geografis saling berjauhan atau terpisahkan oleh suatu unit geografis tertentu.

❖ Masalah sarana perhubungan

Kurang atau sulitnya sarana perhubungan secara langsung sering merupakan penghambat bagi lalu lintas barang dan manusia dan sekaligus bagi kerja sama antar daerah otonom.

❖ Masalah yang menyangkut batas wilayah administrasi atau hukum teritorial.

Termasuk dalam masalah ini adalah masalah pengelolaan bersama daerah perbatasan dan adanya bagian-bagian daerah tertentu yang diperselisihkan.

❖ Masalah Status kependudukan dan pembinaan wilayah

Terutama bagi daerah-daerah otonom yang saling berbatasan secara langsung dapat ditemukan penduduk atau warga yang berstatus kependudukan tidak jelas karena adanya perbedaan dalam hal tempat tinggal dan tempat kerja, sehingga menyulitkan dalam pembinaannya.

## 2.5 Bentuk Kerja Sama Antardaerah Otonom

Kerja sama antar daerah otonom yang pada intinya menunjukkan adanya usaha bersama yang dilakukan oleh dua daerah atau lebih, dapat mengambil berbagai bentuk. Kerja sama antar daerah otonom dapat dilakukan oleh dua daerah saja atau tiga daerah atau lebih, dapat pula dilakukan oleh sesama daerah kabupaten/kota, atau sesama daerah kabupaten/kota dalam satu propinsi atau oleh sesama daerah kabupaten/kota yang tidak dalam satu propinsi. Dalam tujuan mengurangi konflik antar daerah otonom mengenai wilayah perbatasan, maka perlu adanya jaringan komunikasi legislatif.

## 2.5.1 Contoh Berbagai Bentuk Kerja Sama Antar Daerah

### 1. Kerja sama Bilateral

- a. Kerja sama Antara Daerah Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung dalam penanggulangan masalah sampah.

Seperti diketahui Kota Bandung merupakan kawasan pemusatan penduduk, dengan segala macam akibat-akibatnya. Salah satu akibat ialah menumpuknya sampah baik dari pasar, terminal, pabrik, perusahaan, toko maupun pekarangan atau perumahan. Apabila masalah sampah ini tidak dapat diatasi dengan sebaik-baiknya, dengan menyingkirkannya ke tempat yang jauh dari pemukiman penduduk, maka akan dikhawatirkan akan mengganggu kesehatan lingkungan pemukiman. Sesuai dengan sifat perkotaan dengan penduduk yang padat, maka dirasa tidak mungkin lagi menyingkirkan sampah ke tempat yang jauh dari pemukiman tetapi masih dalam wilayah Kota. Oleh karena itu diperlukan kerja sama antara Daerah Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung untuk kepentingan Daerah masing-masing, dalam mewujudkan suatu susunan lingkungan yang bersih dan sehat sehingga mampu mendorong timbulnya gairah masyarakat untuk beraktifitas dalam berbagai segi kehidupan. Walaupun dasar/obyek kerja sama yang diajukan sebagai ilustrasi di sini hanya masalah sampah, namun harus didasari bahwa kesulitan-kesulitan yang dihadapi, terutama oleh Kota Bandung, jika masalah ini tidak dipecahkan dengan baik akan jauh lebih luas dampaknya. Dapat dibayangkan bagaimana suasana umum yang akan terasa di suatu kota yang padat seperti Bandung, jika masalah sampah ini tidak terpecahkan. Produksi sampah yang sudah pasti akan meningkat dari waktu ke waktu jelas secara langsung mengancam ketentraman lingkungan, polusi air dan udara yang mengancam kesehatan masyarakat serta rusaknya pemandangan kota sehingga tidak mendorong gairah dan dinamika

masyarakatnya. Melalui kerja sama yang baik dengan Kabupaten Bandung masalah ini akan dapat ditanggulangi bersama. Pertanyaan yang timbul adalah, keuntungan apa yang dapat diharapkan oleh Kabupaten Bandung melalui kerja sama yang semacam ini? Apakah Kabupaten Bandung hanya akan berfungsi sebagai tempat pembuangan “sampah” belaka dari Kota Bandung? Untuk menjawab pertanyaan ini perlu dilakukan studi tentang kompensasi apa yang pantas diterima oleh Kabupaten Bandung melalui kerja sama ini. Misalnya dengan melihat kemungkinan bagi didirikannya pabrik pupuk untuk petani yang bahan dasarnya dari sampah, atau pabrik bio-gas yang bahan dasarnya dari sampah. Biaya pembangunan pabrik tersebut dapat dipikul bersama. Implikasi dari kerja sama yang semacam ini jelas mencakup peningkatan produksi, perluasan lingkungan kerja serta keterlibatan teknologi modern.

- b. Kerja sama Antar Kota Ujung Pandang dengan Kabupaten Gowa dalam hal pengendalian banjir Sungai Jeneberang.

Kedua daerah ini berada di Propinsi Sulawesi Selatan. Sungai Jeneberang yang mengalir dari Gunung Bawakaraeng dan Lompo Buttang di Kabupaten Gowa bermuara di pantai Selatan wilayah Kota Ujung Pandang. Pada musim penghujan, sungai ini selalu meluap dan praktis merupakan penyebab utama terjadinya banjir di bagian selatan Kota Ujung Pandang serta sebagian besar wilayah kota Sungguminasa, Ibukota Kabupaten Gowa. Jarak antara kedua kota ini hanya 7 kilometer. Untuk pengendalian banjir, maka kedua daerah ini dapat memikirkan berbagai kemungkinan, misalnya dengan pembuatan tanggul secara bersama sepanjang garis rawan yang terancam banjir, atau melakukan pengerukan lumpur dan pasir yang semakin mendangkalan sungai tersebut dari tahun ke tahun.

- c. Kerja sama Antar Kota Ujung Pandang dengan Kabupaten Maros di dalam usaha penyediaan air minum (Proyek PAM).

Kedua daerah ini yang berada di Propinsi Sulawesi selatan. Seperti diketahui, kebutuhan akan air bersih merupakan salah satu permasalahan pokok di dalam usaha pembinaan kesehatan masyarakat. Di wilayah Kabupaten Maros terdapat Sungai dan air terjun Bantimurung yang tidak pernah kering sepanjang tahun. Sungai ini mengalir sampai keperbatasan kota Ujung Pandang, dan bermuara di pantai utara. Potensi air ini dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan Proyek Air Bersih di kedua daerah tersebut. Bahkan untuk pengembangan lebih lanjut dapat digarap Proyek Listrik Tenaga air yang dapat memenuhi kebutuhan kedua daerah tersebut.

Contoh-contoh tersebut di atas merupakan kerja sama antara dua daerah otonom dalam satu lingkungan propinsi. Kerja sama tersebut dapat saja dilakukan oleh dua daerah otonom yang tidak berada dalam satu propinsi, misalnya saja antara *Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Brebes, Propinsi Jawa tengah*, dalam rangka penanggulangan banjir, atau dapat saja kerja sama antar daerah *Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat dengan Kotamadya Ujung Pandang, Propinsi Sulawesi Selatan* dalam rangka pembinaan perkotaan atau dalam penyusunan rencana kota.

Contoh-contoh ini masih dapat diperbanyak dengan Kerja sama antar daerah dalam pengembangan wilayah Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi) yang dilakukan oleh Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Propinsi Jawa Barat.

## **2. Kerja Sama Multilateral.**

Kerja sama antar daerah yang dilakukan oleh tiga daerah atau lebih untuk mengatur secara bersama-sama kepentingan daerah-daerah yang bersangkutan dapat

disebut kerja sama multilateral. Daerah-daerah yang melakukan kerja sama dapat berada dalam satu wilayah Propinsi, atau terdiri atas beberapa wilayah Propinsi.

Dalam kerangka kerja sama multilateral ini dapat terlibat beberapa bidang kegiatan yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain, namun masing-masing membawakan fungsi dan peranan yang seimbang untuk mewujudkan suatu tujuan bersama. Sebagai ilustrasi, contoh-contoh dibawah ini disajikan untuk menjadi dasar pengkajian lebih lanjut.

a. Kerja sama multilateral yang berkenaan dengan Daerah Aliran Sungai (DAS).

Daerah aliran sungai seperti misalnya Cimanuk (DAS Cimanuk) meliputi kabupaten-kecamatan Garut, Sumedang, Majalengka, Cirebon dan Indramayu, kesemuanya terletak di wilayah Propinsi Jawa Barat. Daerah Aliran Sungai ini harus diamankan agar tidak mengancam kehidupan rakyat dan mendatangkan kerugian-kerugian. Bagian Hulu yang berada di Garut harus dihindarkan agar tidak mendatangkan erosi dan banjir. Bagian yang dilalui yaitu Kabupaten Sumedang, Majalengka dan Cirebon juga harus dipelihara dari kerusakan-kerusakan dan kikisan-kikisan air. Demikian pula bagian hilir yang terletak di Kabupaten Cirebon harus diamankan dari ancaman bahaya banjir. Ini semuanya hanya mungkin dicapai apabila dilakukan secara bersama dengan mengadakan kerja sama antara daerah diantara daerah-daerah yang bersangkutan.

b. Kerja sama multilateral dalam pengembangan wilayah.

Pengembangan suatu wilayah dapat mencakup beberapa wilayah Kabupaten, misalnya pengembangan wilayah "Gerbangkertosusilo" meliputi Kabupaten Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan. Kesemua Kabupaten tersebut berada di wilayah Propinsi Jawa Timur. Daerah-daerah tersebut dapat melakukan kerja sama antar daerah untuk mengembangkan wilayahnya masing-masing dengan membentuk

suatu badan atau otoritas, dengan tugas-pokok menyusun perencanaan dan pengendalian pengembangan wilayah. Dengan kerja sama antar daerah yang demikian ini diharapkan dapat dicapai pengembangan wilayah yang serasi, komplementatif antara yang satu dengan yang lain. Kerja sama multilateral dalam bidang pengembangan wilayah ini juga dapat diterapkan terhadap Kabupaten Gowa, Maros, dan Kota Ujung Pandang di Propinsi Sulawesi selatan. Seperti diketahui ketiga daerah ini saling berdempet pada jarak yang relatif dekat, dan dihubungkan oleh jalur jalan raya ke utara (Maros) dan ke selatan (Gowa). Kedua Kabupaten ini merupakan wilayah periferial dari Kotamadya Ujung Pandang yang berfungsi sebagai pintu masuk/keluar sehingga jika tidak dikembangkan secara bersama akan sulit menyesuaikan diri dengan laju perkembangan Kota Ujung Pandang.

Demikianlah beberapa gambaran kerja sama antara daerah yang mungkin dapat dilakukan dalam rangka pembinaan wilayah untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

### **2.5.2 Bentuk Kerja Sama Pengelolaan Pembangunan Kawasan Perkotaan**

Setelah obyek yang akan dikerja samakan itu jelas, maka daerah-daerah otonom yang bekerjasama dapat memilih suatu bentuk aliansi yang tepat dengan asumsi bahwa daerah otonom sebagai suatu perusahaan yang mengelola sumber daya alam di wilayah perbatasan. Penyebab dasar terbentuknya aliansi (kerja sama) adalah adanya kesesuaian strategik. Kesesuaian strategik mempunyai arti bahwa kemampuan utama dari kedua mitra saling melengkapi. Sedangkan untuk mempertahankan aliansi, harus dilakukan adaptasi budaya, yang akan membentuk aliansi yang terbaik.

Kesesuaian budaya lebih sulit untuk didefinisikan dibandingkan dengan kesesuaian strategik. Setiap pihak memiliki kepekaan budaya yang cukup tanggap dan

luwes untuk dapat bekerja sama secara efektif dan mau belajar dari perbedaan budaya lainnya. Para pihak yang bekerjasama diseimbangkan oleh kesamaan ukuran kekuatan dan kesadaran akan kebutuhan. Oleh karenanya, tidak ada yang saling mendominasi satu sama lain.

Adapun yang dicari oleh mitra aliansi, harus disertai aset perlengkapan yaitu menyediakan sumberdaya dan kemampuan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan aliansi. Kebutuhan-kebutuhan pelengkap ini dapat muncul dalam berbagai bentuk situasi seperti tabel di bawah ini :

**TABEL II.1**  
**ASET PELENGKAP YANG HARUS DIMILIKI**  
**OLEH MITRA ALIANSI**

No.	Kebutuhan	Sit u a s i
1	Kebutuhan hukum	Ditimbulkan oleh persyaratan hukum.
2	Resiproksitas	Aset kedua mitra memiliki kekuatan resiproksitas yaitu adanya sinergi dimana aliansi mampu membentuk kekuatan yang lebih besar daripada jika mereka berdiri sendiri.
3	Efisiensi	Bertujuan menurunkan biaya yang mencakup skala, jangkauan usaha, transaksi dan lain-lain
4	Reputasi	Untuk menciptakan sebuah badan usaha yang lebih prestisius dengan profil dan reputasi yang lebih baik.

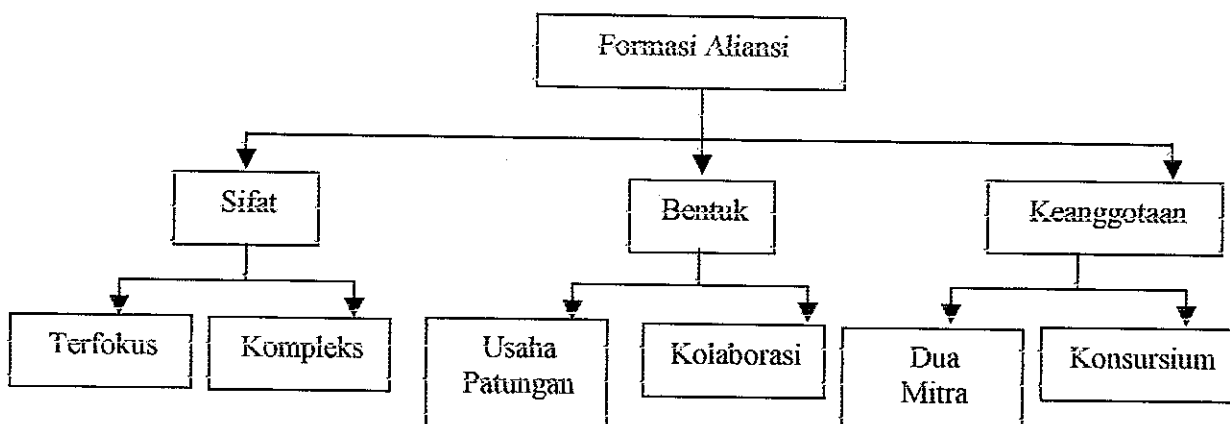
Sumber : Faulkner dan Cliff Bouman dalam Agus Ramadhan dan Herry

Agar kerja sama menjadi tepat, pihak-pihak yang terlibat sebaiknya saling merasa perlu dan mampu menyediakan sebagian sumberdaya atau kemampuan yang dimiliki.

Perjanjian kerja sama menginginkan pihak-pihak yang terlibat untuk saling memenuhi kebutuhan karena hal ini akan membawa kepada keunggulan kompetitif.

Aliansi dapat diklasifikasikan menurut tiga dimensi yang menjelaskan sifat, bentuk dan keanggotaan mereka seperti gambar di bawah ini, (Agus dan Herry, 2000):

**GAMBAR II.1  
FORMASI ALIANSI**



*Sumber : Faulkner dan Cliff Bouman dalam Agus R dan Herry*

### 1. Aliansi Terfokus

Adalah suatu penataan dua atau lebih daerah otonom yang dibentuk untuk menghadapi satu set situasi yang terdefinisi dengan jelas dengan cara khusus. Normalnya, aliansi ini melibatkan tiap mitra yang hanya dengan satu fungsi atau kegiatan yang besar. Misalnya Pemerintah Daerah Otonom A dalam usaha memanfaatkan suatu potensi di daerah otonom B dapat membentuk aliansi atau kerjasama dengan Pemerintah Daerah setempat. Sifat dari aliansi ini terfokus pada saling pengertian dan pemahaman yang jelas akan kontribusi dan penghargaan terhadap hasil kerja masing-masing.

## 2. Aliansi Kompleks

Dapat melibatkan mata rantai biaya kegiatan selengkapnya dari para anggotanya. Daerah-daerah otonom yang terlibat dalam aliansi itu menyadari bahwa bersama-sama mereka dapat membentuk badan usaha kompetitif yang secara potensial jauh lebih kuat dibanding jika mereka berdiri sendiri-sendiri. Jika aliansi terfokus antara daerah otonom A dengan daerah otonom B berjalan sukses maka akan berkembang menjadi aliansi kompleks. Kerja sama mereka tidak hanya terfokus pada pemanfaatan potensi semata tetapi berkembang pada bidang-bidang lain seperti penelitian, tenaga kerja dan pengembangan pemasaran.

## 3. Usaha Patungan

Melibatkan pembentukan suatu badan usaha baru yang terpisah secara hukum dari perusahaan para mitra usaha. Normalnya, badan usaha baru itu memulai usaha dengan anggota mitranya sebagai pemegang saham dan dengan tujuan yang telah disepakati dalam area kegiatan tertentu. Jadi Pemerintah Daerah Otonom A dapat membentuk usaha patungan dengan Pemerintah daerah Otonom B. Kemitraan ini menyediakan keuangan dan kemampuan serta sumberdaya pendukung lain bagi usaha patungan tersebut dalam jumlah yang disepakati. Kemudian kedua Pemerintahan Daerah Otonom tersebut dapat membentuk badan usaha baru yang mandiri sepenuhnya, dengan pegawai dan tujuan strategik yang dimiliki sendiri, terpisah dari induknya (dalam hal ini Pemerintah Daerah Otonom A dan B).

## 4. Kolaborasi

Bentuk aliansi kolaborasi digunakan jika para anggota tidak ingin membentuk badan usaha patungan yang terpisah dari badan usaha induk milik masing-masing mitra, yang akan menyebabkan adanya batas-batas dalam hubungan di antara mereka.

Kebalikan Daerah Otonom A dan Pemerintahan Daerah Otonom B dapat membentuk badan usaha patungan yang tidak terpisah dari induknya.

#### 5. Konsorsium

Bentuk khusus aliansi di mana jumlah keanggotaan dan kegiatannya berskala besar yang dibentuk untuk tujuan yang sangat spesifik dan biasanya dikelola terpisah dari semua pemegang saham.

Konsorsium jarang menurun menjadi aliansi dua mitra. Demikian juga aliansi patungan jarang menurun menjadi aliansi bukan usaha patungan dan aliansi kompleks jarang menurun menjadi aliansi terfokus. Bentuk perjanjian kerjasama yang akan digunakan dalam situasi tertentu mempunyai pilihan kebijakan pada bentuk tertentu, lebih dari lainnya, sehingga seringkali mengabaikan ketepatannya. Hampir semua perjanjian kerja sama dapat diklasifikasikan ke dalam delapan tipe :

1. Terfokus usaha patungan dua mitra
2. Kompleks usaha patungan dua mitra
3. Terfokus usaha patungan konsorsium
4. Kompleks usaha patungan konsorsium
5. Terfokus kolaborasi dua mitra
6. Kompleks kolaborasi dua mitra
7. Terfokus kolaborasi konsorsium
8. Kompleks kolaborasi konsorsium

Dari pembahasan di atas diketahui delapan bagian aliansi dasar yang sesuai baik dengan sifat aliansi, bentuknya maupun jumlah keanggotaannya. Tipe aliansi yang melibatkan pembentukan badan usaha patungan akhir-akhir ini merupakan bentuk yang paling populer. Disamping itu, ada jalur yang jelas di mana aliansi menapaki evolusi,

misalnya aliansi terfokus yang sukses seringkali berkembang menjadi kompleks, setelah para anggotanya menemukan area-area atau bidang-bidang untuk kerja sama saling menguntungkan.

Meskipun mekanisme yang dipilih jelas sangat bervariasi sesuai bentuk aliansi yang dipilih, tetapi dalam semua bentuk aliansi, sikap yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan adalah sama. Sikap yang tepat memiliki dua komponen utama yaitu :

#### 1. Komitmen

Langkahnya komitmen dapat mematikan aliansi atau kerja sama dalam waktu singkat. Aliansi gagal karena mitranya tidak mengalokasikan orang-orang yang terbaik dalam proyek, kurang memperhatikan agenda prioritas, atau membentuk terlalu banyak aliansi dengan harapan bahwa sedikitnya ada yang sukses. Sikap semacam ini memiliki bibit-bibit kegagalan di dalamnya.

#### 2. Kepercayaan

Adalah faktor kunci kedua bagi daya tahan suatu aliansi. Kecuali jika kepercayaan dibangun secara dini di dalam kemitraan aliansi, aliansi akan segera berakhir sebagai penataan organisasional terbaik bagi para anggotanya, karena mereka akan semakin banyak membuang waktu dan sumberdaya untuk memonitor kegiatan satu sama lain sebagai akibat langkanya kepercayaan. Kepercayaan berhubungan dengan keyakinan bahwa setiap mitra akan bertindak dengan integritas, dan akan mematuhi komitmennya.

Kesesuaian sasaran adalah vital bagi kesuksesan aliansi atau kerja sama jangka panjang. Tentu saja sasaran-sasaran spesifikasi dari aliansi akan mengalami evolusi sepanjang waktu, namun jika sasaran-sasaran dari mitra bertentangan satu sama lain secara fundamental, aliansi hanya akan merupakan ajang oportunistik jangka pendek. Kesesuaian sasaran tidak berarti sasaran-sasaran tiap mitra harus identik.

Disamping itu terdapat dua bentuk kerja sama jika dilihat dari jumlah daerah otonom yang terlibat :

#### 1. Kerja Sama Bilateral

Suatu kerja sama yang hanya melibatkan dua daerah otonom, misalnya antara dua kabupaten dan kota atau antar dua daerah propinsi. Pada dasarnya kerjasama bilateral lebih mudah diterapkan oleh dua daerah otonom yang bertetangga dengan menjamin kepentingan-kepentingan yang sama dan seimbang. Dua daerah otonom yang bertetangga biasanya dihadapkan pada bidang-bidang permasalahan yang sama, atau pada bidang-bidang permasalahan yang berbeda, tetapi secara prinsipal dapat dipecahkan bersama melalui suatu kerja sama. Tuntutan akan pemecahan masalah bersama ini terutama dihadapi oleh daerah kota yang sedang berkembang terhadap daerah tetangganya terdekat. Berbagai pertentangan kepentingan dapat timbul di dalam mendekati obyek permasalahan jika kerja sama itu tidak dilakukan. Atau minimal kerja sama yang dijalin itu akan menjamin tercapainya efisiensi dalam penanganan masalah-masalah yang dihadapi bersama.

#### 2. Kerja Sama Multilateral

Kerja sama antar tiga atau lebih daerah otonom untuk mengatur secara bersama-sama kepentingan daerah yang bersangkutan. Beberapa bidang kegiatan yang berbeda antar satu daerah otonom dengan daerah otonom lainnya, dapat menjadi objek kerja sama multilateral. Namun masing-masing membawakan fungsi dan peranan yang seimbang untuk mewujudkan suatu tujuan bersama.

Di dalam penentuan bentuk kerja sama pengelolaan pembangunan kawasan perkotaan didasarkan pada Undang-undang Nomer 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah khususnya pada pasal 91 tentang Pengelolaan Kawasan Perkotaan di perbatasan antara pemerintah kota dan pemerintah kabupaten.

Beberapa kota baru pengelolaannya merupakan kombinasi dari suatu badan khusus dengan pemerintah kota/kabupaten. Menurut Sujarto sistem pengelolaan kota atau kota baru yang dapat dikembangkan, antara lain:

1. Pengelolaan kota oleh pemerintah daerah dalam bentuk kawasan perkotaan merupakan bagian daerah kabupaten (UU Penda No. 22 Tahun 1999 Ps. 90).
2. Pengelolaan kota oleh suatu badan otorita untuk kota yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh pemerintah
3. Pengelola kota oleh suatu konsorsium perusahaan swasta yang dikoordinasikan oleh badan pemerintah sampai masa tertentu, kemudian dialihkan kepada pemerintah daerah.
4. Pengelola kota oleh suatu departemen atau instansi sektoral sampai masa tertentu kemudian dialihkan kepada pemerintah daerah.
5. Pengelola oleh suatu badan gabungan yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah dengan pembangian wewenang yang meliputi bidang pemerintahan, perencanaan, dan kesejahteraan masyarakat oleh pemerintah daerah, sedangkan bidang oprasional, pemeliharaan teknis oleh pengembang.

Maka prespektif bentuk kerja sama pengelolaan pembangunan dapat diambilkan dari teori di depan yang telah diulas dengan mengingat bahwa kerja sama ini beranggotakan hanya dua daerah otonom atau dua mitra seperti tabel dibawah ini:

**TABEL II.2**  
**PERUMUSAN BENTUK KERJA SAMA PENGELOLAAN PEMBANGUNAN**  
**DUA MITRA**

KERJASAMA		BENTUK	
		USAHA PATUNGAN (A)	KOLABORASI (B)
SIFAT	TERFOKUS (C)	AC	BC
	KOMPLEKS (D)	AD	BD

Sumber : Analisis teori,2001

Dari tabel tersebut terlihat empat alternatif bentuk kerja sama yaitu:

1. AC : Usaha patungan terfokus
2. AD : Usaha patungan kompleks
3. BC : Kolaborasi terfokus
4. BD : Kolaborasi kompleks

Empat alternatif tersebut untuk masukan pada analisis AHP pada tingkat alternatif.

### 2.6 Prosedur Kerja Sama.

Kerja sama antara daerah merupakan suatu kerangka kerja sama antara dua atau lebih pemerintah daerah yang setingkat di dalam menangani suatu atau beberapa proyek tertentu demi tercapainya kepentingan masing-masing pihak. Oleh karena kerja sama ini merupakan kerjasama yang bersifat formal, maka prosedur penetapannya ke dalam suatu Persetujuan Kerja sama harus dilakukan di atas kerangka Peraturan Bersama (Sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah No.22 tahun 1999). Sebelum ditetapkannya Peraturan bersama itu, tentu saja telah berlangsung beberapa kegiatan, baik yang berupa pengkajian bersama atas usul-usul yang diajukan oleh masing-masing pihak, maupun

berupa perundingan-perundingan untuk mencapai prinsip-prinsip umum dari kerangka kerja sama yang akan disepakati.

Prosedur kerjasama itu dapat kita tinjau dari dua ruang lingkup dan tingkatan kerjasama, yaitu kerja sama antara daerah-daerah otonom dalam satu Propinsi dan kerja sama di antara daerah-daerah otonom yang berbeda Propinsi atau kerja sama antar propinsi. Prosedur kerja sama adalah sebagai berikut:

- a. Pada tingkat awal, gagasan tentang kerja sama itu dicetuskan oleh salah satu pihak yang merasa berkepentingan, kemudian menggarapnya dalam lingkungan pengambil keputusan di daerah yang bersangkutan (misalnya antara Bupati beserta staf dengan Pimpinan DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan).
- b. Tahap kedua adalah prakarsa untuk melakukan kontak-kontak dengan Daerah yang akan diajak bekerjasama. Seiring dengan itu dapat pula dilakukan kontak-kontak yang serupa terhadap staf Gubernur yang bersangkutan sebagai pihak yang berwenang mengesahkan kerjasama itu. Bentuk-bentuk itu dapat pembicaraan-pembicaraan informal, melalui jalur-jalur pertemuan terbatas yang sifatnya teratur, dan dapat pula berupa pembicaraan-pembicaraan yang bersifat formal, misalnya melalui rapat kerja di antara pihak-pihak yang berkepentingan.
- c. Setelah prinsip-prinsip umum dari kerja sama, dan penetapan obyek kerjasama telah disepakati, maka langkah-langkah yang lebih maju dapat dilakukan. Tahap ketiga ini merupakan penggarapan teknis kerjasama di antara Pemerintah-pemerintah Daerah yang akan bekerjasama, yang diikuti pula oleh pihak Pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pada tahap ini sudah dapat dibentuk Panitia ad hoc yang bertugas melakukan perundingan-perundingan, diskusi-diskusi dan pengkajian lebih lanjut terhadap detail-

detail dari kerja sama yang akan dilakukan. Panitia ad hoc ini beranggotakan wakil-wakil dari Pemerintah kabupaten/kota yang bermaksud untuk kerja sama ditambah wakil dari Pemerintah propinsi.

Beberapa hal yang mutlak dibicarakan karena akan dituangkan ke dalam peraturan bersama adalah:

1) Ruang lingkup bidang-bidang yang dikerja samakan.

Di sini harus disepakati tentang bidang-bidang apa saja yang akan tercakup ke dalam kerangka kerja sama, serta disepakati pula batas-batas teknis dimana kerangka kerja sama itu dapat menjangkau aspek-aspek tertentu dari bidang kegiatan yang dikerja samakan. Dalam hal ini sudah jelas ditentukan pula apakah bidang kerja sama itu tercakup ke dalam batas kewenangan Otonomi dari masing-masing Daerah (urusan rumah tangga daerah) ataukah ke dalam bidang tugas pembantuan.

2) Susunan Organisasi dan Personalia.

Susunan organisasi dan personalia ditetapkan setelah terlebih dulu disepakati wadah yang mengelola kerja sama itu, misalnya apakah merupakan proyek bersama ataukah berupa badan hukum tertentu (misalnya Otorita dan sebagainya). Penetapan susunan organisasi dan personalia ini perlu, oleh karena mereka inilah yang akan melaksanakan wewenang operasional dan realisasi kerjasama itu. Dengan demikian suatu struktur organisasi yang disepakati (demikian pula personalianya) harus benar-benar menjamin bahwa melalui mereka kerjasama itu dapat berlangsung sesuai dengan rencana. Dari segi personaliapun harus mencerminkan kualifikasi tertentu yang dibutuhkan, demikian pula keseimbangan jumlah dan posisi yang diberikan kepada wakil-wakil Pemerintah Daerah yang terlibat. Anggota personalia

ini dapat diambil dari Pegawai Daerah atau pegawai yang diperbantukan pada daerah yang bersangkutan.

3) Tata Cara dan ketentuan-ketentuan teknis Pelaksanaan Kerja sama.

Kejelasan tentang detail-detail tata cara dan teknis pelaksanaan kerja sama sangat diperlukan untuk menghindari adanya kesimpangsiuran dalam operasionalisasi rencana-rencana yang ditetapkan. Seperti diketahui suatu hubungan kerjasama yang melibatkan dua pihak yang pada mulanya memiliki kewenangan-kewenangan otonomi, biasanya cenderung untuk selalu mengutamakan kepentingan daerahnya masing-masing. Dengan demikian setiap celah-celah yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan daerahnya dapat saja mendorong pihaknya mengambil langkah-langkah yang menguntungkan itu. Dengan penjelasan yang terperinci tentang detail-detail dari tata cara dan ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan kerja sama itu, diharapkan kerja sama itu akan selalu berada di atas landasan obyektifnya.

4) Pembiayaan.

Oleh karena setiap kerja sama selalu mengandung konsekuensi-konsekuensi keuangan, maka pembahasan tentang faktor biaya yang dikeluarkan dalam rangka kerja sama ini sangat perlu dilakukan. Kesepakatan di sektor pembiayaan akan mencakup jumlah keseluruhan biaya yang diproyeksikan dalam kerangka kerja sama ini serta beban yang dipikul oleh masing-masing pihak. Dalam hal ini juga sudah harus diperhitungkan kemungkinan adanya pembiayaan-pembiayaan yang tak terduga jika terjadi sesuatu hal yang di luar rencana. Jika proyek kerja sama itu merupakan sesuatu yang mutlak dilakukan (jika tidak dilakukan akan membawa akibat-akibat buruk yang luas bagi salah satu atau kedua belah pihak yang harus bekerjasama) Sementara Daerah-daerah yang bersangkutan tidak memiliki cukup

dana untuk membiayainya, maka dapat saja diusulkan kepada Propinsi kemungkinan adanya subsidi untuk kelancaran kerjasama itu. Tetapi hal yang terakhir ini sangat tergantung pada kebijakan Pemerintah propinsi yang bersangkutan.

5) Jangka Waktu.

Suatu kerja sama tentu saja hanya diproyeksikan pada suatu obyek tertentu, dan obyek yang dikerjakan samakan biasanya akan selesai mencapai targetnya pada suatu waktu tertentu. Oleh karena itu maka penetapan tentang batas waktu berlakunya kerjasama perlu disepakati oleh masing-masing pihak.

6) Ketentuan-ketentuan lain yang dipandang perlu.

Yang dimaksud di sini adalah pengaturan tentang hal-hal di luar pokok-pokok yang dikemukakan mulai dari angka 1) s/d 5) tersebut diatas.

- d. Setelah Panitia ad hoc telah menyusun draft dari peraturan bersama yang akan menjadi landasan bagi kerja sama yang akan dilakukan, maka tahap keempat adalah proses finalisasi draft untuk selanjutnya dimintakan persetujuan DPRD Kabupaten/kota masing-masing pihak.
- e. Tahap kelima adalah penanda tangan Peraturan Bersama oleh masing-masing Bupati/walikota yang bersangkutan.
- f. Tahap Keenam adalah pengesahan oleh Gubernur yang bersangkutan.

Dari uraian di atas terlihat adanya enam tahap yang dilalui sebagai prosedur yang berlaku untuk mewujudkan suatu kerja sama antar Daerah dari suatu Propinsi. Prosedur ini juga, secara prinsipal, berlaku bagi kerja sama yang dilakukan oleh dua atau lebih daerah

otonomi yang berbeda Propinsi atau kerja sama yang dilakukan oleh dua atau lebih Pemerintah propinsi.

## 2.7 Rangkuman

Dari berbagai pendapat di atas dapat diambil beberapa pengertian diantaranya adalah:

- ❖ Pengertian wilayah perbatasan adalah kawasan khusus yang berbatasan dengan wilayah tetangga yang meliputi lebih dari satu wilayah administrasi baik kabupaten atau kota. Wilayah perbatasan merupakan wilayah khusus yang memerlukan anggaran yang khusus pula. Namun dalam pembahasan nantinya yang dimaksudkan adalah wilayah perbatasan yang memiliki potensi konflik dilihat dari potensi sumber daya yang ada maupun permasalahan lain yang dapat ditimbulkan dan membuka peluang untuk kerja sama.
- ❖ Kerja sama, yang dimaksud di sini adalah adanya dua pihak yang berinteraksi atau menjalin hubungan yang bersifat dinamis untuk mencapai suatu tujuan bersama. Faktor pendorong tumbuhnya kerjasama antar daerah otonom adalah perbedaan dan kesamaan dalam kepentingan dan pandangan antar daerah otonom. Hubungan antar daerah otonom ini dilihat sebagai hubungan kerja sama, yang telah mencerminkan hubungan saling ketergantungan dan persahabatan.
- ❖ Pada hakekatnya para ahli mengemukakan bahwa pada umumnya perkembangan dan pertumbuhan kota-kota di Indonesia dimulai dari suatu desa yang telah ada kemudian karena pengaruh dari luar atau karena fungsinya yang berkembang akibat pengaruh, kemudian tumbuh dan berkembang sebagai suatu pusat konsentrasi penduduk terbesar yang kemudian dikatakan sebagai kota.

- ❖ Dinamika suatu daerah dipengaruhi oleh aktivitas-aktivitas yang terjadi di dalamnya dan beragam aktivitas ini masing-masing tidak akan berdiri sendiri untuk mendukung eksistensinya. Dalam kaitannya dengan kondisi ini masing-masing aktivitas memerlukan suatu linkage dengan aktivitas lainnya dalam keterhubungan yang diharapkan akan saling mendukung.
- ❖ Kajian mengenai konflik pemanfaatan ruang di wilayah perbatasan Kota Semarang dengan Kabupaten Semarang merupakan latar belakang yang mendorong komplementer kedua wilayah yang berfungsi sebagai awal studi untuk mencari bentuk-bentuk kerjasama yang akan dikaji lebih dalam lagi untuk mengatasi konflik pemanfaatan ruang khususnya yang berkaitan dengan kewenangan daerah di masa otonomi daerah.
- ❖ Penyebab dasar terbentuknya aliansi adalah adanya kesesuaian strategik. Kesesuaian strategik mempunyai arti bahwa kemampuan utama dari kedua mitra saling melengkapi. Sedangkan untuk mempertahankan aliansi, harus dilakukan adaptasi budaya, yang akan membentuk aliansi yang terbaik.
- ❖ Dari uraian di atas dalam menentukan bentuk kerja sama antara Kabupaten Semarang dengan Kota Semarang dapat mengambil format aliansi yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, yaitu secara keanggotaannya dua mitra sedangkan sifat dan bentuknya perlu ditanyakan ke dua belah pihak.

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN**

Berkaitan dengan wilayah perbatasan Kota Semarang dengan Kabupaten Semarang maka klasifikasi wilayah perencanaan dapat digunakan sebagai salah satu dasar untuk menjelaskan ruang lingkup wilayah studi selain menurut pengertian wilayah perbatasan yang telah diuraikan di atas. Menurut dua konsep dasar tersebut maka ruang lingkup wilayah perbatasan Kota Semarang dengan Kabupaten Semarang dapat disimpulkan bahwa wilayah perbatasan ini meliputi lebih dari satu wilayah administrasi. Kabupaten/kota yang berbatasan dengan wilayah tetangganya dan cukup mendukung untuk perancangan dan pelaksanaan rencana-rencana pembangunan guna memecahkan persoalan ekonomi dan fisik keruangan. Satuan wilayah administrasi yang dapat mendirikan hal di atas adalah suatu Bagian Wilayah Kota (BWK) atau Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) sehingga ruang lingkup wilayah perbatasan Kota Semarang dengan Kabupaten Semarang adalah BWK VI yang meliputi Kecamatan Tembalang, BWK VII yang meliputi Kecamatan Banyumanik dan BWK VIII yang meliputi Kecamatan Gunungpati untuk wilayah perbatasan Kota Semarang dan SWP I yakni Kecamatan Ungaran untuk wilayah perbatasan Kabupaten Semarang.

Kondisi fisik wilayah perbatasan Kota Semarang dengan Kabupaten Semarang yang akan diuraikan meliputi aspek fisik dasar, aspek kependudukan, aspek penggunaan lahan dan aspek fasilitas. Pemaparan kondisi fisik keruangan ini bertujuan memberikan gambaran tentang aspek-aspek fisik keruangan yang akan digunakan pada tahap selanjutnya. Kondisi keruangan dipaparkan berdasarkan wilayah kecamatan yang merupakan wilayah perbatasan bagi Kota Semarang dengan Kabupaten Semarang.

Kecamatan Tembalang, Banyumanik dan Gunung Pati sebagai wilayah perbatasan Kota Semarang, Kecamatan Ungaran sebagai wilayah perbatasan Kabupaten Semarang.

### 3.1 Kecamatan Tembalang

#### 3.1.1 Aspek Fisik Dasar

##### a. Geografis

Kecamatan Tembalang terletak di wilayah administrasi Kota Semarang bagian selatan. Secara administrasi Kecamatan Tembalang mempunyai luas wilayah 3.710,79 Ha yang terdiri dari 12 kelurahan dengan batas-batas administratif sebagai berikut:

- ❖ Sebelah Utara : Kec. Pedurungan dan Kec. Gayamsari
- ❖ Sebelah Timur : Kec. Mranggen Kabupaten Demak
- ❖ Sebelah Selatan : Kec. Ungaran Kabupaten Semarang
- ❖ Sebelah Barat : Kec. Candisari dan Kec. Banyumanik

Adapun kelurahan-kelurahan yang termasuk dalam lingkup wilayah Kecamatan Tembalang adalah sebagai berikut:

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1. Tembalang   | 7. Kedungmundu  |
| 2. Mangunharjo | 8. Sendangmulyo |
| 3. Bulusan     | 9. Sendangguwo  |
| 4. Kramas      | 10. Tandang     |
| 5. Meteseh     | 11. Jangli      |
| 6. Rowosari    | 12. Sambiroto   |

##### b. Topografi

Wilayah Kecamatan Tembalang merupakan wilayah perbukitan dan sebagian kecil merupakan dataran rendah dengan variasi ketinggian 50-350 m dpl dan elevasi

antara 30% - 70%. Luas areal perbukitan  $\pm$  60% luas wilayah, sedangkan dataran rendah 15% dan untuk dataran tinggi 25%.

### c. Geologi Umum

Jenis tanah yang ada di Kecamatan Tembalang terdiri dari jenis tanah:

1. Formasi Aluvial, seluas  $\pm$  15% Kecamatan Tembalang yaitu di Kelurahan Rowosari.
2. Formasi Notopuro, seluas  $\pm$  30% Kecamatan Tembalang di sepanjang daerah wilayah utara bagian barat ke selatan dan di daerah perbukitan.
3. Formasi Damar, seluas  $\pm$  50% Kecamatan Tembalang, sepanjang daerah utara bagian timur ke selatan.
4. Formasi Klibiuk dan Cipluk, seluas  $\pm$  5% kecamatan Tembalang, diantara formasi notopuro dan formasi damar.

### d. Hidrologi

Karakteristik pola air di Kecamatan Tembalang ditentukan oleh adanya aliran sungai banjir kanal timur yang merupakan batas fisik wilayah perencanaan. Sungai-sungai yang ada mengalir ke sungai Banjir Kanal timur yang bermuara di Laut Jawa. Beberapa sungai tersebut diantaranya adalah: Kali Kedungmundu, Kali Jetak, Kali Watubadak, Kali Talang, dan Kali Pengkol.

### 3.1.2 Kependudukan

Perkembangan penduduk Kecamatan Tembalang dari Tahun 1994 –1998 selalu mengalami kenaikan. Perkembangan penduduk di kecamatan ini merupakan kontribusi perkembangan penduduk tiap kelurahan. Pada tahun 1998 kelurahan yang memiliki kontribusi terbesar ialah Kelurahan Sendangmulyo (Sebesar 16.539 jiwa), Tandang

(14.233 jiwa) dan Sendangguwo (13.644 jiwa). Sedangkan yang memiliki kontribusi penduduk terkecil adalah Kelurahan Kramas yaitu sebesar 1.700 jiwa.

Untuk lebih jelasnya, perkembangan penduduk di Kecamatan Tembalang diperinci per kelurahan dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini.

**TABEL III.1**  
**PERKEMBANGAN PENDUDUK TIAP KELURAHAN**  
**DI KECAMATAN TEMBALANG TAHUN 1994 –1998**

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk				
		1994	1995	1996	1997	1998
1	Tembalang	3378	3418	3484	3551	3591
2	Mangunharjo	3207	3468	3702	3942	4177
3	Bulusan	2276	2348	2432	2475	2543
4	Kramas	1412	1465	1561	1670	1700
5	Meteseh	5781	6128	6351	6597	6890
6	Rowosari	7485	7569	7586	8235	8373
7	Kedungmundu	5648	5805	6139	6423	6685
8	Sendangmulyo	15179	14556	14234	14900	16539
9	Sendangguwo	12094	12437	12797	13100	13644
10	Tandang	14331	14595	14800	14696	14233
11	Jangli	4188	4295	4598	4612	4685
12	Sambiroto	7055	7347	7628	7898	8006
<b>JUMLAH</b>		<b>82034</b>	<b>83431</b>	<b>85402</b>	<b>88099</b>	<b>91066</b>

Sumber : Kecamatan Tembalang Dalam Angka Tahun 1994-1998

### 3.1.3 Penggunaan Lahan

Berdasar data penggunaan lahan yang ada di Kecamatan Tembalang pada Tahun 1998 maka 61,3% luas wilayah terdiri dari lahan yang tidak ada bangunan. Perubahan penggunaan lahan dapat ditunjukkan dengan melihat data dari kurun waktu tahun 1994 – 1998. Perinciannya dapat dilihat pada Tabel III.2.

**TABEL III.2**  
**PENGGUNAAN LAHAN KECAMATAN TEMBALANG**  
**TAHUN 1994 DAN TAHUN 1998 (HA)**

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Kecamatan Tembalang (Ha)		Perubahan (Ha)	Prosentase (Ha)
		1994	1998		
1	Perumahan	918,32	934,53	16,21	0,005
2	Komersial	3,7	3,7	0	0
3	Industri & gudang	0	0	0	0
4	Jasa	53,23	53,23	0	0
5	Tidak ada bangunan	2274,65	2258,44	-16,21	-0,005
6	Taman	0,09	0,09	0	0
7	Lain-lain	460,8	460,8	0	0
JUMLAH		3.710,79	3.710,79	0	0

Sumber : Kecamatan Tembalang Dalam Angka, 1998

### 3.1.4 Fasilitas

Fasilitas yang terdapat di Kecamatan Tembalang meliputi fasilitas kota yaitu Fasilitas pendidikan, kesehatan, perekonomian, peribadatan, olah raga dan ruang terbuka, hiburan dan rekreasi serta fasilitas pemerintahan.

Fasilitas pendidikan meliputi TK, SD, SMP, SMU, dan Universitas. Fasilitas Kesehatan meliputi Puskesmas, RS, Apotik dan poliklinik. Fasilitas perekonomian yang ada meliputi pasar, warung makan, toko/kios, lembaga ekonomi dan perhotelan. Fasilitas peribadatan meliputi masjid, mushola, gereja dan lain-lain (pura, vihara). Fasilitas olah raga meliputi lapangan olah raga dan taman. Fasilitas hiburan dan rekreasi meliputi tempat rekreasi dan bioskop. Fasilitas pemerintahan meliputi kantor kelurahan dan balai kelurahan.

### 3.2. Kecamatan Banyumanik

#### 3.2.1 Aspek Fisik Dasar

##### a. Geografis

Luas wilayah Kecamatan Banyumanik adalah 2.828,94 ha yang terdiri dari 11 kelurahan dengan batas-batas administratif sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Gajahmungkur dan Candisari
- Sebelah Timur : Kecamatan Banyumanik
- Sebelah Selatan : Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang
- Sebelah Barat : Kecamatan Gunungpati

Adapun kelurahan-kelurahan yang termasuk dalam Kecamatan Banyumanik ialah sebagai berikut :

- |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Kelurahan Pudak Payung  | 7. Kelurahan Pedalangan    |
| 2. Kelurahan Gedawang      | 8. Kelurahan Sumurboto     |
| 3. Kelurahan Jabungan      | 9. Kelurahan Sronдол Kulon |
| 4. Kelurahan Padangsari    | 10. Kelurahan Tinjomoyo    |
| 5. Kelurahan Banyumanik    | 11. Kelurahan Ngesrep      |
| 6. Kelurahan Sronдол Wetan |                            |

##### b. Topografi

Kecamatan Banyumanik merupakan dataran tinggi dengan batas fisik wilayah berupa daerah perbukitan dengan ketinggian 100 – 350 m di atas permukaan air laut dengan kemiringan lereng mencapai 30 % - 70 %.

##### c. Geologi Umum

Kecamatan Banyumanik memiliki 3 jenis tanah permukaan sesuai dengan wilayahnya, yaitu :

1. Formasi Aluvial, terdapat pada bagian Selatan Kecamatan Banyumanik.
2. Formasi Notopuro, terdapat di sepanjang daerah di wilayah utara bagian barat ke Selatan dan daerah perbukitan.
3. Formasi Klibiuk dan Cipluk, terdapat pada sebagian kecil di wilayah Timur Laut Kecamatan Banyumanik.

#### d. Hidrologi

Karakteristik pola air yang ada di Kecamatan Banyumanik ditentukan oleh aliran Sungai Kaligarang yang merupakan batas fisik wilayah perencanaan dan Kali Pengkol tempat bermuaranya saluran-saluran drainase lingkungan yang ada di Kecamatan Banyumanik.

Ada beberapa anak sungai yaitu diantaranya: Kali Ketekan, Kali Pengkol, Kali Watuanak, Kali Durga Dewi yang bermanfaat bagi :

1. Sistem muara drainase kawasan perencanaan
2. Salah satu sumber air

#### 3.2.2 Aspek Kependudukan

Perkembangan penduduk yang ada di Kecamatan Banyumanik dipengaruhi oleh adanya kelahiran alami dan karena adanya mutasi penduduk. Pada tahun 1994, jumlah penduduk Kecamatan Banyumanik sebesar 87.402 jiwa. Jumlah penduduk ini meningkat menjadi 97.818 jiwa pada tahun 1998. Untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan penduduk di Kecamatan Banyumanik dengan dirinci tiap kelurahan dapat dilihat pada

**Tabel III.3**

**TABEL III.3**  
**PERKEMBANGAN PENDUDUK TIAP KELURAHAN**  
**DI KECAMATAN BANYUMANIK TAHUN 1994-1998**

No	Kelurahan	1994	1995	1996	1997	1998
1	Tinjomoyo	7287	7482	7516	7630	7763
2	Ngesrep	11621	11478	11354	12010	12186
3	Sronдол Kulon	7969	10446	10642	10847	11012
4	Sumurboto	5807	5975	6053	7394	7546
5	Pedalangan	7162	7334	7390	7471	7740
6	Sronдол Wetan	17470	17665	17871	18907	18991
7	Padangsari	12024	12404	12577	12347	12509
8	Banyumanik	6559	6656	6750	6734	6741
9	Pudak Payung	7140	7592	7815	8089	8356
10	Gedawang	2191	2248	2320	2440	2661
11	Jabungan	2172	2145	2393	2283	2313
<b>JUMLAH</b>		<b>87402</b>	<b>91425</b>	<b>92681</b>	<b>96152</b>	<b>97818</b>

Sumber : Banyumanik dalam Angka, 1998

### 3.2.3 Penggunaan Lahan

Berdasarkan data penggunaan lahan yang ada di Kecamatan Banyumanik pada tahun 1998 maka 52% luas wilayah terdiri dari lahan untuk perumahan. Perubahan penggunaan lahan dapat ditunjukkan dengan melihat data dari kurun waktu 1994 sampai 1998. Perincian tentang luas penggunaan lahan yang ada di wilayah Kecamatan Banyumanik dapat dilihat pada Tabel III.4

**TABEL III.4**  
**PENGGUNAAN LAHAN KECAMATAN BANYUMANIK**  
**TAHUN 1994 dan 1998 (Ha)**

No	Jenis Penggunaan Lahan	Kec. Banyumanik (Ha)		Perubahan (Ha)	Prosentase (%)
		1994	1998		
1	Perumahan	1472,06	1497,86	25,8	0,009
2	Komersial	14,98	14,98	0	0
3	Industri & Pergudangan	23,77	23,77	0	0
4	Jasa	33,74	33,74	0	0
5	Tidak ada bangunan	1203,5	1177,69	-25,8	-0,009
6	Taman	0,73	0,73	0	0
7	Lain-lain	80,17	80,17	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>2.828,94</b>	<b>2.828,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sumber : BPN Kota Semarang, 2000

### 3.2.4 Fasilitas

Fasilitas yang terdapat di Kecamatan Banyumanik meliputi fasilitas kota yaitu fasilitas pendidikan, kesehatan, perekonomian, peribadatan, olah raga dan ruang terbuka, hiburan dan rekreasi dan pemerintahan. Fasilitas pendidikan meliputi TK, SD, SLTP, dan SLTA. Fasilitas Kesehatan meliputi Puskesmas, RS, Apotik, dan poliklinik. Fasilitas perekonomian yang ada meliputi pasar, warung makan, toko/kios, lembaga ekonomi, dan perhotelan. Fasilitas peribadatan meliputi masjid, mushola, gereja, dan lain-lain (pura, vihara). Fasilitas olah raga dan ruang terbuka meliputi lapangan olah raga dan taman. Fasilitas hiburan dan rekreasi meliputi tempat rekreasi dan bioskop. Fasilitas pemerintahan meliputi kantor kelurahan dan balai kelurahan.

## 3.3 Kecamatan Gunung Pati

### 3.3.1 Aspek Fisik Dasar

#### a. Geografis

Kecamatan Gunungpati merupakan bagian dari wilayah administrasi Kota Semarang dengan batas wilayah administrasi sebagai berikut :

- Sebelah utara : Kecamatan Ngaliyan
- Sebelah Timur : Kecamatan Banyumanik
- Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang
- Sebelah Barat : Kecamatan Mijen

Kecamatan Gunungpati terletak di bagian barat daya Kota Semarang dengan jarak sekitar 10 km dari pusat kota dan tergolong dalam wilayah hinterland (pinggiran kota). Secara administratif luas wilayah Kecamatan Gunungpati meliputi 5.902,19 Ha, terdiri dari 16 kelurahan, seperti tersebut di bawah ini :

1. Kelurahan Sumurrejo
2. Kelurahan Pakintelan
3. Kelurahan Mangunsari
4. Kelurahan Plalangan
5. Kelurahan Gunungpati
6. Kelurahan Nongkosawit
7. Kelurahan Pongangan
8. Kelurahan Ngijo
9. Kelurahan Kalisegoro
10. Kelurahan Patemon
11. Kelurahan Sekaran
12. Kelurahan Sukorejo
13. Kelurahan Sadeng
14. Kelurahan Cepoko
15. Kelurahan Kandri
16. Kelurahan Jatirejo

b. Topografi

Kecamatan Gunungpati berada pada ketinggian 259 meter dari permukaan laut. Hampir keseluruhan wilayah berupa perbukitan dan dataran. Kondisi topografi demikian karena merupakan wilayah kaki Gunung Ungaran. Klasifikasi kelerengan di Kecamatan Gunungpati dapat dibagi sebagai berikut :

- 2 – 15% : Sebagian Kelurahan Cepoko, Nongkosawit, Gunungpati, Plalangan, Sumurejo, Mangunsari, Pakintelan, khususnya pada daerah-daerah dekat jalan raya.
- 15 – 25% : Sebagian Kelurahan Sadeng, Sukorejo, Sekaran, Pongangan, Kandri dan Kalisegoro.
- 25 – 40% : Sebagian Kelurahan Sadeng, Sekaran, Kalisegoro, Ngijo dan Nongkosawit.
- > 40% : Sebagian Kelurahan Ngijo, Nongkosawit, serta beberapa bagian disepanjang sungai Kreo, sungai Keripik dan Kaligarang.

### c. Geologi Umum

Secara umum struktur geologi pada Wilayah Kecamatan Gunung Pati terbentuk oleh batuan vulkanik berupa breksi vulkanik. Sebagai sisipan dalam batuan ini adalah lapisan marin selang-seling, batu lempung nopal breksi, batu pasir konglomerat dan batu gamping yang banyak terdapat di Kelurahan Sadeng dan sebagian daerah Kelurahan Sekaran. Sedangkan untuk kelurahan Gunungpati, Cempoko, Plalangan dan Kelurahan Sumurrejo banyak terdapat batuan vulkanik yang berasal dari Gunung Ungaran Tengah dan Ungaran Lama. Sedangkan daerah Kelurahan Sadeng dan Sekaran terdapat batuan formasi damar, batu pasir, konglomerat, breksi vulkanik dan tufa yang hasil pelapukannya merupakan bahan baku pembuatan batako dan plester.

### d. Klimatologi

Iklim di Kecamatan Gunungpati secara umum tidak berbeda jauh dengan iklim di Kotamadya Semarnag. Iklim di Kecamatan Gunungpati dipengaruhi oleh kondisi geografisnya yang ada. Suhu rata-rata antara 23 – 33°C dan curah hujan antara 200 – 2500 mm/tahun.

### e. Hidrologi

#### 1. Air Permukaan

Terdapat beberapa sungai yang mengalir di Kecamatan Gunung Pati. Sungai-sungai tersebut adalah Kali Kreo, Kali Kripik, dan Kali Garang. Sungai tersebut berfungsi sebagai drainase utama yang menampung curah hujan dari beberapa daerah alirannya. Fluktuasi debit air sungai tersebut sangat besar, terutama pada musim hujan di beberapa tempat badan sungai tidak dapat lagi menampung sehingga menimbulkan banjir pada beberapa tempat. Gabungan Kali Kreo, Kali Kripik dan Kali Garang Hulu membentuk Kali Banjir Kanal Barat. Selain sungai-

sungai tersebut terdapat pula Kali Sigundu, Kali Gung, Kali Ciliwung, Kali Manggis, Kali Kandri dan saluran-saluran lainnya. Sungai utama di daerah ini adalah Sungai Kreo dari bentuk lembah (palung), umumnya berlembah U lebar sampai U sempit yang berarti sungai tersebut termasuk dalam stadium dewasa-tua dimana proses erosi horisontal lebih kuat dari erosi vertikal. Sungai kreo memiliki luas daerah aliran sungai sebesar  $66 \text{ km}^2$ , debit maksimum dalam setahun  $444 \text{ m}^3/\text{detik}$  dengan muka air tertinggi 3,27 m, debit minimum dalam setahun  $0,444 \text{ m}^3/\text{detik}$  dengan muka air terendah 0,09 m.

## 2. Air Tanah

Kedalaman muka air tanah bebas di Kecamatan Gunung Pati berkisar antara 2,5 m - > 15 m di bawah permukaan tanah setempat. Fluktuasi dari muka air tanah sangat besar tergantung pada musim. Di beberapa tempat masih banyak dijumpai adanya mata air. Umumnya dijumpai di lembah-lembah, baik lembah sungai besar maupun sungai kecil.

### 3.3.2 Aspek Kependudukan

Jumlah penduduk Kecamatan Gunungpati tahun 1994 sebesar 49.473 jiwa. Jumlah ini bertambah menjadi 55.569 jiwa pada tahun 1998 atau naik sebesar 12%. Dari 16 kelurahan yang ada di Kecamatan Gunung Pati, Kelurahan Sukorejo merupakan kelurahan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak, sedangkan jumlah penduduk terkecil di Kecamatan Jatirejo. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel III.5**

**TABEL III.5**  
**JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN GUNUNG PATI**  
**TAHUN 1994 – 1998**

NO	Kelurahan	Jumlah Penduduk				
		1994	1995	1996	1997	1998
1	Gunungpati	5,017	5,070	5,290	5,340	5,400
2	Plalangan	2,693	2,723	2,841	2,853	2,890
3	Cepoko	2,018	2,050	2,051	2,092	2,120
4	Jatirejo	1,437	1,457	1,482	1,500	1,532
5	Kandri	2,379	2,434	2,505	2,558	2,622
6	Nongkosawit	2,883	2,917	3,105	3,127	3,125
7	Pongangan	3,026	3,083	3,758	3,911	3,980
8	Sadeng	4,094	4,206	4,225	4,288	4,358
9	Sumurrejo	3,569	3,663	4,052	4,070	4,155
10	Pakintelan	3,239	3,274	3,368	3,363	3,360
11	Mangunsari	2,688	2,723	2,796	2,809	2,831
12	Ngijo	1,958	1,988	2,033	2,040	2,064
13	Patemon	2,908	2,951	3,079	3,093	3,114
14	Kalisegoro	1,457	1,476	1,584	1,602	1,625
15	Sekaran	4,961	5,039	5,422	5,449	5,492
16	Sukorejo	5,146	5,217	6,646	6,752	6,901
<b>Jumlah</b>		<b>49,473</b>	<b>50,271</b>	<b>54,237</b>	<b>54,847</b>	<b>55,569</b>

Sumber : Kecamatan Gunungpati Dalam Angka Tahun 1999

### 3.3.3 Penggunaan Lahan

Penggunaan Lahan di Kecamatan Gunungpati secara umum menunjukkan pola penggunaan agraris dengan prosentase luas lahan yang tidak ada bangunan lebih besar dibandingkan dengan luas penggunaan lahan lainnya. Luas Kecamatan Gunungpati meliputi 5.902,19 ha. Perubahan penggunaan lahan dapat ditunjukkan dengan melihat data dari kurun waktu 1994 sampai 1998. Perincian tentang penggunaan lahan yang ada di wilayah Kecamatan Gunung Pati dapat dilihat pada **Tabel III.6**

**TABEL III.6**  
**PENGGUNAAN LAHAN KECAMATAN GUNUNG PATI**  
**TAHUN 1994 dan 1998 (Ha)**

No	Jenis Penggunaan Lahan	Kec. Gunungpati (Ha)		Perubahan (Ha)	Prosentase (%)
		1994	1998		
1	Perumahan	473,08	484,06	10,98	0,002
2	Komersial	21,12	21,12	0	0
3	Industri & Pergudangan	0	0	0	0
4	Jasa	135,53	135,53	0	0
5	Tidak ada bangunan	5054,27	5043,29	-10,98	-0,002
6	Taman	0	0	0	0
7	Lain-lain	218,19	218,19	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>5.902,19</b>	<b>5.902,19</b>		

Sumber : BPN Kota Semarang, 2000

### 3.3.4 Fasilitas

Fasilitas yang terdapat di Kecamatan Gunung Pati meliputi fasilitas kota yaitu fasilitas pendidikan, kesehatan, perekonomian, peribadatan, olah raga dan ruang terbuka, hiburan dan rekreasi dan pemerintahan. Fasilitas pendidikan meliputi TK, SD, SLTP, dan SLTA. Fasilitas Kesehatan meliputi Puskesmas, RS, Apotik, dan poliklinik. Fasilitas perekonomian yang ada meliputi pasar, warung makan, toko/kios, lembaga ekonomi, dan perhotelan. Fasilitas peribadatan meliputi masjid, mushola, gereja, dan lain-lain (pura, vihara). Fasilitas olah raga dan ruang terbuka meliputi lapangan olah raga dan taman. Fasilitas hiburan dan rekreasi meliputi tempat rekreasi dan bioskop. Fasilitas pemerintahan meliputi kantor kelurahan dan balai kelurahan.

## 3.4 Kecamatan Ungaran

### 3.4.1 Aspek Fisik Dasar

#### a. Geografis

Kecamatan Ungaran merupakan bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Semarang dengan batas wilayah administrasi sebagai berikut :

- Utara : Kota Semarang
- Selatang : Kecamatan Klepu
- Barat : Kota Semarang dan Kabupaten Kendal
- Timur : Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak

Kecamatan Ungaran terletak di bagian utara Kabupaten Semarang dan merupakan ibukota kabupaten. Secara administratif luas Wilayah Kecamatan Ungaran meliputi 7.393, 89 Ha.

b. Topografi

Elevasi atau ketinggian topografi di Kecamatan Ungaran adalah sebagai berikut:  $\pm$  318 m dpl. Sebagian besar kemiringan lahan di Kecamatan Ungaran adalah  $> 40\%$ .

c. Klimatologi

Secara umum wilayah Kabupaten Semarang beriklim tropis, curah hujan rata-rata tahunan sebesar 2.445 mm dan hari hujan rata-rata adalah 100. Pada umumnya bulan Juli dan Agustus merupakan bulan kering (curah hujan  $< 60$  mm / tahun). Kecamatan Ungaran mempunyai curah hujan 2332 mm dan 136 hari hujan. Temperatur udara di Kabupaten Semarang berkisar antara  $18,68^{\circ}\text{C}$  dan  $21^{\circ}\text{C}$  khususnya di Kecamatan Ungaran. Kelembaban udara relatif berkisar antara 80-81%, sedang penyinaran matahari berkisar antara 60-65%. Menurut klasifikasi tipe curah hujan dari Schmidt dan Ferguson, wilayah ini termasuk tipe iklim B, yaitu dengan ratio Q (jumlah rata-rata bulan kering dibagi jumlah rata-rata bulan basah) berkisar antara 14,3% - 33,3%.

d. Hidrologi

Dari aspek hidrologi, ada beberapa sungai yang melewati Kecamatan Ungaran. Sungai-sungai tersebut tergabung dalam Satuan Wilayah Sungai sebagai berikut :

1. SWS Garang

Sungai utama yang terdapat di dalam SWS Garang yaitu Kali Garang, berhulu di sekitar Gunung Ungaran. Arah aliran sungai menuju ke utara melewati Kota Semarang dan selanjutnya bermuara di Laut Jawa. Kali Garang ini mempunyai cukup banyak anak sungai dan di daerah hulu memperlihatkan kemiringan yang curam (25% - 45% dan > 45%).

Beberapa sungai yang merupakan anak Sungai Garang diantaranya K. Pangus, K. Sambing, K. Celeng, K. Mejing, K. Kalong, dan K. Kreo. Debit Sungai Garang yang terukur adalah  $67,1 \text{ m}^3 / \text{detik}$  pada musim hujan dan  $1,2 \text{ m}^3 / \text{detik}$  pada musim kemarau.

## 2. SWS Babon/ Penggaron

Sungai Babon mempunyai anak sungai diantaranya K. Gung, K. Klangit, K. Klateng, K. Pengkol dan sebagainya. Berhulu di sekitar Kecamatan Ungaran mengalir ke arah utara melewati Kotamadya Semarang bagian timur dan bermuara di Laut Jawa. Debit K. Penggaron pada musim hujan  $28,4 \text{ m}^3 / \text{detik}$ , sedang pada musim kemarau  $0,8 \text{ m}^3 / \text{detik}$ .

## e. Jenis Tanah

Berdasarkan jenis tanahnya Kabupaten Semarang memiliki 6 (enam) jenis, yaitu: aluvial, regosol, andosol, grumosol, mediteran dan latosol, yang dapat diperinci lagi menjadi 12 macam tanah, yaitu:

1. *Tanah latosol coklat* pada Kecamatan Ungaran
2. *Tanah latosol coklat tua dan kemerahan* pada Kecamatan Ungaran

### 3.4.2 Aspek Kependudukan

Jumlah penduduk Kecamatan Ungaran pada tahun 1998 menunjukkan jumlah 94.848 jiwa. Jumlah penduduk Kecamatan Ungaran tahun 1995 sebesar 88.724 jiwa.

Jumlah ini bertambah dari tahun 1995 hingga tahun 1998. Prosentase pertambahan penduduk di Kecamatan Ungaran adalah sebesar 3,4%. Dari 21 kelurahan yang ada di Kecamatan Ungaran, Kelurahan Ungaran merupakan kelurahan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu sebesar 8.005 jiwa pada tahun 1998, sedangkan jumlah penduduk terkecil di Kecamatan Keji yaitu sebesar 1.827 jiwa pada tahun yang sama. Untuk lebih jelasnya, jumlah penduduk Kecamatan Ungaran yang diperinci tiap kelurahan dapat dilihat pada Tabel III.7

**TABEL III.7**  
**JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN UNGARAN TIAP KELURAHAN**  
**TAHUN 1995-1998**

No	Desa/Kelurahan	Th. 1995	Th. 1996	Th. 1997	Th. 1998
1	Gogik	2.725	2.764	2.787	2.855
2	Langensari	4.913	4.987	5.006	5.208
3	Beji	5.856	6.109	6.262	6.472
4	Leyangan	2.215	2.225	2.230	2.310
5	Kalongan	6.602	6.620	6.654	6.656
6	Kawengen	5.361	5.372	5.369	5.374
7	Kalikayen	2.305	2.345	2.337	2.346
8	Mluweh	3.587	3.608	3.597	3.653
9	Susukan	4.853	4.852	4.844	4.982
10	Kalirejo	2.654	2.672	2.686	2.846
11	Sidomulyo	2.789	2.803	2.905	2.887
12	Gedanganak	5.041	5.173	5.346	5.395
13	Candirejo	2.254	2.623	2.610	2.651
14	Nyatnyono	5.100	5.094	5.083	5.401
15	Genuk	5.407	5.459	5.394	5.378
16	Ungaran	8.296	8.168	8.024	8.005
17	Bandarjo	6.224	6.182	6.095	6.018
18	Lerep	7.724	7.776	7.786	7.807
19	Keji	1.805	1.813	1.820	1.827
20	Kalisidi	4.413	4.477	4.493	4.532
21	Branjang	2.491	2.499	2.505	2.505
<b>Jumlah</b>		<b>92.615</b>	<b>93.621</b>	<b>93.833</b>	<b>95.108</b>

Sumber: Kabupaten Semarang dalam Angka, 1995-1998

### 3.4.3 Penggunaan lahan

Berdasarkan data penggunaan lahan yang ada di Kecamatan Ungaran pada tahun 1998 maka 77,1% luas wilayah terdiri dari lahan yang tidak ada bangunan. Perubahan penggunaan lahan dapat ditunjukkan dengan melihat data dari kurun waktu 1994 sampai 1998. Perincian tentang penggunaan lahan yang ada di wilayah Kecamatan Ungaran dapat dilihat pada **Tabel III.8**

**TABEL III.8**  
**PENGUNAAN LAHAN KECAMATAN UNGARAN**  
**TAHUN 1994 DAN 1998**

No	Jenis Penggunaan Lahan	Kec. Ungaran (Ha)		Perubahan (Ha)	Prosentase (%)
		1994	1998		
1	Perumahan	1319.39	1362.28	51,89	0,007
2	Komersial	0	0	0	0
3	Industri & Pergudangan	45.83	46.99	1,16	0,0002
4	Jasa	0	0	0	0
5	Tidak ada bangunan	5698.33	5654.28	-51,89	-0,007
6	Taman	0	0	0	0
7	Lain-lain	330.34	330.34		
<b>JUMLAH</b>		<b>7393.89</b>	<b>7393.89</b>		

Sumber : BPN Kota dan Kab. Semarang, 2000

### 3.4.4 Fasilitas

Fasilitas yang terdapat di Kecamatan Ungaran meliputi fasilitas kota yaitu fasilitas pendidikan, kesehatan, perekonomian, peribadatan, olah raga dan ruang terbuka, hiburan dan rekreasi dan pemerintahan. Fasilitas pendidikan meliputi TK, SD, SLTP, dan SLTA. Fasilitas kesehatan meliputi Puskesmas, RS, Apotik, dan poliklinik. Fasilitas perekonomian yang ada meliputi pasar, warung makan, toko/kios, lembaga ekonomi, dan perhotelan. Fasilitas hiburan dan rekreasi meliputi tempat rekreasi dan bioskop. Fasilitas pemerintahan meliputi kantor kelurahan dan balai kelurahan.

### 3.5 Kebijakan Tata Ruang Kota Semarang dan Kabupaten Semarang

Tinjauan dari pemaparan ini adalah untuk mengetahui kebijakan tata ruang masing-masing wilayah, baik Kota Semarang maupun Kabupaten Semarang dan wilayah perbatasan pada khususnya.

#### 3.5.1 Kebijakan Tata Ruang Kota Semarang

A. Fungsi dan Peran Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai pusat pemerintahan propinsi dan sebagai pusat pemerintahan kota.
- b. Sebagai pusat pertumbuhan dan pusat aktifitas regional
- c. Sebagai pusat perdagangan dan jasa komunikasi dengan skala lokal hingga internasional
- d. Sebagai pusat atau simpul transportasi dengan skala lokal hingga internasional
- e. Sebagai daerah produksi manufaktur dengan skala lokal hingga internasional
- f. Sebagai pusat pelayanan umum terutama sebagai pusat pelayanan pendidikan, olahraga dan rekreasi.

B. Arah Kebijakan penataan ruang diarahkan sebagai berikut:

a. Karakteristik Ruang Pantai

- ❖ Kawasan garis pantai akan menjadi potensi pengembangan yang spesifik yang menampung pengembangan rekreasi, ekonomi perikanan dan kehidupan nelayan,
- ❖ Kawasan ekonomi basis dikonsentrasikan bersama kawasan pelabuhan,
- ❖ Kawasan bawah bagian timur dan barat tetap menjadi sumbu industrialisasi yang akan menampung berbagai industri dan kelasnya sebagai usaha menggapai visi ekonomi Kota Semarang dimasa sekarang dan mendatang.

b. Kawasan Kota Bawah

- ❖ Merupakan daerah datar yang mempunyai potensi keruangan yang efektif,

- ❖ Merupakan wadah berkembangnya pusat-pusat kegiatan perkotaan dan permukiman yang mampu menciptakan perkembangan ekonomi perdagangan dan jasa di berbagai sektor dan strata, disamping merupakan perlindungan dan revitalisasi kawasan-kawasan bersejarah dan budaya, pusat-pusat permukiman padat dan konservasi kehidupan kampung.
- ❖ Kawasan kota bawah harus didukung oleh pengembangan drainase yang baik dan perlindungan daerah-daerah genangan.

c. Karakteristik Kawasan Kota Atas

- ❖ Pengembangan karakteristik perbukitan dan segala potensinya, seperti disebelah selatan, tenggara dan timur digunakan untuk perlindungan alam, potensi wisata pemandangan, pengembangan pemukiman, pusat-pusat pelayanan, dan pendidikan. Disebelah barat daya dipergunakan untuk pengembangan pertanian dan konservasi hutan kota, sedangkan disebelah barat dipergunakan untuk permukiman dan Techno Park.

d. Karakteristik Kawasan Perdesaan

- ❖ Daerah pinggiran kota dikembangkan sebagai simpul-simpul pelayanan desa- kota yang dapat diwujudkan dengan pusat-pusat perdagangan perdesaan-perkotaan maupun pusat agrobisnis, agrowisata dan pertanian perkotaan.

e. Intensitas Ruang Kawasan

- ❖ Intensitas ruang tertinggi meliputi BWK puast kota, yaitu BWK I, II, dan III
- ❖ Intensitas ruang sedang meliputi BWK IV, V, VI, VII, dan X
- ❖ Intensitas ruang rendah meliputi BWK VIII dan IX
- ❖ Kawasan Lindung tersebar di BWK II, VI, VIII, dan IX

### C. Kebijakan Tata Ruang BWK VI (Kecamatan Tembalang)

#### a. Fungsi dan Peran BWK VI

Fungsi dan peran BWK VI adalah :

- ❖ Fungsi permukiman,
- ❖ Fungsi pendidikan,
- ❖ Fungsi perdagangan dan jasa,
- ❖ Fungsi perkantoran, dan
- ❖ Fungsi campuran (permukiman, perkantoran, dan jasa)

#### b. Rencana Tata Guna Tanah

Rencana penggunaan tanah di Kecamatan Tembalang meliputi:

- ❖ Penggunaan tanah untuk permukiman direncanakan di seluruh Kel. Rowosari, sebagian besar Kel. Kramas, Bulusan, Mateseh, Jangli, Sambiroto, Mangunharjo, Sendangmulyo, Tandang, sebagian Kel. Tembalang, Sendangguwo, dan Kedungmundu.
- ❖ Penggunaan Tanah untuk fasilitas pendidikan, kesehatan, rekreasi, makam, olahraga, perkantoran, dan sub terminal direncanakan di Kel. Tembalang, Mangunharjo, Bulusan, Sendangguwo, Kedungmundu, Tandang, Sendangmulyo, dan Kel. Kramas.
- ❖ Penggunaan tanah untuk perdagangan dan jasa direncanakan di Kel. Kedungmundu, Sendangmulyo, dan Mangunharjo.
- ❖ Penggunaan tanah untuk campuran direncanakan di Kel. Bulusan, Mateseh, Mangunharjo, Sendangmulyo, Kedungmundu, Sambiroto dan Sendangguwo.
- ❖ Penggunaan tanah untuk konservasi direncanakan di Kel. Kramas, Bulusan, Tembalang, Mangunharjo, Rowosari, Sambiroto, Kedungmundu, dan Jangli.

#### D. Kebijakan Tata Ruang BWK VII (Kecamatan Banyumanik)

##### a. Fungsi dan Peran BWK VII

Fungsi dan peran BWK VII adalah :

- ❖ Fungsi Permukiman perkotaan
- ❖ Fungsi pendidikan
- ❖ Fungsi perdagangan dan jasa
- ❖ Fungsi Kawasan Militer
- ❖ Fungsi Campuran (Permukiman, perkantoran, perdagangan, dan jasa)

##### b. Rencana Tata Guna Tanah

Rencana penggunaan tanah di Kecamatan Banyumanik meliputi:

- ❖ Penggunaan tanah untuk permukiman perkantoran direncanakan di Kel. Tinjomoyo, Ngesrep, Sumurboto, Pedalangan, Jabung, Gedawang, Pudukpayung, Banyumanik, Padangsari, dan Srdol Wetan.
- ❖ Penggunaan tanah untuk fasilitas pendidikan, rekreasi, makam, perkantoran dan sub terminal direncanakan di Kel. Sumurboto, Srdol Kulon, Tinjomoyo, Banyumanik, dan Srdol Wetan.
- ❖ Penggunaan Tanah untuk Perdagangan dan Jasa direncanakan di Kel. Tinjomoyo dan Ngesrep.
- ❖ Penggunaan tanah untuk campuran direncanakan di Kel. Ngesrep, Tinjomoyo, Sumurboto, Srdol Kulon, Srdol Wetan, Pandangsari, Banyumanik dan Pudukpayung.
- ❖ Penggunaan tanah untuk konservasi direncanakan di Kel. Pudukpayung, Gedawang, Jabung, Banyumanik, Padangsari, Pedalangan, dan Ngesrep.

- ❖ Penggunaan Tanah untuk Pertanian direncanakan di Kel. Pudukpayung dan Jabungan.
- ❖ Penggunaan Tanah untuk Kawasan Militer direncanakan di Kel. Srondoi Kulon, Pudukpayung dan Banyumanik.

#### E. Kebijaksanaan Tata Ruang BWK VIII (Kecamatan Gunungpati)

##### a. Fungsi dan peran BWK VIII

Fungsi dan peran BWK VIII adalah:

- ❖ Fungsi Konservasi
- ❖ Fungsi Permukiman
- ❖ Fungsi Wisata/Rekreasi
- ❖ Fungsi Pendidikan
- ❖ Fungsi Perdagangan dan Jasa
- ❖ Fungsi Campuran, dan
- ❖ Fungsi Perkantoran.

##### b. Rencana Tata Guna Lahan

Rencana penggunaan tanah di Kecamatan Gunungpati meliputi:

- ❖ Penggunaan tanah untuk permukiman direncanakan di Kel. Sadeng, Sukorejo, Kalisegoro, Sekaran, Patemon, Ngijo, Mangunsari, Pakintelan, Sumurrejo, Plalangan, Gunungpati, Cepoko, Nongkosawit, Kandri, Pongangan, dan Jatirejo.
- ❖ Penggunaan tanah untuk fasilitas pendidikan, rekreasi, dan sub terminal direncanakan di Kel. Sekaran dan Gunungpati.
- ❖ Penggunaan tanah untuk perdagangan dan jasa direncanakan di Kel. Gunungpati.
- ❖ Penggunaan tanah untuk campuran direncanakan di Kel. Gunungpati, Patemon, Sumurrejo, dan Plalangan.

- ❖ Penggunaan tanah untuk Konservasi direncanakan di Kel. Pongangan, Nongkosawit, Pakintelan, Patemon, dan Sekaran.
- ❖ Penggunaan tanah untuk pertanian direncanakan di Kel. Kandri, Pongangan, Sukorejo, sekaran, Kalisegoro, Patemon, Pakintelan, Sumurrejo, Plalangan, Gungunpati, Nongkosawit, Jatirejo, dan Cepoko.
- ❖ Penggunaan tanah untuk Tegalan direncanakan di Kel. Sadeng, Sukorejo, Kandri, Pongangan, Sekaran, Kalisegoro, Patemon, Nongkosawit, Jatirejo, Pakintelan, dan Sumurrejo.

### **3.5.2 Kebijakan Tata Ruang Kabupaten Semarang**

#### **a. Strategi Pengembangan Kawasan Prioritas**

Kawasan prioritas di wilayah Kabupaten Semarang dibedakan menjadi dua, yaitu kawasan strategis yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi dan kawasan khusus yang memerlukan penanganan tersendiri. Penanganan kawasan khusus diarahkan pada pengembangan dan penanganan terhadap kawasan-kawasan dengan karakteristik tertentu, diantaranya kawasan khusus adalah kawasan perbatasan. Strategi pengembangan dan penanganan kawasan perbatasan diarahkan pada penguatan kegiatan perekonomian dan pelayanan di kawasan ini sehingga dapat mengurangi ketergantungan pelayanan dan pasar pada daerah lain, selain dapat menjadi pusat pelayanan bagi wilayah sekitarnya.

#### **b. Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung di Kecamatan Ungaran**

##### **1. Kawasan yang melindungi kawasan bawahnya**

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahnya terdiri atas kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air.

Kawasan yang termasuk dalam kategori kawasan hutan lindung di Kecamatan Ungaran berjumlah sekitar 3.910 Ha atau sekitar 52,88% yang tersebar di daerah kerucut Gunung Ungaran yaitu meliputi sebagian besar Kecamatan Ungaran.

Perlindungan terhadap kawasan resapan air diarahkan pada daerah tubuh Gunung Ungaran terutama daerah-daerah dengan kelerengan diatas 25%.

## 2. Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan Sepadan Sungai meliputi kawasan sepanjang kiri dan kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai, yaitu sekurang-kurangnya 100 meter di kiri dan kanan sungai besar dan 50 meter di kiri dan kanan sungai kecil di luar kawasan permukiman. Kawasan perlindungan sepadan sungai di Kecamatan Ungaran meliputi Sungai Garang dengan daerah perlindungan meliputi kawasan sepanjang kanan kiri sungai sekurang-kurangnya 100 meter dari tepi sungai.

## 3. Kawasan Rawan Bencana

Di wilayah Kecamatan Ungaran, penyebaran kawasan rawan bencana gerakan tanah ini meliputi Gunung Ungaran bagian timur Desa Gebungan, Gogik, Sepanjang Sungai Garang, Desa Susukan (S. Gading).

Untuk lebih jelasnya, **Peta Rawan Bencana, Peta Sepadan Sungai dan Peta Sepadan Mata Air** dapat dilihat pada **Gambar 3.1, Gambar 3.2 dan Gambar 3.3.**

### c. Rencana Struktur Tata Ruang Wilayah

Kecamatan Ungaran termasuk dalam Wilayah Pengembangan (WP) 1 dan terbagi lagi menjadi 2 Satuan Wilayah Pengembangan (SWP), yaitu:

- ❖ SWP I yaitu meliputi wilayah Kecamatan Ungaran. Wilayah ini akan berkembang menjadi kawasan perkotaan, sehingga penanganannya diarahkan pada pengelolaan

perkotaan dengan memperhatikan keberadaan kawasan fungsi lindung di sekitarnya. Arah kegiatan di SWP ini adalah sebagai pusat pelayanan, pusat permukiman, kegiatan rekreasi, kegiatan perdagangan, kegiatan industri pada sekitar jalur arteri primer, dan pertanian pada kawasan pinggiran. Pusat pelayanan SWP ini adalah Kota Ungaran dan Babadan.

- ❖ SWP II yaitu meliputi Kecamatan Bergas dan Pringapus. Arah kegiatan SWP ini adalah kegiatan industri, pusat permukiman, dan pertanian. Pengelolaan kawasan diarahkan pada usaha keterpaduan antar fungsi (terutama industri, permukiman, dan pertanian) dalam kawasan perkotaan. Pusat pelayanan SWP ini adalah Kota Bergas dan Kota Pringapus

### **3.6 Kecenderungan Perubahan Tata Guna Lahan**

Kawasan perbatasan antara Kota Semarang dengan Kabupaten Semarang mewadahi berbagai kegiatan penduduknya. Sesuai dengan kondisi sosial kependudukan, dapat diketahui adanya kecenderungan perubahan kegiatan. Mula-mula kegiatan penduduk bersifat agraris dan homogen, pada perkembangannya berubah dan bertambah dengan kegiatan-kegiatan yang lebih kompleks. Kegiatan-kegiatan tersebut berupa kegiatan kekotaan, sesuai dengan perubahan dan perkembangan sosial penduduk yang disebut sebagai transformasi sosial. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel III. 9 Perubahan Penggunaan Lahan dan tabel III. 10 Pola Penggunaan Lahan di Wilayah Perbatasan.

**TABEL III. 9**  
**PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN**  
**DI WILAYAH PERBATASAN KOTA SEMARANG DENGAN KABUPATEN**  
**SEMARANG**

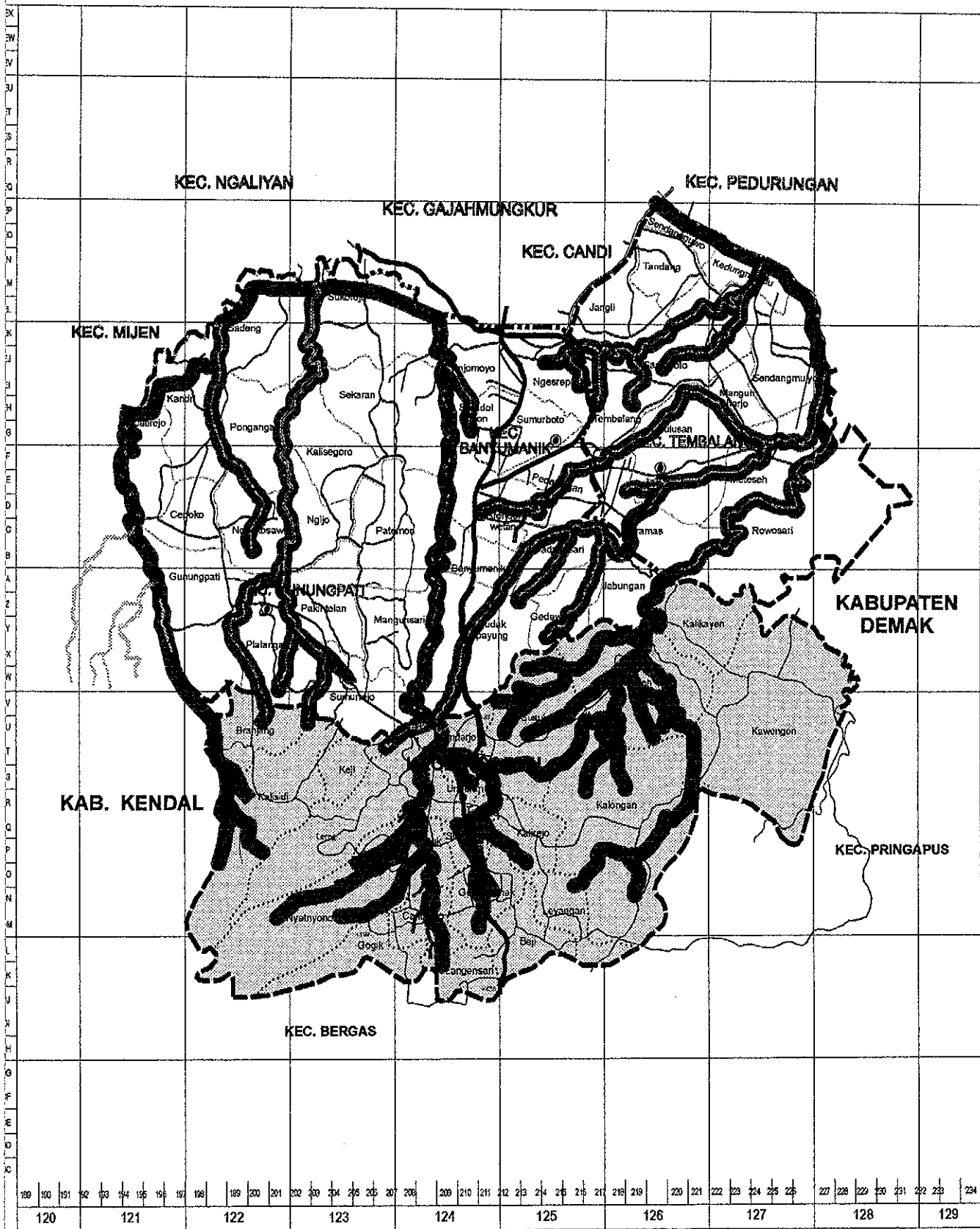
NO	Jenis penggunaan lahan	Kota Semarang						Juml. Peruba (Ha)	Kab. Semarang		Juml. Perub (Ha)
		Tembalang		Banyumanik		Gunungpati			Ungaran		
		1994	1998	1994	1998	1994	1998		1994	1998	
1	Perumahan	918,32	934,53	1472,06	1497,86	473,08	484,06	53	1319.39	1362.28	44,05
2	Komersial	3,7	3,7	14,98	14,98	21,12	21,12	0	0	0	0
3	Industri & pergudangan	0	0	23,77	23,77	0	0	0	45.83	46.99	0
4	Jasa	53,23	53,23	33,74	33,74	135,53	135,53	0	0	0	0
5	Tidak ada Bangunan	2274,65	2258,44	1203,5	1177,69	5054,27	5043,29	-53	5698.33	5654.28	-44,05
6	Taman	0,09	0,09	0,73	0,73	0	0	0	0	0	0
7	Lain-lain	460,8	460,8	80,17	80,17	218,19	218,19	0	330.34	330.34	0
Jumlah		3.710,79	3.710,79	2.828,94	2.828,94	5.902,19	5.902,19	53	7393.89	7393.89	44,05

Sumber: Hasil kajian, 2001

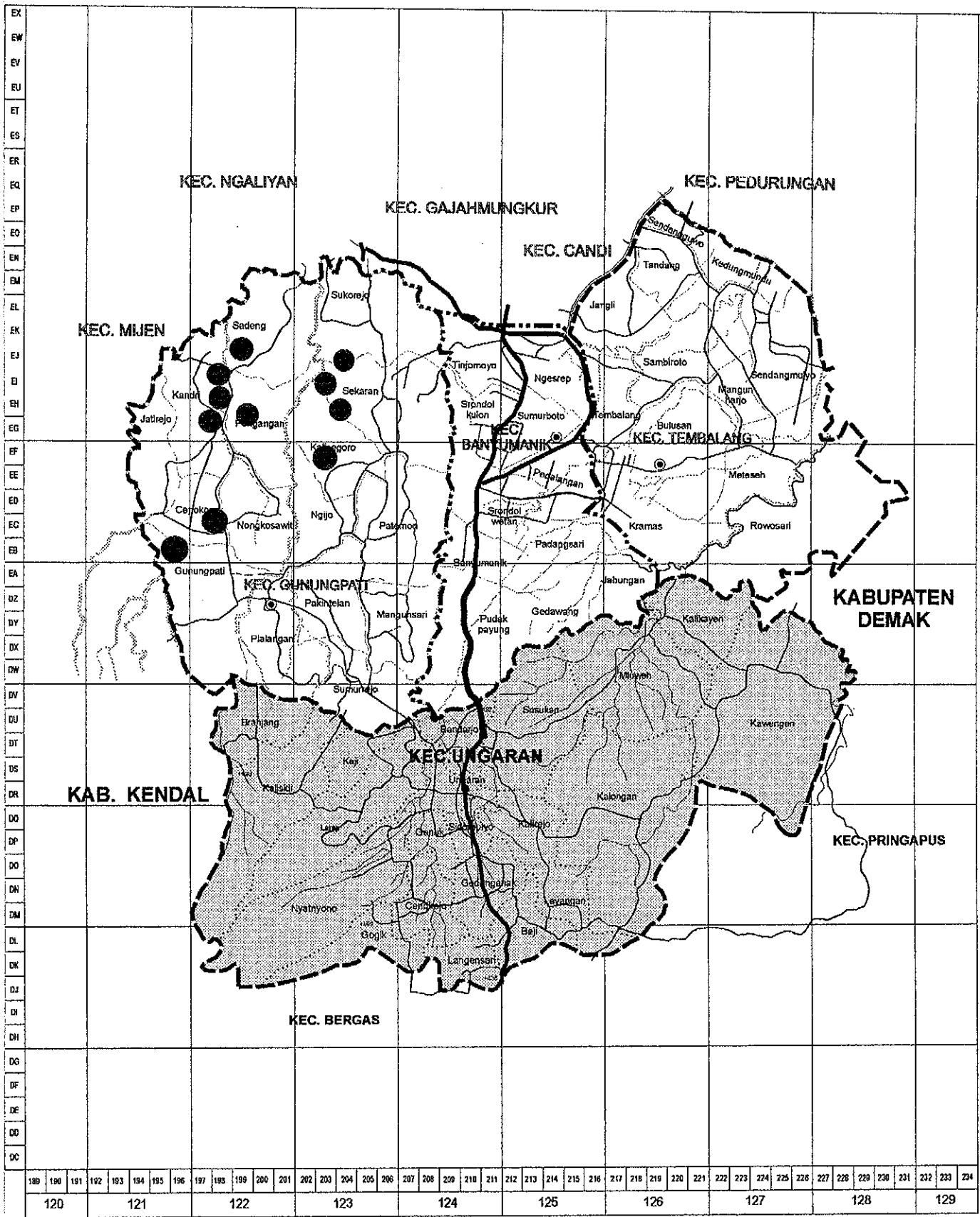
**TABEL III.10**  
**POLA PENGGUNAAN LAHAN**  
**DI WILAYAH PERBATASAN KOTA SEMARANG DENGAN KABUPATEN**  
**SEMARANG**

N O	Kriteria	Kajian masing-masing daerah		Kajian Perbandingan
		Kec. Banyumanik, Tembalang & Gunungpati	Kec. Ungaran	
1	Jenis Penggunaan lahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Dominan lahan yang tidak ada bangunan</li> <li>❖ Penggunaan lahan di Kec. Banyumanik dominan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Dominan lahan yang tidak ada bangunan</li> <li>❖ Penggunaan lahan perkotaan terdapat di Kota Ungaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Ciri wilayah dengan aktivitas non perkotaan</li> <li>❖ Potensi wilayah untuk berkembang sangat besar</li> <li>❖ Penyediaan lahan yang masih luas</li> <li>❖ Lahan untuk perumahan menunjukkan adanya aktivitas perkotaan dan sebagai pendorong perkembangan wilayah</li> </ul>
2	Intensitas Penggunaan lahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 8.479,42 Ha atau 68,2 % untuk lahan tidak ada bangunan</li> <li>❖ 2.916,45 Ha atau 23,44% untuk perumahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 5.654,28 Ha atau 76,47% untuk lahan yang tidak ada bangunan</li> <li>❖ 1.362,28 Ha atau 18,43% untuk perumahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Lahan tidak ada bangunan menunjukkan potensi fungsi konservasi, penyangga dan cadangan pengembangan wilayah</li> <li>❖ Keberadaan penggunaan lahan perumahan sebagai pendorong perkembangan wilayah studi</li> </ul>
3	Sebaran penggunaan lahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Wilayah Tembalang dan Gunungpati masih dominan lahan tidak ada bangunan</li> <li>❖ Prosentase terbesar penggunaan lahan perumahan ada di Banyumanik yaitu 1.497,86 Ha atau 12,04% dari luas lahan di wilayah perbatasan kota Semarang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Wilayah Ungaran didominasi oleh lahan yang tidak ada bangun</li> <li>❖ Penggunaan lahan yang mencirikan aktivitas perkotaan tumbuh di Kota Ungaran (kel. Ungaran, Bandarjo, Genuk, Gedanganak, Leyangan dan Sidomulyo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Kec. Ungaran, Tembalang dan Gunungpati mencirikan aktivitas non perkotaan yang dominan, penggunaan lahan perumahan tidak kompak dan berfungsi sebagai cadangan pengembangan, fungsi penyangga dan konservasi</li> <li>❖ Wilayah Kec. Banyumanik dan Kota Ungaran mencirikan aktivitas perkotaan dan menunjukkan pola penggunaan lahan yang kompak sehingga berfungsi mendorong perkembangan penggunaan lahan lainnya.</li> </ul>

Sumber: Hasil Kajian, 2001



MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO  BERTUK KERJASAMA PENGELOLAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERIKANAN DI PERBATASAN KOTA SEMARANG DENGAN KABUPATEN SEMARANG	Batas Kabupaten Batas Kecamatan Jalan Batas Desa	Rel Kereta Api Sungai Kota Semarang Kabupaten Semarang	Sepadan Sungai	<b>SUMBER</b> Peta Topografi Angkatan Darat, US Th. 1994 Direktorat Tata Kota dan Tata Daerah, Dinas Cipta Karya DPU
	<b>PETA</b> <b>SEPADAN SUNGAI</b>		<b>SKALA</b> 1 : 165.000	<b>GAMBAR</b> 3.1



MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA  
 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO

BENTUK KERASAMA PENGELOLAAN PEMBANGUNAN  
 KAWASAN PERKOTAAN DI PERBANTARAN  
 DIA SEMARANG DENGAN KABUPATEN SEMARANG

**PETA  
 SEPAPAN MATA AIR**

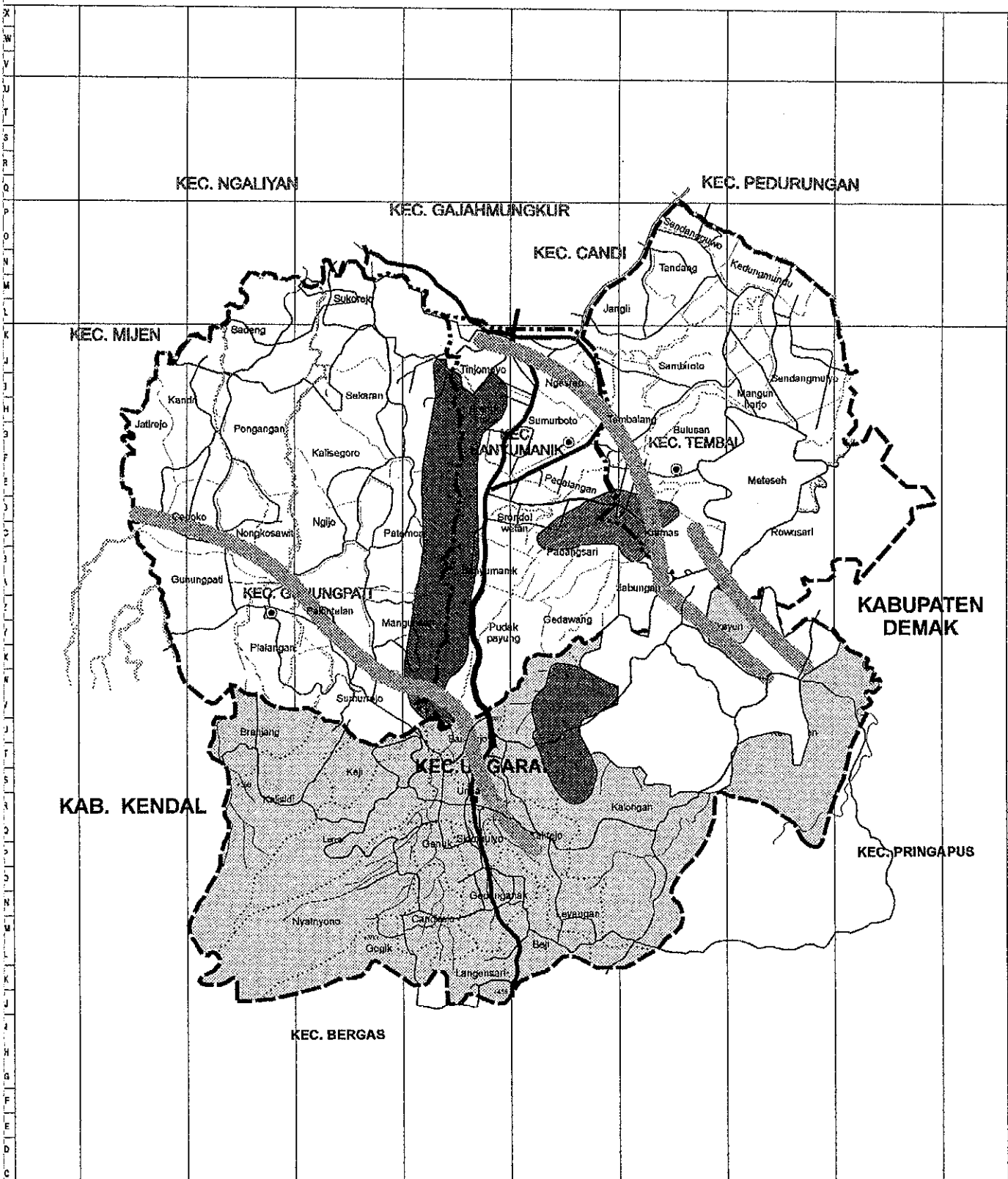
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Jalan
- Batas Desa
- Rel Kereta Api
- Sungai
- Kota Semarang
- Kabupaten Semarang
- Sepadan Mata Air

**SUMBER**  
 Peta Topografi & Angkutan Darat, US Th. 1994  
 Divisi Road Taka Kolek dan Taka Darat, Ojor Cipta Karya DPU

<b>SKALA</b> 1 : 165.000	<b>CAMBAR</b> 3.2
-----------------------------	----------------------

0 165 330 Km

N  
 W — E



188	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234
120	121					122					123					124					125					126					127					128					129				

MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO

MIUK KERJASAMA PENGELOLAAN PEMBANGUNAN  
KAWASAN PERKOTAAN DI PERIBASAN  
SEMARANG DENGAN KABUPATEN SEMARANG

**PETA  
RAWAN BENCANA**

Batas Kabupaten	Rel Kereta Api	Sepadang Sesar
Batas Kecamatan	Sungai	Daerah Rawan Gerakan Tanah
Jalan	Kota Semarang	Daerah Rawan Longsoran
Batas Desa	Kabupaten Semarang	

**SUMBER**  
Peta Topografi Angkatan Darat, US 7h, 1994  
Direktorat Tata Kota dan Tata Daerah, Dejen Cipta Karya DPU

<b>SKALA</b> 1 : 165.000	<b>GAMBAR</b> 1.2
-----------------------------	----------------------

0 165 330 Km

**BAB IV**  
**ANALISIS DAN BENTUK KERJA SAMA PENGELOLAAN**  
**PEMBANGUNAN KAWASAN PERKOTAAN DI PERBATASAN**  
**KOTA DAN KABUPATEN SEMARANG**

**4.1 Analisis Kerja Sama Pengelolaan Pembangunan**

**4.1.1 Alternatif Bentuk Kerja Sama Pengelolaan Pembangunan**

Alternatif bentuk kerja sama pengelolaan pembangunan kawasan perkotaan diperbatasan sebagaimana dalam teorinya Faulkner dan Cliff Bouman (Bab II), tentunya akan memberikan beban dan manfaat bagi pemerintah kota dan pemerintah kabupaten. Dibawah ini akan diuraikan alternatif bentuk kerja sama pengelolaan pembangunan kawasan perkotaan diperbatasan antara Kota Semarang dengan Kabupaten Semarang.

**A. Usaha Patungan Terfokus**

Usaha Patungan adalah pembentukan suatu badan usaha baru yang terpisah secara hukum dari perusahaan para mitra usaha. Normalnya, badan usaha baru itu memulai usaha dengan anggota mitranya sebagai pemegang saham dan dengan tujuan yang telah disepakati dalam area kegiatan tertentu. Jadi Pemerintah Daerah Otonom A dapat membentuk usaha patungan dengan Pemerintah Daerah Otonom B. Kemitraan ini menyediakan keuangan dan kemampuan serta sumberdaya pendukung lain bagi usaha patungan tersebut dalam jumlah yang disepakati. Kemudian kedua Pemerintahan Daerah Otonom tersebut dapat membentuk badan usaha baru yang mandiri sepenuhnya, dengan pegawai dan tujuan strategik yang dimiliki sendiri, terpisah dari induknya (dalam hal ini Pemerintah Daerah Otonom A dan B).

Terfokus, adalah suatu penataan dua daerah otonom yang dibentuk untuk menghadapi satu set situasi yang terdefinisi dengan jelas dengan cara khusus. Normalnya,

aliansi ini melibatkan tiap mitra yang hanya dengan satu fungsi atau kegiatan yang besar. Misalnya Pemerintah Daerah Otonom A dalam usaha memanfaatkan suatu potensi di daerah otonom B dapat membentuk aliansi atau kerja sama dengan Pemerintah Daerah setempat. Sifat dari aliansi ini terfokus pada saling pengertian dan pemahaman yang jelas akan kontribusi dan penghargaan terhadap hasil kerja masing-masing.

Jadi Secara singkat dapat dikatakan bahwa Usaha Patungan Terfokus adalah suatu lembaga yang melibatkan pembentukan badan usaha baru yang terpisah secara hukum dari pemerintah daerah masing-masing untuk menghadapi suatu set situasi yang terdefinisi dengan jelas dengan cara khusus dan hanya menangani satu fungsi.

### **B. Usaha Patungan Kompleks**

Uraian dari Usaha Patungan Kompleks ini hampir sama dengan uraian di atas. Dalam Usaha Patungan Kompleks ini dapat melibatkan mata rantai biaya kegiatan selengkapnyanya dari para anggotanya. Daerah-daerah otonom yang terlibat dalam aliansi itu menyadari bahwa bersama-sama mereka dapat membentuk badan usaha kompetitif yang secara potensial jauh lebih kuat dibanding jika mereka berdiri sendiri-sendiri. Jika aliansi terfokus antara daerah otonom A dengan daerah otonom B berjalan sukses maka akan berkembang menjadi aliansi kompleks. Kerja sama mereka tidak hanya terfokus pada pemanfaatan potensi semata tetapi berkembang pada bidang-bidang lain seperti penelitian, tenaga kerja dan pengembangan pemasaran.

Jadi secara ringkas dapat diartikan bahwa Usaha Patungan Kompleks melibatkan pembentukan suatu badan usaha baru yang terpisah secara hukum dari pemerintah daerah masing-masing dan kerjsama mereka tidak hanya terfokus pada satu bidang tetapi berkembang pada bidang-bidang lain.

### **C. Kolaborasi Terfokus**

Bentuk aliansi kolaborasi digunakan jika para anggota tidak ingin membentuk badan usaha patungan yang terpisah dari badan usaha induk milik masing-masing mitra, yang akan menyebabkan adanya batas-batas dalam hubungan di antara mereka dalam menghadapi satu bidang kerja sama yang telah terdefinisi dengan jelas dengan cara khusus dan hanya menangani satu fungsi.

### **D. Kolaborasi Kompleks**

Kolaborasi kompleks, sama dengan uraian di atas. Perbedaannya bahwa Kolaborasi kompleks dengan jelas menangani banyak bidang yang dikerjakan samakan sebagai bentuk kerja sama di semua bidang.

#### **4.1.2 Penyusunan Hierarki Beban dan Manfaat Alternatif Kerja Sama**

Hierarki untuk penilaian alternatif bentuk kelembagaan pengelolaan pembangunan kota disusun dalam dua bagian yaitu hierarki beban dan manfaat. Penyusunan hierarki tersebut didasarkan pada kajian kekurangan dan kelebihan dari masing-masing daerah.

Untuk mengetahui beban dan manfaat kerja sama dicari dengan menggunakan matrik silang kekurangan dan kelebihan masing-masing mitra kerja sama sebagai berikut:

(Tabel IV. 1)

**TABEL IV.1**  
**MATRIK SILANG KEKURANGAN DAN KELEBIHAN KAWASAN**  
**PERBATASAN KOTA SEMARANG DENGAN KABUPATEN SEMARANG**

SUMBER BAPPEDA		KOTA SEMARANG	KABUPATEN SEMARANG		SUMBER BAPPEDA
PEMBANGUNAN	+	1.Potensi konsumen yang besar untuk pemasaran SDA (air) 2. Memiliki Tempat Pembuangan Akhir Sampah 3.Aktivitas perekonomian yang besar untuk menambah PAD	1.Luas kawasan besar dengan jumlah penduduk kecil 2.Pembangunan pemukiman mengarah ke kawasan lindung 3.kurangnya investor	-	PEMBANGUNAN
	-	1. Kurangnya Sumber Daya Alam (air) 2.Lahan pengembangan perumahan terbatas 3.Harga lahan mahal untuk pembangunan infrastruktur perkotaan	1.Memiliki SDA yang berlebih 2.Lahan pengembangan perumahan yang relatif masih luas. 3.Lahan Pengembangan infrastruktur masih cukup luas	+	
PEMERINTAHAN	+	1.Sudah terbentuknya lembaga yang mengurus wilayah perbatasan 2.Adanya keterpaduan peraturan kota	1.Belum adanya lembaga yang menangani kawasan perbatasan 2.Lemahnya Penanganan Program Kawasan Perbatasan	-	PEMERINTAHAN
	-	1.lemahnya koordinasi antar kabupaten/kota 2.Kurang terkoordinasikan tugas pemerintahan dalam pengembangan wilayah 3.Batas wilayah masih kabur dan belum terbangun	1.Kompleksitas pembangunan kota yang bisa diatasi 2.Efektifitas tugas pemerintah 3.Penetapan batas wilayah & pengembangan kaw. Perkotaan	+	

MASYARAKAT	+	1. Jumlah penduduk yang masih sedikit di kawasan perbatasan 2. Adanya sinergi pemerintah dan swasta untuk mengembangkan kawasan perbatasan 3. Adanya konsumen yang besar untuk bisa menampung hasil produksi	1. profesionalisme Aparat pemerintah dalam pelayanan masyarakat kurang 2. Masyarakatnya masih bersifat rural	-	MASYARAKAT
	-	1. Persebaran fasos dan fasum belum sesuai dengan luas wilayah 2. Kurangnya Tenaga kerja 3. Pengembangan ekonomi kota mengarah ke kawasan lindung	1. Jumlah fasilitas Pelayanan Masyarakat tersebar luas 2. Tenaga kerja yang berlebih dan murah 3. Masih memiliki lahan pengembangan yg luas dengan fasilitasnya memacu untuk investasi/perdagangan.	+	

Sumber : Bappeda Kota & Kabupaten Semarang, 2001

Hasil identifikasi keunggulan dan keterbatasan di atas kemudian dicari beban dan manfaat dari masing-masing bidang dengan pengkajian faktor-faktor kerjasama. Untuk lebih jelasnya lihat **Tabel IV. 2 dan Tabel IV. 3 Kerja Sama Antara Kota Semarang Dengan Kabupaten Semarang**

**TABEL IV.2**  
**KERJA SAMA ANTARA KOTA SEMARANG DENGAN KAB. SEMARANG**

	<b>Pembangunan</b>	<b>Pemerintahan</b>	<b>Masyarakat</b>
<p style="text-align: center;"><b>Kekurangan Kota Semarang</b></p> <p><b>Kelebihan Kabupaten Semarang</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya Sumber Daya Alam (air)</li> <li>2. Lahan pengembangan perumahan terbatas</li> <li>3. Harga lahan mahal untuk pembangunan infrastruktur perkotaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lemahnya koordinasi antar kabupaten/kota</li> <li>2. Kurang terkoordinasikan tugas pemerintahan dalam pengembangan wilayah</li> <li>3. Batas wilayah masih kabur dan belum terbangun</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persebaran fasos dan fasum belum sesuai dengan luas wilayah</li> <li>2. Kurangnya Tenaga kerja</li> <li>3. Pengembangan ekonomi kota mengarah ke kawasan lindung</li> </ol>
<p><b>Pembangunan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki SDA yang berlebih</li> <li>2. Lahan pengembangan perumahan yang relatif masih luas</li> <li>3. Lahan Pengembangan infrastruktur masih cukup luas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komponen SDA (air)</li> <li>2. Komponen Perumahan yang relevan (harga tanah, areal pemukiman, nilai sewa tanah, dll)</li> <li>3. Komponen Infrastruktur (DAS, Jalan Tol, Transportasi, dll)</li> </ol>		
<p><b>Pemerintahan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompleksitas pembangunan kota yang bisa diatasi</li> <li>2. Efektifitas tugas pemerintah</li> <li>3. Penetapan batas wilayah &amp; pengembangan kaw. Perkotaan</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelembagaan pengelola pembangunan</li> <li>2. Koordinasi dan pengendalian pembangunan</li> <li>3. Hukum &amp; administrasi</li> </ol>	
<p><b>Masyarakat</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah fasilitas Pelayanan Masyarakat tersebar luas</li> <li>2. Tenaga kerja yang berlebih dan murah</li> <li>3. Masih memiliki lahan pengembangan yg luas dengan fasilitasnya memacu untuk investasi/perdagangan.</li> </ol>			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan Umum</li> <li>2. Ketenaga kerjaan</li> <li>3. Peningkatan investasi industri/perdagangan</li> </ol>

Sumber : Analisis Wilayah, 2002

**TABEL IV.3**  
**KERJA SAMA ANTARA KOTA SEMARANG DENGAN KAB. SEMARANG**

	Pembangunan	Pemerintahan	Masyarakat
<b>Kekurangan</b> <b>Kabupaten Semarang</b>	<b>Kelebihan</b> <b>Kota Semarang</b>	1. Sudah terbentuknya lembaga yang mengurus wilayah perbatasan 2. Adanya keterpaduan peraturan kota	1. Jumlah penduduk yang masih sedikit di kawasan perbatasan 2. Adanya sinergi pemerintah dan swasta untuk mengembangkan kawasan perbatasan 3. Adanya konsumen yang besar untuk bisa menampung hasil produksi
	1. Potensi konsumen yang besar untuk pemasaran SDA (air) 2. Memiliki Tempat Pembuangan Akhir Sampah 3. Aktivitas perekonomian yang besar untuk menambah PAD	1. Tekanan Penduduk 2. Pengaturan dan penataan tata ruang 3. Pengeluaran pembangunan	
	1. Luas kawasan besar dengan jumlah penduduk kecil 2. Pembangunan pemukiman mengarah ke kawasan lindung 3. kurangnya investor	1. Penyiapan aparatur pemerintahan dan fasilitasnya 2. Peraturan kota/kabupaten	
<b>Pembangunan</b>	1. Belum adanya lembaga yang menangani kawasan perbatasan 2. Lemahnya Penanganan Program Kawasan Perbatasan		1. Peningkatan fasos dan fasum 2. Pembinaan Masyarakat 3. Meningkatkan kesenjangan /konflik sosial.
<b>Pemerintahan</b>	1. profesionalisme Aparat pemerintah dalam pelayanan masyarakat kurang 2. Masyarakatnya masih bersifat rural		

Sumber : Analisis Wilayah, 2002

Apabila uraian tabel di atas dirangkum, maka rangkuman faktor-faktor beban dan manfaat bentuk kerja sama adalah sebagai berikut:

**TABEL IV.4**  
**BEBAN DAN MANFAAT KERJA SAMA**

BIDANG	MANFAAT	BEBAN
Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komponen Sumber Daya Alam</li> <li>• Komponen Perumahan dan permukiman</li> <li>• Komponen Infrastruktur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tekanan Penduduk.</li> <li>• Pengaturan dan penataan Tata Ruang.</li> <li>• Pengeluaran pembangunan.</li> </ul>
Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelembagaan pengelola pembangunan.</li> <li>• Koordinasi dan pengendalian pembangunan.</li> <li>• Hukum dan administrasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyiapan aparatur pemerintahan dan fasilitasnya.</li> <li>• Peraturan kota/kabupaten.</li> </ul>
Kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan Umum</li> <li>• Ketenaga kerjaan</li> <li>• Peningkatan investasi industri/perdagangan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan fasos dan fasum.</li> <li>• Pembinaan masyarakat.</li> <li>• Meningkatnya kesenjangan / konflik sosial.</li> </ul>

Sumber : Hasil analisis responden, 2001

Dari keempat alternatif bentuk kerja sama pengelolaan pembangunan kawasan perkotaan di perbatasan, hierarki beban dan manfaat masing-masing disusun atas empat tingkatan sebagai berikut:

- a. Tingkat I. Fokus: merupakan tujuan diaplikasikannya metode proses hierarki analitik yang terdiri dari beban dan manfaat.
- b. Tingkat II. Bidang: merupakan pengelompokan bidang-bidang tugas pemerintahan berupa ketataprajaan (pemerintahan), administrasi pembangunan (pembangunan) dan kesejahteraan sosial (kemasyarakatan).

- c. Tingkat III. Faktor: yang merupakan penjabaran dari masing-masing bidang, diturunkan dari kelebihan dan kekurangan masing-masing Kabupaten dan kota serta melalui beberapa modifikasi, yang dikaji melalui beberapa pertanyaan yang diajukan ke Bappeda Kabupaten dan Kota Semarang.
- d. Tingkat IV. Alternatif: merupakan pilihan yang akan dipertimbangkan untuk pengelolaan pembangunan kawasan perkotaan di perbatasan yang berasal dari kajian teori.

#### **4.1.2.1 Hierarki Beban Alternatif Kerja Sama**

Berikut ini uraian dari masing-masing tingkat hierarki beban kerja sama pengelolaan pembangunan kawasan perkotaan.

##### **a. Fokus**

Beban Kerja sama pengelolaan pembangunan (A) kawasan perkotaan di perbatasan antara Kota Semarang dengan Kabupaten Semarang dalam rangka mewujudkan tujuan serta sesuai dengan fungsi dan perannya sebagai pusat pertumbuhan wilayah.

##### **b. Bidang**

Pembangunan (B2). Beban kerja sama pengelolaan pembangunan ditinjau dari sisi Pembangunan meliputi: Tekanan jumlah penduduk, Penataan dan pengaturan tata ruang, dan Peningkatan pengeluaran pembangunan.

Pemerintahan (C2). Beban kerja sama pengelolaan pembangunan ditinjau dari sisi Pemerintahan meliputi: Penyiapan aparatur pemerintah dan fasilitasnya, dan Peraturan kota/kabupaten.

Kemasyarakatan (D2). Beban kerja sama pengelolaan pembangunan ditinjau dari sisi Kemasyarakatan meliputi: Peningkatan kualitas Fasos dan fasum, Pembinaan masyarakat, dan meningkatnya kesenjangan/konflik sosial.

### c. Faktor

Tekanan jumlah penduduk (**B2.1**). Beban akibat meningkatnya jumlah penduduk kawasan sehingga membawa tekanan terhadap lingkungan fisik seperti: bertambahnya luas areal terbangun, areal pemukiman dan kepadatan penduduk, serta tekanan terhadap lingkungan non fisik serta lapangan kerja dan fasilitas utilitas kota.

Pengaturan dan penataan tata ruang (**B2.2**). Beban yang diakibatkan perubahan dan penataan serta pengaturan kembali tata ruang kota, pemukiman dan kawasan pinggiran.

Pengeluaran pembangunan (**B2.3**). Beban keuangan yang ditanggung pemerintah daerah untuk proyek-proyek khusus yang dialokasikan bagi pembangunan kawasan perkotaan di perbatasan.

Penyiapan aparatur pemerintah dan fasilitasnya (**C2.1**). Beban yang ditanggung pemerintah untuk mempersiapkan aparatur pemerintahan yang mempunyai kemampuan manajerial dan teknis untuk pengelolaan pembangunan serta mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang.

Peraturan kota/kabupaten (**C2.2**). Beban untuk merubah, membuat, menetapkan dan memasyarakatkan peraturan perundang-undangan untuk menata, mengatur dan mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan.

Peningkatan kualitas Faso dan Fasum (**D2.1**). Beban untuk memenuhi kebutuhan penduduk kota yang terus meningkat, seperti fasilitas sosial dan fasilitas umum.

Pembinaan Masyarakat (**D2.2**). Beban untuk membina dan mensosialisasikan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan kawasan perkotaan di perbatasan.

Meningkatnya kesenjangan/konflik sosial (D2.3). Beban yang ditanggung untuk masyarakat kawasan perkotaan yang bersifat heterogen sebagai akibat bertambahnya jumlah penduduk dan kawasan industri.

#### **d. Alternatif**

Usaha Patungan Terfokus (E1). Melibatkan pembentukan suatu badan usaha baru yang terpisah secara hukum dari pemerintah daerah untuk menghadapi satu set situasi yang terdefinisi dengan jelas dengan cara khusus dan hanya menangani satu fungsi.

Usaha Patungan Kompleks (F1). Melibatkan pembentukan suatu badan usaha baru yang terpisah secara hukum dari pemerintah daerah, dan kerjasama mereka tidak hanya terfokus pada satu bidang semata tetapi berkembang pada bidang-bidang lain.

Kolaborasi Terfokus (G1). Jika para anggota tidak ingin membentuk badan usaha baru yang terpisah dari masing-masing pemerintah daerah, untuk menghadapi satu set situasi yang terdefinisi dengan jelas dengan cara khusus dan hanya menangani satu fungsi.

Kolaborasi Kompleks (H1). Jika para anggota tidak ingin membentuk badan usaha baru yang terpisah dari masing-masing pemerintah daerah, dan kerjasama mereka tidak hanya terfokus pada satu bidang semata tetapi berkembang pada bidang-bidang lain.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Gambar 4. 1 Beban Kerja Sama Pengelolaan Pembangunan.**

#### **4.1.2.2 Hierarki Manfaat Alternatif Kerja Sama**

Berikut ini uraian dari masing-masing tingkat hierarki Manfaat kerja sama pengelolaan pembangunan kawasan perkotaan.

### **a. Fokus**

Manfaat Kerja sama pengelolaan pembangunan (A) kawasan perkotaan di perbatasan antara Kota Semarang dengan Kabupaten Semarang dalam rangka mewujudkan tujuan serta sesuai dengan fungsi dan perannya sebagai pusat pertumbuhan wilayah.

### **b. Bidang**

Pembangunan (B1). Manfaat kerja sama pengelolaan pembangunan ditinjau dari sisi Pembangunan meliputi: Pengembangan kota dan wilayah sekitarnya, keterpaduan rencana tata ruang, dan peningkatan sumber dana pembangunan.

Pemerintahan (C1). Manfaat kerja sama pengelolaan pembangunan ditinjau dari sisi Pemerintahan meliputi: Pembentukan lembaga pengelola pembangunan, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan tugas pemerintahan, Kejelasan hukum dan administrasi perwilayahan.

Kemasyarakatan (D1). Manfaat kerja sama pengelolaan pembangunan ditinjau dari sisi Kemasyarakatan meliputi: Peningkatan pelayanan masyarakat, Peningkatan kemandirian kota, dan Peningkatan investasi industri/perdagangan.

### **c. Faktor**

Komponen Sumber Daya Alam (air) (B1.1) Manfaat yang diterima karena mendorong dan mengarahkan perkembangan kota, terutama pengembangan potensi ekonomi dan potensi sumber daya alam.

Komponen Perumahan dan Permukiman (B1.2). Manfaat yang diterima adalah untuk kesesuaian guna lahan permukiman sehingga bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan kota dapat sinkron antara Kota Semarang dengan Kabupaten Semarang.

Komponen Infrastruktur (**B1.3**). Manfaat yang diterima karena kedua wilayah tidak akan terpisahkan dalam pembangunan sarana prasarana. Dalam pembangunan infrastruktur akan lebih ringan bila kedua belah pihak saling membantu.

Kelembagaan pengelola pembangunan (**C1.1**). Manfaat yang diterima karena memungkinkan pembentukan lembaga pengelola pembangunan kawasan perkotaan di perbatasan dan unit kerja antar dinas/instansi terkait.

Koordinasi dan pengendalian pembangunan (**C1.2**). Manfaat yang diterima karena memperlancar tugas dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Hukum dan administrasi (**C1.3**). Manfaat yang diterima karena memungkinkan penetapan batas wilayah kota secara definitif, sehingga dapat menambah cadangan lahan, memudahkan penataan dan pengembangan kawasan pinggiran.

Pelayanan Umum (**D1.1**). Manfaat yang diterima masyarakat kota melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan aparatur dan pelayanan fasilitas sosial dan fasilitas umum.

Ketenaga kerjaan (**D1.2**). Manfaat yang diterima karena memungkinkan pengembangan kemitraan antara pemerintah dan swasta serta mendorong partisipasi masyarakat untuk pembangunan serta pengembangan ekonomi kota sehingga mampu menciptakan lapangan kerja.

Peningkatan investasi industri/perdagangan (**D1.3**). Manfaat yang diterima adalah memacu kawasan Perkotaan untuk lebih berkembang dan menciptakan lapangan kerja serta menambah pendapatan daerah.

#### d. Alternatif

Usaha Patungan Terfokus (E1). Melibatkan pembentukan suatu badan usaha baru yang terpisah secara hukum dari pemerintah daerah untuk menghadapi satu set situasi yang terdefinisi dengan jelas dengan cara khusus dan hanya menangani satu fungsi.

Usaha Patungan Kompleks (F1). Melibatkan pembentukan suatu badan usaha baru yang terpisah secara hukum dari pemerintah daerah, dan kerjasama mereka tidak hanya terfokus pada satu bidang semata tetapi berkembang pada bidang-bidang lain.

Kolaborasi Terfokus (G1). Jika para anggota tidak ingin membentuk badan usaha baru yang terpisah dari masing-masing pemerintah daerah, untuk menghadapi satu set situasi yang terdefinisi dengan jelas dengan cara khusus dan hanya menangani satu fungsi.

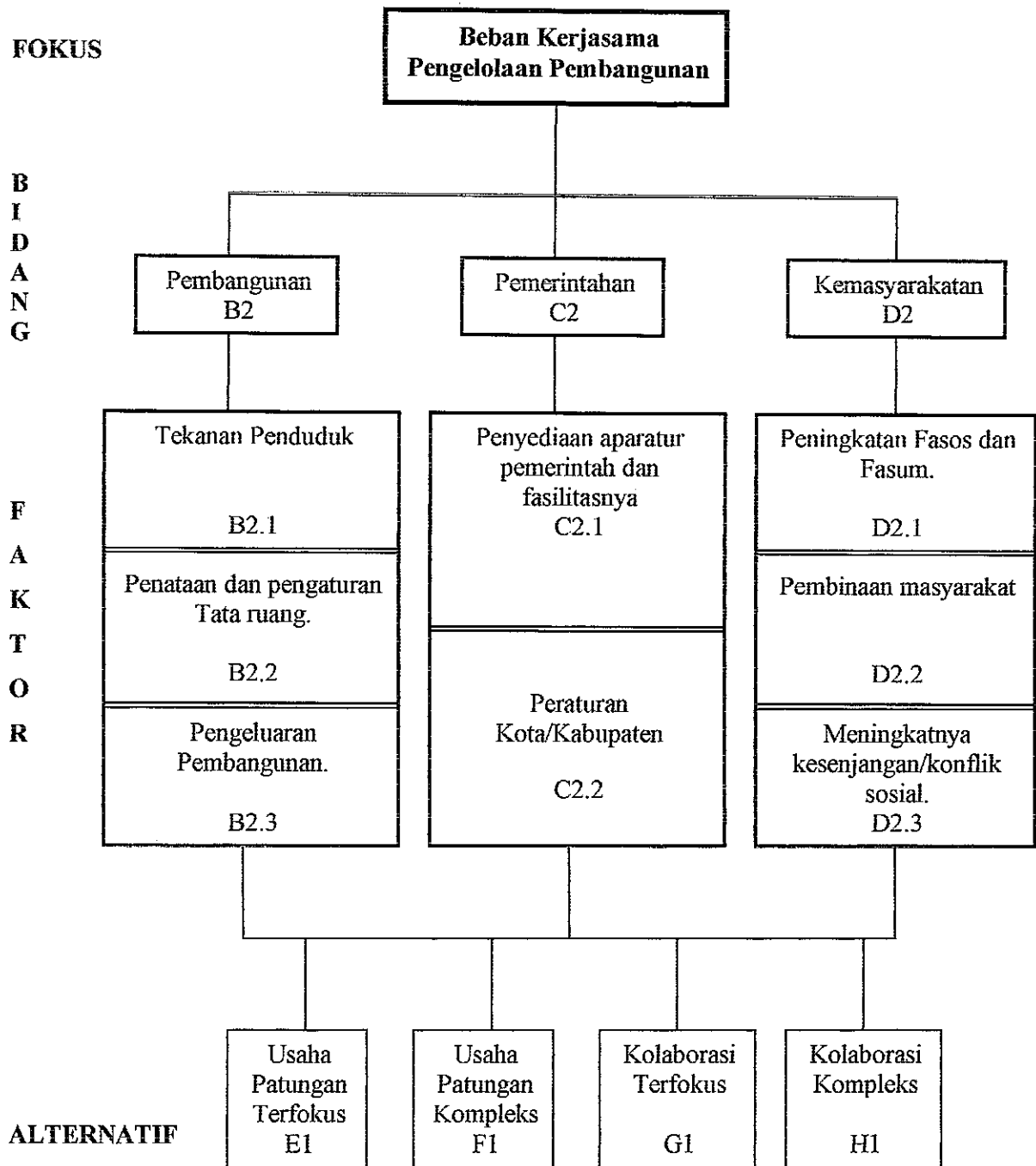
Kolaborasi Kompleks (H1). Jika para anggota tidak ingin membentuk badan usaha baru yang terpisah dari masing-masing pemerintah daerah, dan kerjasama mereka tidak hanya terfokus pada satu bidang semata tetapi berkembang pada bidang-bidang lain.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Gambar 4.2 Manfaat Kerja Sama Pengelolaan Pembangunan.**

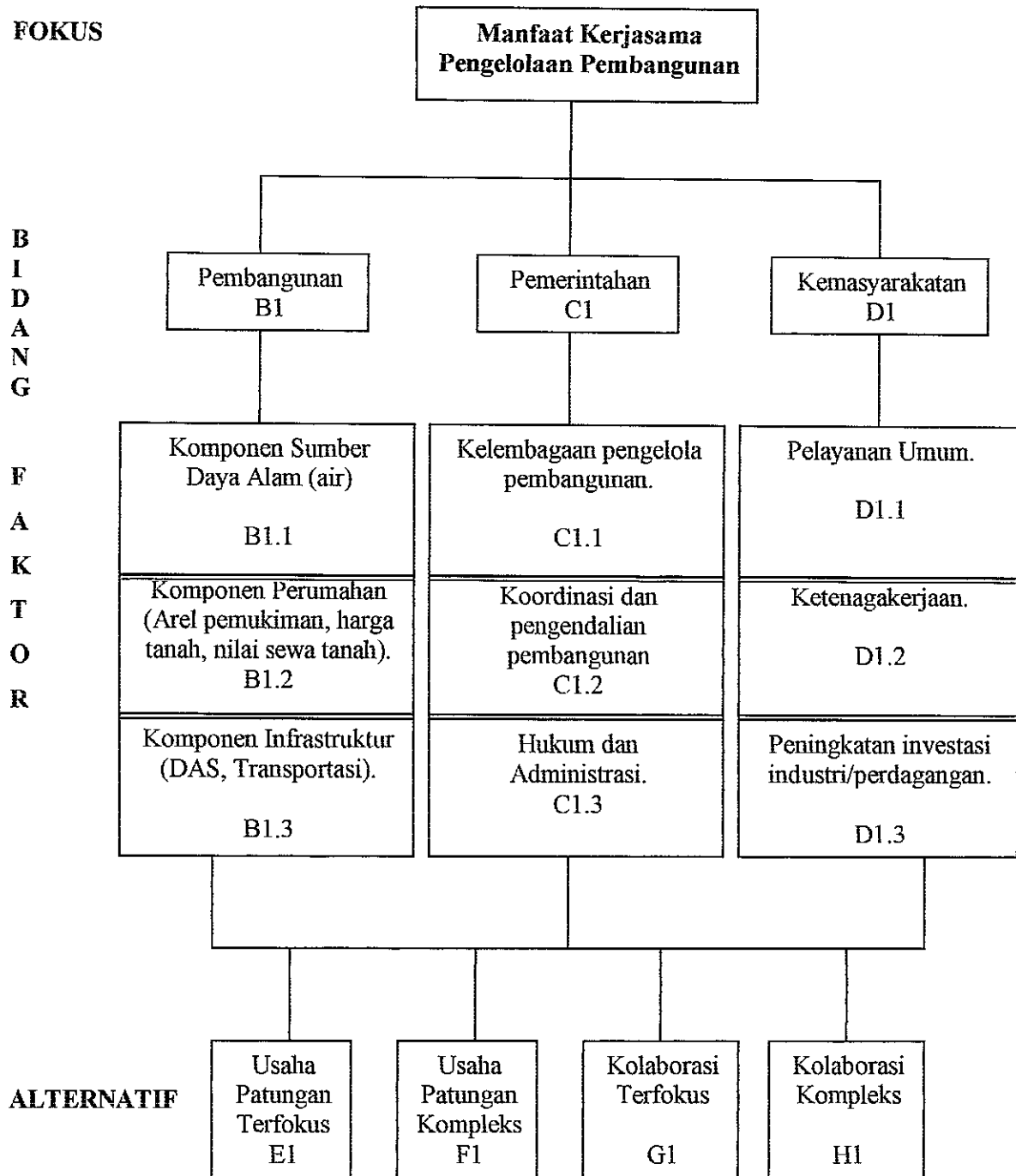
#### 4.1.3 Hasil Analisis Bentuk Kerja Sama

Hasil penilaian ini diperoleh dari perhitungan nilai perbandingan berpasangan dengan skala antara 1 sampai 9 dari setiap bidang, faktor dan alternatif. Nilai perbandingan berpasangan ini adalah representasi dari persepsi responden dari kuesioner yang dibagikan. Pengisian persepsi responden dilakukan sampai diperoleh jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan dilihat dari nilai *Index Konsistensi* ( $IK \leq 0,1$ ). Keluaran utama dari PHA berupa nilai "Egenfaktor" yang terdiri atas nilai bobot global per metrik pada hierarki beban kerja sama.

**GAMBAR 4.1**  
**BEBAN KERJA SAMA PENGELOLAAN PEMBANGUNAN**



**GAMBAR 4.2**  
**MANFAAT KERJA SAMA PENGELOLAAN PEMBANGUNAN**



#### **4.1.3.1 Analisis Beban dan Manfaat dari Setiap Alternatif**

Berdasarkan hasil penilaian prioritas global per matrik dari setiap alternatif diketahui bahwa bobot beban dan manfaat dari keempat alternatif bentuk kerja sama adalah sebagai berikut:

##### a. Beban dari setiap alternatif kerja sama

Hasil penilaian menunjukkan alternatif yang memberikan bobot beban terbesar adalah alternatif II yaitu Usaha Patungan Kompleks dengan bobot beban 0,344. Hasil penilaian bobot beban dari keempat alternatif disajikan pada Tabel IV.5 Bobot Beban Kerja Sama Pengelolaan Pembangunan.

**TABEL IV.5  
BOBOT BEBAN KERJA SAMA PENGELOLAAN PEMBANGUNAN**

ALTERNATIF	BOBOT	PILIHAN
UPT	0,301	III
UPK	0,344	IV
KT	0,174	I
KK	0,181	II

Sumber: Hasil Analisis 2002.

##### b. Manfaat dari setiap alternatif

Hasil penilaian menunjukkan alternatif yang memberikan bobot Manfaat terbesar adalah alternatif I yaitu Usaha Patungan Kompleks dengan bobot Manfaat adalah 0,354. Hasil penilaian bobot manfaat dari keempat alternatif disajikan pada Tabel IV.6 Bobot Manfaat Kerja Sama Pengelolaan Pembangunan.

**TABEL IV.6**  
**BOBOT MANFAAT KERJA SAMA PENGELOLAAN PEMBANGUNAN**

ALTERNATIF	BOBOT	PILIHAN
UPT	0,348	II
UPK	0,354	I
KT	0,148	VI
KK	0,150	III

Sumber: Hasil Analisis 2002.

c. Nilai perbandingan beban dan manfaat dari setiap alternatif.

Nilai perbandingan beban dan manfaat menunjukkan bahwa alternatif II yaitu Usaha Patungan Terfokus mempunyai nilai terbesar dengan bobot nilai 1,156. Hal ini berarti bahwa alternatif II memberikan manfaat yang lebih besar dibanding beban. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel IV.7 Perbandingan Alternatif Bobot Beban dan Manfaat Kerja Sama.

**TABEL IV.7**  
**PERBANDINGAN ALTERNATIF**  
**BOBOT BEBAN DAN MANFAAT KERJA SAMA**

Alternatif	Bobot		Nilai (M/B)	Pilihan
	Manfaat(M)	Beban(B)		
Usaha Patungan Terfokus	0,348	0,301	1,156	I
Usaha Patungan Kompleks	0,354	0,344	1,027	II
Kolaborasi Terfokus	0,148	0,174	0,851	III
Kolaborasi Kompleks	0,150	0,181	0,830	IV

Sumber: Hasil Analisis 2002

#### **4.1.3.2 Analisis Beban dan Manfaat dari Setiap Bidang Kerja Sama**

Untuk melengkapi hasil di atas berikut dibahas mengenai beban dan manfaat keempat alternatif pada bidang penelitian Pembangunan, Pemerintahan, dan Kemasyarakatan.

##### **a. Beban dan Manfaat Kerja Sama pada Bidang Pembangunan**

Berdasarkan Beban pada bidang pembangunan yang terdiri dari Tekanan Penduduk, penataan dan pengaturan tata ruang, dan pengeluaran pembangunan, hasil penilaian terbesar adalah pada alternatif II dengan bobot 0,295. sedangkan Beban terkecil adalah alternatif IV. dengan bobot 0,127

Berdasarkan Manfaat pada bidang pembangunan yang terdiri Komponen SDA, Komponen perumahan dan permukiman, dan Komponen Infrastruktur hasil penilaian terbesar adalah pada alternatif I Dengan bobot 0,273. sedangkan Manfaat terkecil adalah alternatif III. dengan bobot 0,101.

Hasil selengkapnya terlihat pada Tabel IV.8 Bobot Penilaian Beban dan Manfaat pada Bidang Pembangunan.

**TABEL IV.8  
BOBOT PENILAIAN BEBAN DAN MANFAAT PADA BIDANG PEMBANGUNAN**

ALTERNATIF	PENILAIAN	
	MANFAAT	BEBAN
UPT	<b>0,273</b>	0,282
UPK	0,261	<b>0,295</b>
KT	<b>0,101</b>	0,143
KK	0,104	<b>0,127</b>

Sumber: Hasil Analisis 2002

b. Beban dan Manfaat Kerja Sama pada Bidang Pemerintahan

Berdasarkan Beban pada bidang Pemerintahan yang terdiri dari Penyiapan aparatur pemerintah dan fasilitasnya, serta peraturan kota/kabupaten, hasil penilaian terbesar adalah pada alternatif I dengan bobot 0,295. sedangkan Beban terkecil adalah alternatif IV. dengan bobot 0,128.

Berdasarkan Manfaat pada bidang Pemerintahan yang terdiri dari kelembagaan pengelola pembangunan, Koordinasi dan pengendalian pembangunan, serta hukum dan administrasi, hasil penilaian terbesar adalah pada alternatif II Dengan bobot 0,137. sedangkan Manfaat terkecil adalah alternatif IV. dengan bobot 0,064.

Hasil selengkapnya terlihat pada Tabel IV.9 Bobot Penilaian Beban dan Manfaat pada Bidang Pemerintahan

**TABEL IV.9**  
**BOBOT PENILAIAN BEBAN DAN MANFAAT PADA BIDANG**  
**PEMERINTAHAN**

ALTERNATIF	PENILAIAN	
	MANFAAT	BEBAN
UPT	0,132	<b>0,295</b>
UPK	<b>0,137</b>	0,276
KT	0,066	0,153
KK	<b>0,064</b>	<b>0,128</b>

Sumber: Hasil Analisis 2002

c. Beban dan Manfaat Kerja Sama pada Bidang Kemasyarakatan

Berdasarkan Beban pada bidang Kemasyarakatan yang terdiri dari peningkatan Fasos dan fasum, pembinaan masyarakat, dan meningkatnya kesenjangan/konflik sosial,

hasil penilaian terbesar adalah pada alternatif I Dengan bobot 0,112. sedangkan Beban terkecil adalah alternatif III. dengan bobot 0,062.

Berdasarkan Manfaat pada bidang Kemasyarakatan yang terdiri dari Pelayanan Umum, Ketenaga kerjaan, dan Peningkatan investasi industri dan perdagangan, hasil penilaian terbesar adalah pada alternatif I dengan bobot 0,142. sedangkan Manfaat terkecil adalah alternatif IV. dengan bobot 0,052.

Hasil selengkapnya terlihat pada Tabel IV.10 Bobot Penilaian Beban dan Manfaat pada Bidang Kemasyarakatan.

**TABEL IV.10  
BOBOT PENILAIAN BEBAN DAN MANFAAT PADA BIDANG  
KEMASYARAKATAN**

ALTERNATIF	PENILAIAN	
	MANFAAT	BEBAN
UPT	0,142	0,112
UPK	0,132	0,105
KT	0,058	0,062
KK	0,052	0,109

Sumber: Hasil Analisis 2002

#### **4.1.3.3 Analisis Beban dan Manfaat dari Setiap Faktor**

Pada tingkat Faktor kerja sama yang mempunyai penilaian penting adalah yang memiliki nilai lebih besar atau sama dengan nilai rata-rata keseluruhan beban dan manfaat. Rata-rata keseluruhan diambil dari penjumlahan rata-rata responden. Pada tingkat Faktor masing-masing memiliki 8 faktor beban dan 9 faktor manfaat.

**TABEL IV. 11**  
**BOBOT PENILAIAN PADA TINGKAT FAKTOR**

KODE	FAKTOR	RATA-RATA PENILAIAN			
		UPT	UPK	KT	KK
<b>M A N F A A T (M)</b>					
B1.1	Komponen Sumber Daya Alam (air)	<b>0.124</b>	0.122	0.052	0.049
B1.2	Komponen Perumahan dan permukiman	<b>0.095</b>	0.091	0.030	0.036
B1.3	Komponen Infrastruktur	<b>0.054</b>	0.048	0.019	0.019
C1.1	Kelembagaan pengelola pembangunan	0.035	<b>0.036</b>	0.020	0.012
C1.2	Koordinasi dan pengendalian pembangunan	<b>0.039</b>	0.034	0.019	0.039
C1.3	Hukum dan administrasi	<b>0.058</b>	0.057	0.027	0.014
D1.1	Pelayanan Umum	<b>0.048</b>	0.036	0.027	0.019
D1.2	Ketenaga Kerjaan	<b>0.052</b>	0.029	0.012	0.010
D1.3	Peningkatan investasi industri dan perdagangan	0.042	<b>0.057</b>	0.024	0.023
Rata-rata rasio		<b>0.061</b>	<b>0.057</b>	<b>0.026</b>	<b>0.025</b>
<b>B E B A N (B)</b>					
B2.1	Tekanan penduduk	<b>0.157</b>	0.147	0.065	0.059
B2.2	Pengaturan dan penataan tata ruang	0.045	<b>0.061</b>	0.034	0.043
B2.3	Pengeluaran pembangunan	0.061	<b>0.086</b>	0.045	0.025
C2.1	Penyiapan aparatur pemerintahan dan fasilitasnya	<b>0.176</b>	0.154	0.078	0.086
C2.3	Peraturan kota/kabupaten	0.036	<b>0.047</b>	0.024	0.009
D2.1	Peningkatan fasos dan fasum	0.045	0.045	0.034	<b>0.050</b>
D2.2	Pembinaan masyarakat	0.045	<b>0.039</b>	0.017	0.040
D2.3	Meningkatnya kesenjangan sosial	<b>0.021</b>	<b>0.021</b>	0.011	0.019
Rata-rata rasio		0.074	0.075	0.041	0.040
<b>Rata-rata perbandingan M/B</b>		<b>0.824</b>	0.760	0.634	0.625

Sumber: Hasil Analisis 2002

Berdasarkan analisa di atas, terlihat bahwa alternatif terpilih adalah Usaha Patungan Terfokus. Hal ini berarti secara realita kerjasama antara Kota Semarang dengan Kabupaten Semarang dalam menangani kawasan perkotaan di perbatasan sudah seharusnya dikelola pada tingkat yang lebih tinggi dari sekarang.

Dengan demikian ada tiga kemungkinan yang terjadi:

- a. Nilai perbandingan  $> 1$  berarti alternatif terpilih lebih baik dibanding keadaan sekarang.
- b. Nilai perbandingan  $< 1$  berarti alternatif terpilih tidak lebih baik dibanding keadaan sekarang.
- c. Nilai perbandingan  $= 1$  berarti alternatif terpilih sama dengan sekarang.

**TABEL IV.12**  
**RASIO BEBAN DAN MANFAAT ALTERNATIF TERPILIH**

BIDANG	BOBOT RATA-RATA		RASIO MANFAAT/BEBAN
	MANFAAT	BEBAN	
PEMBANGUNAN	0,489	0,407	1,202
PEMERINTAHAN	0,285	0,398	0,716
KEMASYARAKATAN	0,226	0,195	1,150
Rasio rata-rata			<b>1,023</b>

Sumber: Hasil Analisis 2002.

Dari tabel terlihat ratio Beban dan manfaat alternatif terpilih sebesar **1,023** berarti alternatif terpilih lebih baik dibandingkan sekarang.

## 4.2 Bentuk Kerja Sama Pengelolaan Pembangunan

### 4.2.1 Bentuk Pengelola Pembangunan Kawasan Perkotaan Di Perbatasan

Berdasarkan analisis di atas menunjukkan bahwa alternatif bentuk pengelolaan pembangunan kawasan perkotaan di perbatasan adalah melalui pembentukan **Usaha Patungan Terfokus (UPT)** atau lembaga khusus pengelola pembangunan kawasan perkotaan yang terfokus. Dasar Pembentukan lembaga khusus pengelola pembangunan kawasan perkotaan adalah mengacu pada pasal 90 Undang-undang Nomor 22 tahun 1999

tentang Pemerintah Daerah, yang diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Pada pasal 90 dinyatakan tentang kawasan perkotaan yang muncul atau tumbuh dari dalam wilayah kabupaten.

Dilihat dari ketentuan di atas, dan berdasarkan analisis yang diperlukan untuk Badan pengelola pembangunan kawasan perkotaan adalah: Lembaga yang bersifat usaha patungan terfokus (UPT).

#### **4.2.1.1 Bentuk Badan Pengelola Pembangunan Kawasan Perkotaan**

Kompleksitas permasalahan di kawasan perbatasan perlu diwadahi oleh suatu kelembagaan yang personilnya melibatkan wakil-wakil dari stakeholders dikawasan tersebut. Dengan dibentuknya lembaga khusus untuk menyelesaikan problem yang terjadi di kawasan perbatasan tersebut, diharapkan permasalahan regional dapat diselesaikan secara bersama.

Bentuk kelembagaan yang diajukan pada penelitian ini merupakan penjabaran dari PP 84 Tahun 2000 Pasal 9 dan 10, mengenai lembaga teknis kabupaten / kota. Kelembagaan yang dibentuk khusus untuk menagani kerja sama dikawasan perbatasan, paling tidak mempunyai tugas pokok dan fungsi kelembagaan seperti uraian di bawah ini.

#### **4.2.1.2 Tugas dan Fungsi**

Lembaga khusus pengelola Pembangunan kawasan perkotaan diperbatasan merupakan bagian daerah Kabupaten Semarang dan Kota Semarang, membantu Bupati dan Walikota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, dalam pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang pengelolaan pembangunan kota. Lembaga pengelola pembangunan kawasan perkotaan ini berbentuk Badan Pengelola Pembangunan kawasan Perkotaan yang kelengkapan organisasinya disesuaikan dengan ketentuan daerah. Pembentukan lembaga

ini ditetapkan berdasar Surat Keputusan Bersama dua kepala daerah otonom dan kemudiani di tetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengelola Pembangunan Kawasan Perkotaan di perbatasan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksana perumusan kebijakan teknis yang menyangkut urusan yang bersifat lintas kota/kabupaten dan kewenangan lain yang belum diurus oleh kota/kabupaten.
- b. Pelaksana pelayanan penunjang dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya yang menyangkut urusan yang bersifat lintas kota/kabupaten.
- c. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang menyangkut urusan yang bersifat lintas kota/kabupaten.
- d. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan program.
- e. Pelaksana pengembangan bidang-bidang kerja sama yang telah disepakati.

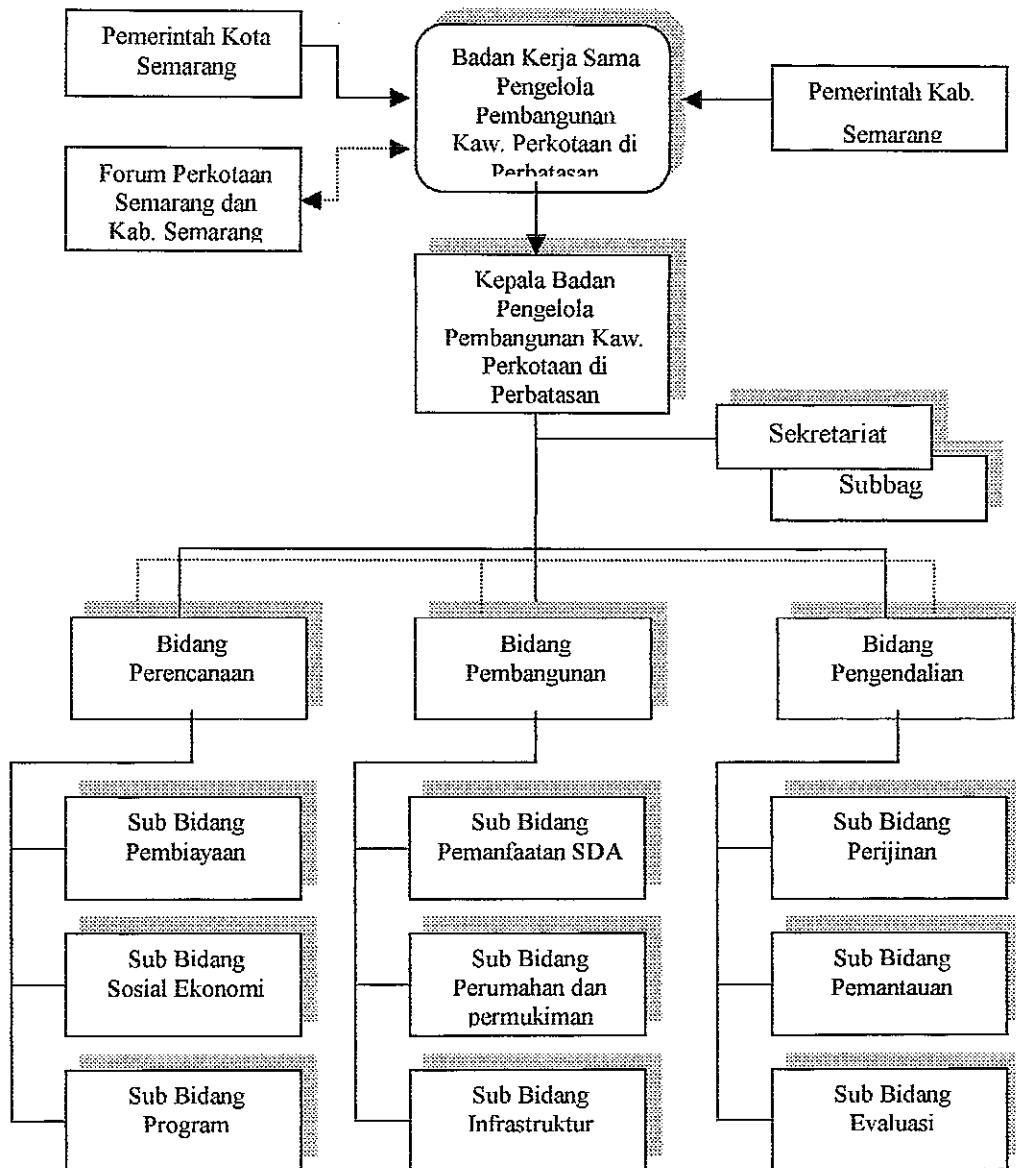
#### **4.2.1.3 Susunan Organisasi**

Kerja sama antar daerah dengan membentuk Usaha Patungan Terfokus (UPT) dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pemerintah masing-masing kabupaten/kota menunjuk atau mengirim beberapa orang yang dinilai memiliki kapabilitas untuk duduk sebagai perwakilan pemerintah masing-masing dalam UPT.
2. Dalam UPT tersebut, pemetaan potensi daerah masing-masing dilakukan untuk kemudian dijadikan dasar kesepakatan.
3. Pelaksanaan urusan pemanfaatan potensi masing-masing daerah diserahkan kepada para profesional yang akan merumuskan struktur badan usaha dan modal serta menejemennya.
4. Setiap daerah berperan serta mengawasi dan mengendalikan perkembangan usaha.

Struktur organisasi dan tata kerja badan pengelola kerja sama Pembangunan kawasan perkotaan ini terdiri dari sekretariat dan bagian, sedangkan bidang terbagi lagi menjadi sub-sub bidang. Untuk lebih jelas lihat Gambar 4.3 Struktur Organisasi Badan Kerja Sama.

**GAMBAR 4.3**  
**STRUKTUR ORGANISASI BADAN KERJA SAMA**  
**PENGELOLA PEMBANGUNAN KAWASAN PERKOTAAN DI PERBATASAN**  
**BIDANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN**



Keterangan :

- : Garis Komando  
 - - - : Garis Koordinasi

## **4.2.2 Mekanisme Pengelolaan Pembangunan Kawasan Perkotaan di Perbatasan**

Bentuk yang ditampilkan di atas agar dapat berjalan secara mekanistik, maka diperlukan suatu gambaran proses yang harus dilalui. Sebagai gambaran indikatif, ada tiga hal yang harus diperhatikan. Pertama adalah Perencanaan potensi kawasan perkotaan, kedua adalah pelaksanaan pembangunan kawasan perkotaan dan ketiga adalah Pengawasan dan Pengendalian kawasan perkotaan.

### **4.2.2.1 Perencanaan Potensi Kawasan Perkotaan di Perbatasan**

Perencanaan potensi kawasan perkotaan meliputi kegiatan-kegiatan untuk merencanakan pembiayaan kawasan perkotaan, sosial ekonomi, dan menyusun program pembangunan kawasan perkotaan.

Sub bidang Pembiayaan kawasan perkotaan bertugas untuk merencanakan Pembiayaan kegiatan yang berkaitan dengan kerja sama dan pengembangannya. Prosedur pembiayaan dalam hal ini harus mempertimbangkan pedoman dan tata cara penyusunan kerja sama.

Sub bidang Sosial Ekonomi kawasan perkotaan bertugas merencanakan atau menciptakan kegiatan kerja sama dan investasi serta kegiatan yang bersifat mendorong kegiatan ekonomi.

Sub bidang Penyusunan program pembangunan kawasan perkotaan bertugas untuk memprogramkan kegiatan-kegiatan pembangunan bidang yang dikerja samakan untuk pengembangan ke masa depan. Untuk mencapai hal tersebut, program yang dapat dilakukan adalah pengembangan kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi industri dan perdagangan antar wilayah.

#### **4.2.2.2 Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perkotaan di Perbatasan**

Pelaksanaan pembangunan kawasan perkotaan ditinjau pada upaya yang mampu mendorong pertumbuhan dan penguatan ekonomi warga perkotaan. Pada bidang ini terdiri dari beberapa sub bidang yaitu sub bidang Pemanfaatan SDA, sub bidang Perumahan dan permukiman, dan sub bidang infrastruktur.

Sub bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam bertugas untuk menggali SDA yang bisa dikerja samakan untuk kepentingan kedua belah pihak yang saling menguntungkan.

Sub bidang Perumahan dan Permukiman bertugas untuk mengkoordinasikan pembangunan perumahan dan pemukiman antar kedua daerah sehingga terjadi suatu kesesuaian tata ruang.

Sub bidang Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan serta memadukan kegiatan fisik lapangan (sarana dan prasarana) termasuk ketepatan mutu, waktu, dan biaya.

#### **4.2.2.3 Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Perkotaan di Perbatasan**

Bentuk pengawasan dan pengendalian pembangunan dan pemanfaatan ruang dalam kawasan perkotaan di perbatasan antara lain:

- a. Sub bidang Perijinan yang bertugas berkaitan dengan perijinan kebijakan dari Badan Pengelola Kawasan Perkotaan dalam hubungannya dengan kerja sama dan investasi industri.
- b. Sub bidang Pemantauan, yaitu pengamatan dan pemeriksaan terhadap kualitas tata ruang dan lingkungan kawasan perkotaan di perbatasan
- c. Sub bidang Evaluasi, yaitu penilaian terhadap kemajuan usaha-usaha pengelolaan dan penataan ruang kawasan perkotaan di perbatasan berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan teknis yang ada.

#### 4.2.3 Hubungan Dengan Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota dan Mekanisme Kerja

Berdasarkan Pola Organisasi Pemerintah Daerah dengan Keputusan Mendagri No. 97 Tahun 1993 mengandung prinsip pokok Organisasi yang diterapkan pada pola Organisasi Pemerintah Daerah tersebut, antara lain:

##### a. Prinsip Organisasi Lini dan Staf

Secara jelas ditegaskan unit-unit Organisasi yang bertanggung jawab langsung untuk melaksanakan tugas-tugas pokok Pemerintah di Daerah:

- Organisasi Lini : Instansi Vertikal (Departemen Vertikal), lembaga Pemerintah non departemen di daerah, Dinas-dinas, Unit Pelaksana Wilayah serta BUMD.
- Organisasi Staf : Unit Organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan tugas-tugas yang bersifat menunjang yaitu: Setda, Bappeda, Itwil, BKMD (unit pelayanan). Unit Pelaksana dan Unit Pelayanan ini hanya bisa bekerja sama di bawah Koordinasi Bupati/ Walikota.

##### b. Prinsip Perumusan Tugas Pokok dan Fungsi Operasional yang jelas.

Setiap organisasi secara jelas dirumuskan Tugas Pokok dan Fungsinya agar tidak terjadi duplikasi atau sebaliknya, ada tugas dan fungsi yang sama sekali tidak ada yang melaksanakan (prinsip pembagian habis tugas dan fungsi).

##### c. Prinsip Koordinasi Integrasi dan Sinkronisasi

Tidak ada satupun kegiatan Pemerintah dalam pembangunan yang dapat dilaksanakan oleh satu unit/instansi saja, sehingga diperlukan kerja sama yang terpadu.

Sedangkan fungsi dari Badan baru ini adalah melakukan perencanaan, pembangunan dan pengendalian di kawasan perbatasan sehingga memerlukan kerja sama dengan instansi yang sudah ada sebelumnya.

Sebagai Badan Kerja sama kabupaten/kota maka pengendaliannya dibawah Bupati/ Walikota melalui Setda dengan maksud bahwa koordinasi dengan instansi dibawah Bupati/Walikota akan lebih mudah dilaksanakan. Sedangkan instansi-instansi di lingkungan Penda berfungsi sebagai instansi Pembantu Teknis.

Secara lengkap hubungan dan mekanisme kerja dapat dilihat pada **Tabel IV.13 Hubungan dan Mekanisme Kerja**, dan **Gambar 4.4 Skema Koordinasi Badan Kerja Sama Pengelolaan Pembangunan Perkotaan di Perbatasan**.

#### 4.2.4 Pembiayaan

Pembiayaan yang dimaksud di sini adalah pembiayaan untuk melakukan kerja sama tersebut. Sumber-sumber pembiayaan tersebut dapat diperoleh antara lain dari:

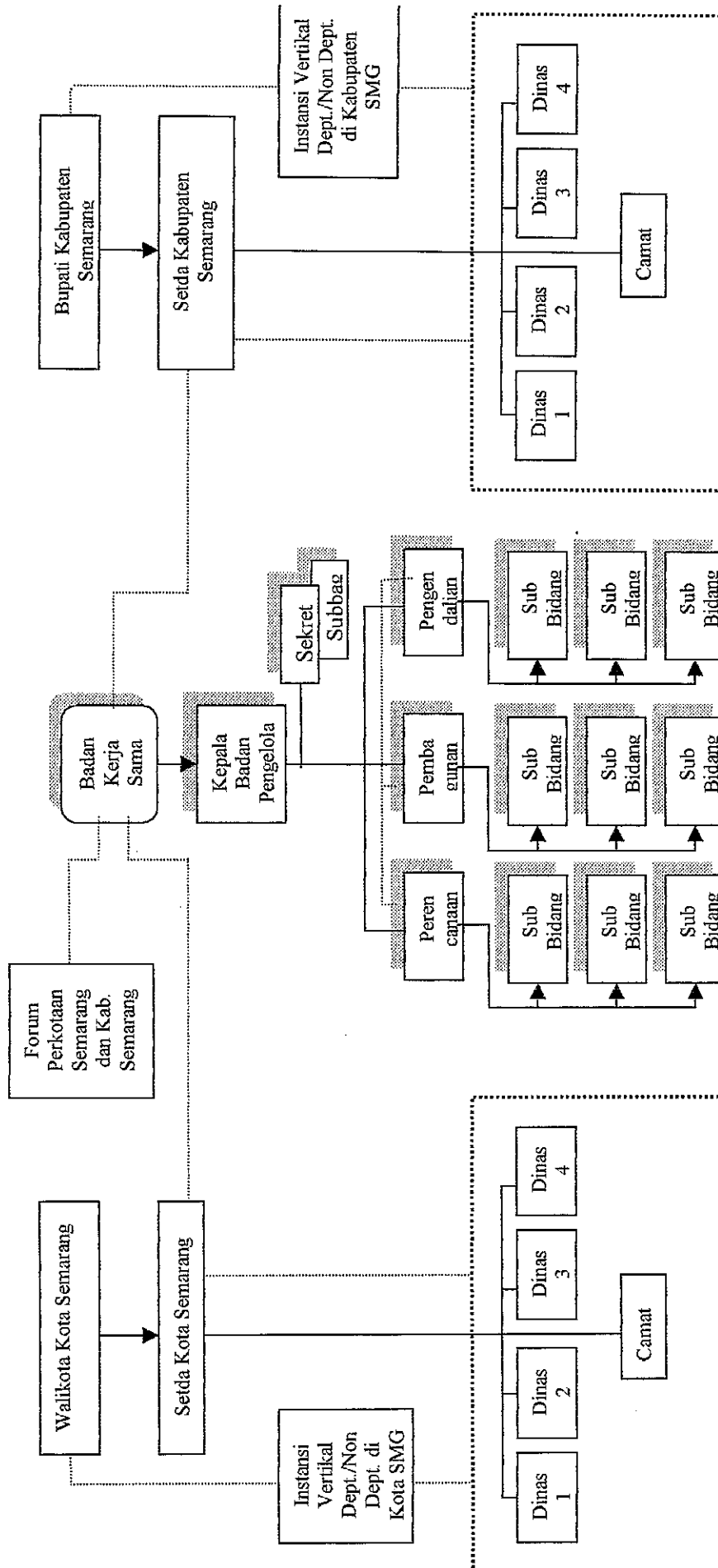
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, baik dari Kota Semarang maupun Kabupaten Semarang, ataupun dilakukan secara sharing dan pembagian pendanaan, sesuai dengan proporsi yang akan ditentukan.
2. Pinjaman Luar Negeri ataupun bantuan yang sifatnya hibah
3. Masyarakat pemakai jasa.

Besar-kecilnya dana yang akan ditanggung oleh masing-masing pihak akan ditentukan sesuai tingkat kepentingan dan kesepakatan dengan memperhatikan hasil studi kerja sama yang dilakukan sebelumnya. Upaya kerja sama tersebut dilakukan untuk mengatasi kesenjangan anggaran di kawasan perbatasan.

**TABEL IV. 13**  
**HUBUNGAN DAN MEKANISME KERJA**

NO	BIDANG	FUNGSI	MEKANISME KERJA	KOORDINASI INTEREN BADAN	KOORDINASI EKSTEREN BADAN
1	<p><b>PERENCANAAN</b> Kabid Perencanaan dibantu oleh tiga subbid yaitu: Subbid pembiayaan, subbid sosial ekonomi, dan subbid program</p>	<p>Membantu Kepala Badan untuk merencanakan dan penyusunan program pembangunan dikawasan perbatasan serta merencanakan kerja sama dengan sektor swasta.</p>	<p>Kepala badan mendelegasikan tugas perencanaan kepada bidang yang bersangkutan. Kepala bidang dengan mendelegasikan ke masing-masing subbidang untuk menyiapkan data-data sesuai dengan bidang &amp; tanggung jawabnya.</p>	<p>Kabid mengkoordinir tiga subbid perencanaan untuk melakukan perencanaan dan berkoordinasi dengan bidang lainnya (pembangunan &amp; pengendalian)</p>	<p>Kepala badan melalui Kabid perencanaan berkoordinasi dengan bidang yang membidangi melalui sekda masing-masing daerah. Contohnya dengan Bappeda</p>
2	<p><b>PEMBANGUNAN</b> Kabid pembangunan langsung dibantu oleh subbid pemanfaatan SDA, subbid perumahan dan permukiman, serta subbid infrastruktur</p>	<p>Membantu Kepala Badan untuk melakukan pembangunan fisik di kawasan perbatasan serta menggali potensi-potensi yang ada.</p>	<p>Kepala badan mendelegasikan tugas bidang pembangunan kepada kepala bidang yang bersangkutan. Kepala bidang dengan mendelegasikan ke masing-masing subbidang sesuai dengan bidang &amp; tanggung jawabnya.</p>	<p>Kabid membagi tugas-tugasnya dengan tiga subbid pembangunan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dan berkoordinasi dengan bidang yang lain (perencanaan dan pengendalian)</p>	<p>Berkoordinasi bersama instansi yang membidangi pembangunan di masing-masing daerah untuk menangani masalah pembangunan. Contohnya dengan DPU</p>
3	<p><b>PENGENDALIAN</b> Bidang pengendalian membawahi subbid perijinan, subbid pemantauan, dan subbid evaluasi</p>	<p>Membantu Kepala Badan untuk mengendalikan pembangunan kawasan perbatasan dengan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan yang akan dan sudah dilakukan.</p>	<p>Kepala badan mendelegasikan tugas pengendalian kepada bidang yang bersangkutan. Kepala bidang dengan mendelegasikan ke masing-masing subbidang untuk melakukan pengendalian sesuai dengan bidang &amp; tanggung jawabnya.</p>	<p>Kabid mengkoordinir masing-masing subbid untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya serta berkoordinasi dengan bidang lainnya (perencanaan dan pembangunan)</p>	<p>Mengkoordinasikan tugas-tugasnya dengan instansi yang membidangi bidang pengendalian di masing-masing daerah. Misalnya dengan Bappedalda &amp; DPU</p>

**GAMBAR 4.4**  
**SKEMA KOORDINASI BADAN KERJA SAMA**  
**PENGELOLA PEMBANGUNAN KAWASAN PERKOTAAN DI PERBATASAN**  
**DENGAN LEMBAGA PEMERINTAHAN YANG SUDAH ADA**



Keterangan :  
 \_\_\_\_\_ : Garis Komando  
 ..... : Garis Koordinasi

Agar kerja sama mampu mendatangkan semua benefit, pemerintah perlu lebih dahulu mengetahui atau paling tidak mengidentifikasi, karakteristik dari jenis bidang yang akan dikerjasamakan. Ditinjau dari kemungkinan yang terjadi, maka kerja sama bisa:

1. Mendatangkan *net economic and social benefit* serta *financial benefit*.
2. Mendatangkan *net economic and social benefit*, tetapi tidak mendatangkan *financial benefit*.
3. Mendatangkan *financial benefit* tetapi tidak mendatangkan *net economic and social benefit*.
4. Tidak mendatangkan *financial benefit* maupun *net economic and social benefit*.

Kerja sama harus dilakukan pada bidang yang mempunyai karakteristik (1) dan (2), dan tidak dilakukan pada bidang yang mempunyai karakteristik (3) dan (4). Se jauh bidang yang berkarakteristik (2), maka subsidi yang memadai diperlukan guna mengkompensir rendahnya perolehan finansial. Bila tidak kerja sama sulit terjadi.

- Kerja sama yang dilakukan pada bidang dengan karakteristik (1) merupakan kerja sama murni atau kerjasama tanpa subsidi.
- Kerja sama yang dilakukan pada bidang dengan karakteristik (2) merupakan kerja sama dengan subsidi.
- Kerja sama yang ketiga adalah kerja sama dengan swasta yang bersedia terjun ke bisnis Bidang Pembangunan di kawasan perbatasan. Dalam konteks ini, untuk mengkompensasi manfaat ekonomi dan sosial yang tidak tercipta, pemerintah dapat menarik sejumlah pajak tertentu.

#### 4.2.5 Jangka Waktu

Penetapan jangka waktu merupakan upaya strategi pembangunan yang perlu diasiasi pada jangka pendek, menengah dan panjang.

Jangka Pendek, merupakan tahapan yang mengedepankan kerja sama antar wilayah dengan mengidentifikasi masalah dan mencari solusi sesuai permasalahan yang paling penting/ utama untuk segera ditangani. Penanganan masalah ini disesuaikan dengan tingkat kewenangan yang dapat dilakukan dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab stakeholder. Arah kebijaksanaannya bersifat konsolidasi dan koordinatif lintas wilayah. Tahapan ini perlu dilakukan mengingat intensitas tumbuh dan berkembangnya kawasan perbatasan yang sangat cepat dan masih banyak peraturan perundangan daerah mengikat/mengatur pada setiap bagian instansional dari masing-masing daerah, sedangkan proses penetapan kebijaksanaan kerja sama yang baik secara konseptual maupun konstitusi perlu waktu yang cukup panjang.

Jangka Menengah, merupakan tahapan perumusan konsep dasar pembangunan antar wilayah yang perlu segera diangkat/diusulkan melalui jalur instansional dan konstitusi, sehingga permasalahan di daerah perbatasan dapat diatasi atau diantisipasi secara tepat, cepat dan legal. Pada tahap ini juga dapat segera disepakati kegiatan-kegiatan yang mendesak yang disusun berdasarkan input bersama dari stakeholders kedua wilayah, termasuk didalamnya pengelolaan sumber dana, sumber daya manusia, dan sebagainya.

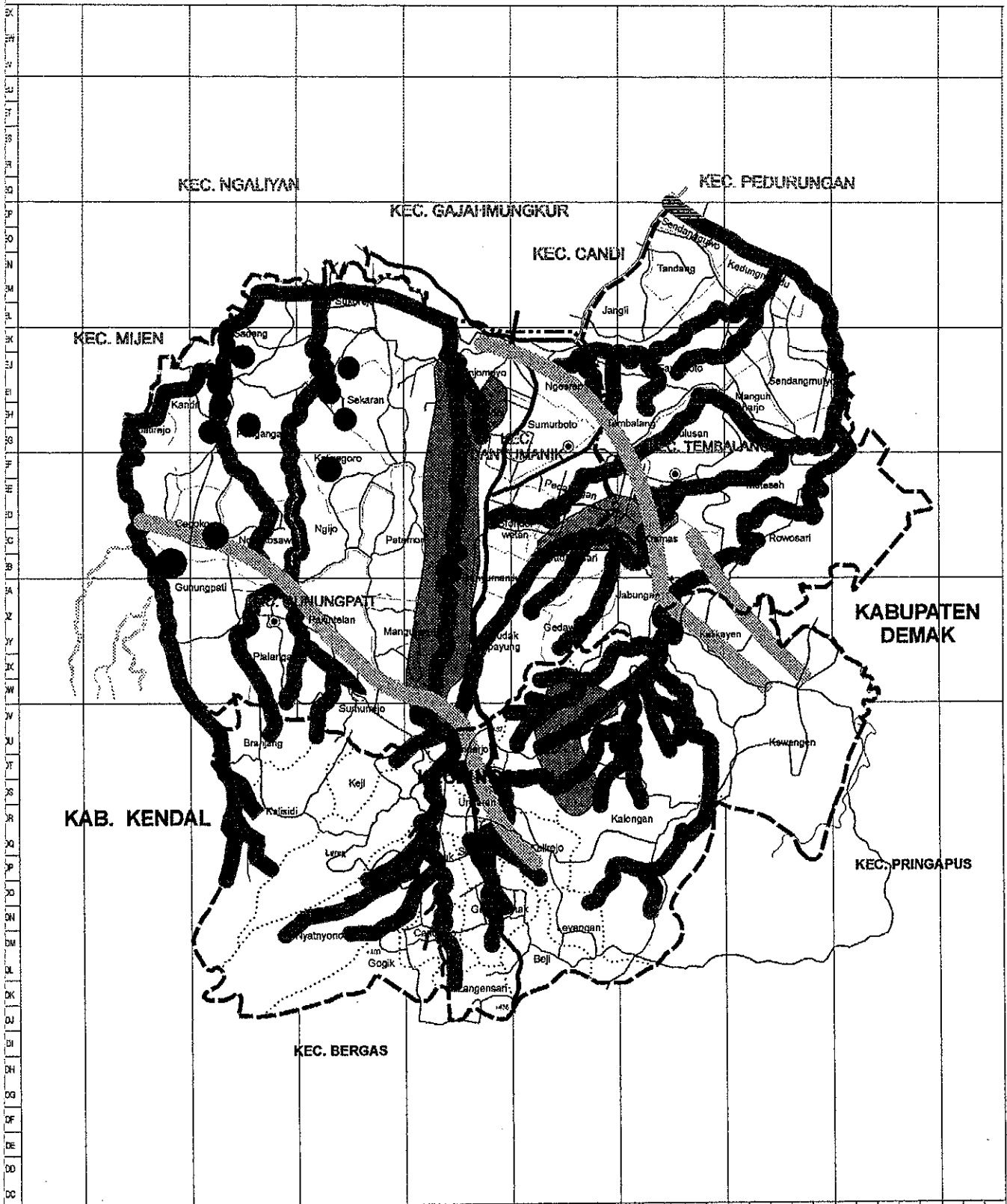
Jangka Panjang, Merupakan tahapan yang perlu waktu panjang untuk proses penyusunan konsep dan penetapannya, terutama permasalahan yang berkaitan dengan kebijaksanaan nasional. Tahapan ini juga bisa untuk meningkatkan status kerja sama yang mulanya hanya Usaha Patungan Terfokus (UPT) menjadi Usaha Patungan Kompleks (UPK) sesuai dengan teori dan perkembangan wilayah yang semakin kompleks.

### 4.3 Wilayah Oprasional Badan Kerja Sama

Dari hasil analisis yang menunjukkan bentuk kerja sama antara Kota Semarang dengan Kabupaten Semarang didapat alternatif terbaik yaitu Usaha Patungan Terfokus dengan Struktur Organisasi Badan Kerja Sama yang ada di atas tentunya membutuhkan wilayah oprasional untuk menjalankan Badan kerja sama tersebut.

Penetapan wilayah oprasional kerja sama didasarkan pada lingkup wilayah administrasi kedua daerah otonom yang meliputi empat kecamatan yaitu Kecamatan Tembalang, Banyumanik, Gunungpati dan Kecamatan Ungaran. Dari peta wilayah administrasi kemudian di *superinfuse* dengan peta kawasan lindung yang terdiri dari Peta Sepadan Mata Air, Peta Sepadan Sungai dan Peta Rawan Bencana akhirnya akan didapatkan wilayah oprasional badan kerja sama tersebut.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam **Peta 4.1 Wilayah Oprasional Badan Kerja Sama**.



189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234				
120					121					122					123					124					125					126					127					128					129				

MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO  BENTUK KERJASAMA PENGELOLAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PEDURUGAN DI PERMUKAAN DAN SEHARANG DENGAN KABUPATEN SEMARANG	- - - - - Batas Kabupaten - - - - - Batas Kecamatan ———— Jalan - - - - - Batas Desa  ———— Rel Kereta Api <img alt="Sungai symbol" data-bbox="335 805 355 825"/> Sungai  - - - - - WILAYAH OPERASIONAL	<img alt="Sepadan Sungai symbol" data-bbox="510 785 530 805"/> Sepadan Sungai □ Daerah Rawan Gerakan Tanah <img alt="Daerah Rawan Longsoran symbol" data-bbox="510 815 530 835"/> Daerah Rawan Longsoran <img alt="Sepadan Sesar symbol" data-bbox="510 845 530 865"/> Sepadan Sesar ● Sepadan Mata Air	SUMBER HASIL ANALISIS	
			EKALA 1 : 165.000	GAMBAR 4.5

PETA  
 WILAYAH OPERASIONAL  
 BADAN KERJA SAMA

0 165 330 Km  
 N  
 W — E  
 S

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Pemberlakuan UU No. 22/1999 dan 25/1999 membawa implikasi pada pembangunan di daerah. Ada dua skenario yang terjadi yaitu apakah masing-masing daerah akan bekerjasama atau malahan bersaing untuk memajukan daerahnya masing-masing tanpa mempertimbangkan daerah lain. Satu hal yang perlu digaris bawahi bahwa persaingan yang akan terjadi jangan sampai menimbulkan pertentangan yang akan menghambat proses pengembangan wilayah. Menindak lanjuti kondisi tersebut, perlu adanya koordinasi antar daerah sehingga memunculkan potensi komparatif dan kompetitif yang akan menguntungkan kedua wilayah kota/kabupaten.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan identifikasi terhadap keunggulan dan keterbatasan potensi yang dimiliki oleh Kota Semarang dan Kabupaten Semarang maka bidang yang menjadi unggulan dan keterbatasan masing-masing daerah yang dapat dikerjasamakan adalah: bidang Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan.
2. Berdasarkan analisis PHA (Proses Hirarki Analitik) ada beberapa kesimpulan yang dikemukakan adalah sebagai berikut:
  - a. Pada rancangan struktur hirarki level bidang, bidang pembangunan merupakan faktor tertinggi dalam penilaian, artinya dalam kerja sama antardaerah bidang pembangunan lebih dominan.

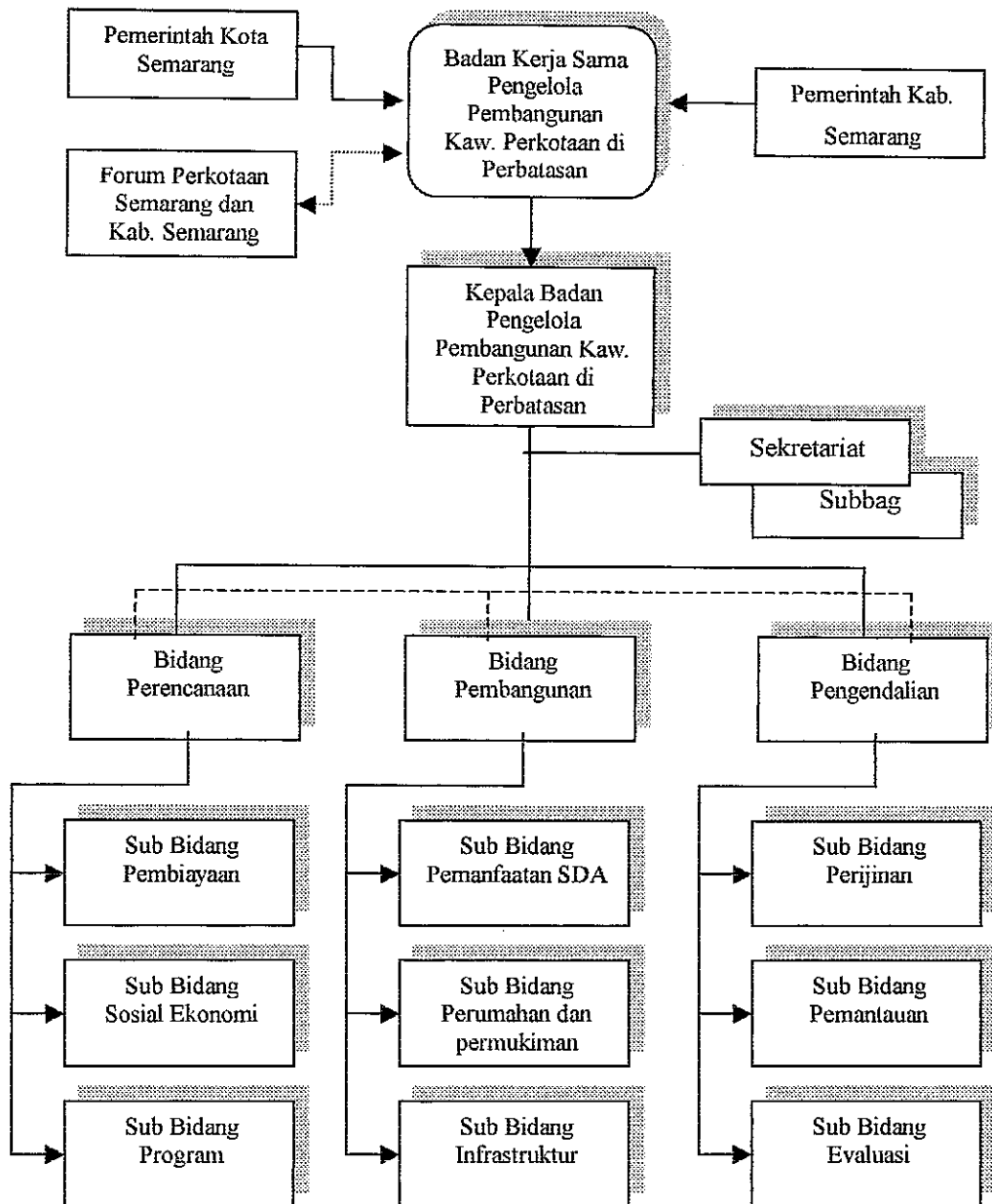
- b. Pada level faktor, yang ditinjau terhadap bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Masyarakat, maka faktor Komponen Sumber Daya Alam (air) merupakan faktor yang paling dominan untuk dikerjakan samakan.
- c. Pada level Alternatif, maka didapat alternatif terpilih untuk bentuk kerja sama pembangunan kawasan perkotaan di perbatasan adalah Usaha Patungan Terfokus (UPT).

Bentuk kerja sama yang berupa Badan Kerja Sama Pengelolaan Pembangunan Kawasan Perbatasan antara Kota Semarang dan Kabupaten Semarang bisa memberikan keuntungan dengan saling berkomplementer untuk melakukan pengelolaan pembangunan kawasan perkotaan yang pada prinsipnya melibatkan dua daerah otonom, pelaksanaannya harus dilakukan kerja sama antardaerah agar masing-masing daerah dalam pengembangan potensinya dapat saling terpadu serta saling melengkapi.

Hasil dari studi yang dilakukan untuk mencari struktur pengelolaan pembangunan berdasarkan pada kerangka kelembagaan Badan Kerja Sama di atas maka dapat di gambarkan dalam hierarki **Struktur Organisasi Kerja Sama Pengelolaan Pembangunan Perkotaan Kawasan Perbatasan antara Kota Semarang dengan Kabupaten Semarang**.

Sedangkan wilayah kerja Badan Kerja Sama ini terletak pada kedua daerah otonom yang memiliki empat kecamatan dengan fungsi masing-masing yang telah ditetapkan dalam rencana pengembangan kawasan dengan bidang pembangunan sebagai tujuan utama kerja sama. Wilayah Operasional lembaga ini hasil *superinfuse* peta sepadan sungai, mata air dan kawasan lindung, sehingga menghasilkan **Peta Wilayah Oprasional Kerja Sama Pengelolaan Pembangunan Kawasan perkotaan di Perbatasan**.

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN KERJA SAMA  
PENGELOLA PEMBANGUNAN KAWASAN PERKOTAAN DI PERBATASAN  
ANTARA KOTA SEMARANG DENGAN KABUPATEN SEMARANG**



Keterangan :  
 \_\_\_\_\_ : Garis Komando  
 - - - - - : Garis Koordinasi

## 5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disusun beberapa rekomendasi. Mengingat studi ini merupakan tahap awal yang berfungsi membuka wawasan bagi kajian kerja sama antar wilayah perbatasan yang lebih dalam. Rekomendasi ini akan terbagi mejadi dua hal yaitu rekomendasi untuk studi lebih lanjut dan rekomendasi untuk pemerintah kota/kabupaten. Rekomendasi untuk studi lebih lanjut yaitu:

1. Perlunya menindak lanjuti studi kerja sama pengelolaan kawasan perkotaan di perbatasan antara Kota Semarang dengan Kabupaten Semarang, dengan penelitian lebih dalam yang melibatkan lebih banyak instansi-instansi yang terkait yang memiliki kepentingan di kawasan ini.
2. Perlunya menggali lebih dalam untuk menghasilkan bidang-bidang atau sektor yang memang mendesak untuk dikerja samakan.
3. Perlunya menindak lanjuti penelitian ini dengan melibatkan seluruh wilayah perbatasan di Kota Semarang dengan seluruh wilayah perbatasan daerah tetangga yang ada di sekitarnya, dengan pembentukan badan kerja sama yang menagani seluruh wilayah perbatasan yang ada di Kota Semarang untuk lebih efisien.

Untuk memberikan rekomendasi bagi pemerintah Kota Semarang dan Kabupaten Semarang bahwa dalam pengelolaan pembangunan kawasan perkotaan di perbatasan yang pada prinsipnya suatu pengelolaan pembangunan yang melibatkan dua daerah otonom, pelaksanaannya harus dilakukan dengan kerja sama antardaerah agar masing-masing daerah dalam pengembangan potensi daerahnya dapat saling terpadu serta saling melengkapi.

Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi dasar bagi gagasan pemerintah daerah untuk segera mengkaji bentuk kerja sama antardaerah yang tepat dikembangkan untuk menangani kawasan perkotaan diperbatasan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulrahman. 1985. *"Beberapa Pemikiran Mengenai Otonomi Daerah"*. Meton Putera, Jakarta.
- Bourne, L.S. 1982. *"Internal Structure of The City: Readings on urban form, Growth, and Policy. Second Edition"*. Oxford, Oxford University Press.
- Budihardjo, Eko dan Eddy Darmawan. 1992. *"Pemantauan Pola Perkembangan Kota"*. Jakarta, Direktorat Pembinaan Pembangunan Kota.
- Chapin, F.S et al. 1995. *"Urban Land Use Planning. Fourth Edition"*. Illinois, University of Illinois press.
- Daldjoeni, N. 1996. *"Geografi Baru: Organisasi Keruangan dalam Teori dan Praktek"*. Bandung, Alumni Bandung.
- Djojodipuro, M. 1992. *Teori Lokasi*. Bandung, ITB Bandung
- Gilbert, Allan dan Joseph Gugler. 1996. *"Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga"*. Yogyakarta, PT.Tiara Wacana Yogyakarta.
- Hoover, Edgar. 1975. *"An Introduction to Regional Economics. Second Edition"*. Alfre A. Jayadinata, T, Johara. 1992. *"Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah"*. Bandung, ITB Bandung.
- Kamus Tata Ruang, 1997. Direktorat Jendral Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum.
- Rugg, S, Dean. 1979. *"Spatial Foundation Of Urbanism"*. Nebraska, University of Nebraska.
- Sugandhy, Aca. 1999. *"Penataan Ruang dalam Pengelolaan Lingkungan hidup"*. Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- S. Pamuji, 1985 *"Kerjasama Antar Daerah dalam Rangka Pembinaan Wilayah"*, Bina Aksara, Jakarta.
- Tjahjati, B dan B.S Kusbiantoro. 1997. *"Bunga Rampai perencanaan di Indonesia"*. Jakarta, PT. Grasindo Jakarta.
- W.F.G. Mastenbroek, 1986, *"Penanganan Konflik dan Pertumbuhan Organisasi"*, UI-Press, Jakarta.

Yunus, H.S. 2000. "Struktur Tata Ruang Kota". Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

### **B. Makalah Seminar**

Agus R dan Heri. 2000. "*Kerjasama antar daerah dalam pengelolaan Wilayah Perbatasan*". Seminar tidak diterbitkan, Fakultas Teknik Undip. Semarang

Santosa, Budi. 2000. "*Identifikasi Potensi Konflik Fisik Keruangan di Wilayah Perbatasan Kota Semarang dengan Kabupaten Semarang*". Tugas Akhir, Fakultas Teknik Undip. Semarang

Sumardi, 2002. "*Kajian Alternatif Kelembagaan Pengelola Pembangunan Kawasan Perkotaan Perbatasan Batang-Pekalongan*". Tugas Akhir, Fakultas Teknik Undip. Semarang

### **C. Peraturan**

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang No. 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. 319/ket/10/1998 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintahan Badan Usaha Swasta dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur